Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

ISLAM: JALAN KEBANGKITAN HAKIKI

Kegagalan Kebangkitan Indonesia

Bahaya RUU-KG

HM Ismail Yusanto:
PENTING MEMBACA ULANG SEJARAH

Rp. 5.500,- (Luar Jawa Rp. 7.000,-)
No.141 Tahun XII, 1-31 Mei 2012/ جمادى الثاني 1433H

Aksi Hizbut Tahrir Indonesia Serentak di Seluruh Nusantara Menolak Rencana Kebijakan Zalim Kenaikan BBM



Solo. Sehari setelah rapat paripurna DPR, 500 simpatisan HTI Daerah Soloraya pada hari Sabtu [31/3] mengadakan masirah Menolak Liberalisasi BBM.



Surabaya. Bersama 8000 umat, Hizbut Tahrir Indonesia DPD Jatim menggelar Aksi Longmarch Hizbut Tahrir Indonesia bersama Umat, "Tolak Kenaikkan harga BBM, Kebijakan Khianat & Dzalim", Ahad (25/3).



Jakarta. Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan), Senin (19/3) di depan Istana Presiden, Jakarta, menyuarakan dengan tegas bahwa kenaikan harga BBM adalah tindakan yang zalim.



Banjarmasin. 1.000 massa HTI longmarch menyusuri jalan–jalan utama di Kota Banjarmasin dan berakhir di halaman terbuka Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Ahad kemarin [25/03].



Samarinda. HTI DPD II Kota Samarinda Menolak Kenaikan BBM, Kamis (29/03) pukul 16.00 WITA di Simpang 4 Voorvo Samarinda.



Yogyakarta. Kamis [29/3], Delegasi HTI DPD I DIY melakukan audiensi dengan Anggota DPRD DIY, yaitu Ibu Tutik (Anggota Fraksi PAN), Bapak Widi (Anggota Fraksi PDI–P) dan Bapak Joko (Anggota Fraksi PDI–P). Tujuannya adalah Menolak Kebijakan Zalim Kenaikan BBM.

al-wa'ie
Media Politik dan Dakwah
Membangun Kesadaran Umat

No. 141 Tahun XII
1-31 Mei 2012/
جمادى الثاني 1433 H

Daftar Isi

Fokus: 09



Kegagalan Kebangkitan Indonesia

"Indonesia Bangkit" kini cuma tinggal slogan. Pasalnya, sejak meraih kemerdekaannya, bangsa ini tak pernah benar-benar bangkit. Saat ini bangsa yang 'merdeka' ini justru makin terpuruk di bawah penjajahan Barat; memang tidak secara fisik, tetapi secara ideologi, politik, ekonomi, budaya, dll.

Hiwar: 18

Penting Membaca Ulang Sejarah



Sejarah umat Islam—termasuk sejarah perjuangan kaum Muslim—di negeri ini telah lama ditutup-tutupi atau dimanipulasi sedemikian rupa. Tujuannya tidak lain adalah mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali peran besar Islam dan kontribusi kaum Muslim atas bangsa dan negara ini.

43 Nisa':

Bahaya RUU-KG

RUU Kesetaraan Gender saat ini sedang digodok Pemerintah dan DPR. Kaum Muslim tentu perlu memberikan perhatian lebih atas RUU KG ini. Pasalnya, RUU tersebut sarat masalah, karena berpangkal pada upaya liberalisasi kaum Muslim di bidang sosial, termasuk dalam ranah kehidupan rumah tangga. Jika disahkan menjadi UU, jelas ia akan sangat berbahaya bagi kaum Muslim.

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap tanggal 20 Mei di negeri ini tampaknya sudah kehilangan spiritnya. Harkitnas bahkan sudah kehilangan urgensinya untuk diperingati oleh bangsa ini. Selain mewarisi problem historis, penetapan 20 Mei sebagai Harkitnas juga minus pesan ideologis. Secara historis, Harkitnas didasarkan pada kelahiran Boedi Oetomo, sebuah organisasi sektarian yang justru beranggotakan orang-orang yang dekat dengan penjajah (Belanda). Karena itu, wajar jika Boedi Oetomo tak tampak sebagai organisasi yang anti penjajahan; ia tak pernah menyerukan perlawanan apalagi pengusiran penjajah Belanda dari Bumi Nusantara. Adapun secara ideologis Harkitnas tak mengusung wacana ideologi apapun yang bisa mengantarkan bangsa ini mengalami kebangkitannya yang hakiki.

Padahal membincangkan kebangkitan sejatinya membincangkan ideologi yang menjadi landasannya. Pasalnya, dalam konteks modern, bangsa yang bangkit adalah bangsa yang mampu merumuskan ideologinya sekaligus mengemban ideologinya itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Eropa dan Amerika adalah contoh bangsa yang bangkit dengan ideologi Kapitalismenya. Demikian pula bangsa Uni Sovyet pada masa lalu dengan Sosialisme-komunisnya. Tak boleh dilupakan adalah bangsa Muslim sejak tegaknya Daulah Islam di Madinah yang didirikan oleh Baginda Rasulullah saw. hingga masa-masa Kekhilafahan Islam sesudahnya selama kurang-lebih 14 abad lamanya.

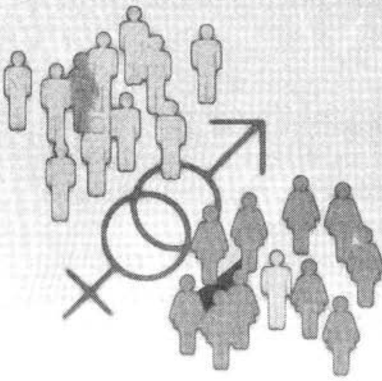
Persoalannya tinggal satu: mana di antara bangsa-bangsa tersebut yang benar-benar mengalami kebangkitan yang hakiki? Tentu saja kebangkitan yang pernah dialami kaum Muslim. Mengapa? Lalu bagaimana metode yang harus ditempuh untuk meraih kebangkitan hakiki tersebut? Bagaimana pula prospek kebangkitan bangsa Muslim di negeri ini? Mungkinkah Islam menjadi basis ideologi bagi kebangkitan di negeri dengan penduduk Muslim terbesar ini?

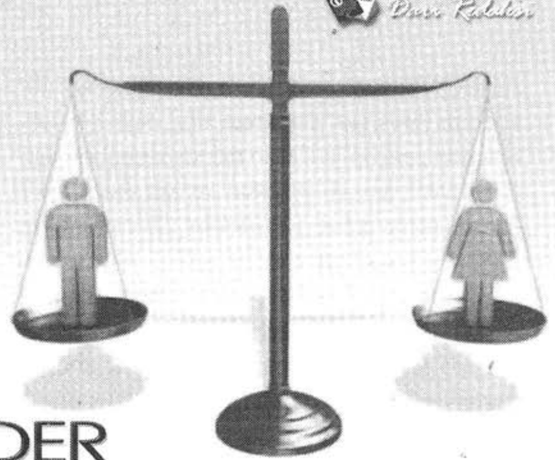
Itulah antara lain yang akan dibahas secara panjang-lebar dalam *al-wa'ie* edisi kali ini, selain sejumlah tema lain yang penting untuk dibaca. Kami berharap apa yang disajikan dalam *al-wa'ie* sedikit-banyak berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesadaran idelogis dan politis Islam di kalangan umat, sekaligus makin menambah *ghirah* perjuangan umat untuk segera meraih kemuliaannya kembali. Selamat membaca.

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Hizbut Tahrir Indonesia. **Alamat Redaksi**: Gedung Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, Crown Palace, No.24. Jalan Prof. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan **Alamat Surat:** PO BOX 633 Bogor 16000. **e-mail**: al-waie@hizbut-tahrir.or.id **Pemimpin Umum:** M. Anwar Iman. **Pemimpin Perusahaan dan Keuangan:** M. Anwar Iman. **Pemimpin Redaksi**: Farid Wadjdi. **Redaktur Pelaksana:** Arief B. Iskandar. **Redaktur**: Dwi Hendri, Yahya Abdurrahman. **Redaktur Bahasa:** M. Arif Billah. **Layout**: reeun Pixture. **Pemasaran**: Tedi Teja S. **Harga:** Rp. 5.500,- (P. Jawa) dan Rp. 7.000,- (Luar P. Jawa).

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel yang sesuai dengan misi dakwah Islam dengan didukung oleh fakta serta argumentasi rasional maupun *syar'i*. Tulisan diketik dengan spasi satu sepanjang 4-5 halaman A-4 (kira-kira 12 ribu-15 ribu karakter). Tulisan bisa dikirim via pos (disertakan disketnya) atau lewat e-mail dengan disertai identitas penulis. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai prangko balasan.





SALAH KAPRAH KESETARAAN JENDER

Upaya menghancurkan umat Islam tidak kenal lelah dilakukan oleh musuh-musuh Islam, dengan senjata utamanya liberalisme (kebebasan), baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan maupun sosial.

Di bidang sosial, kemunculan RUU Kesetaraaan dan Keadilan Gender (KKG) tidak bisa dilepaskan dari upaya Barat untuk menghancurkan umat ini secara total dengan senjata liberalismenya tersebut. Padahal Barat yang sudah mempraktikkan ide-ide jender ini terbukti gagal. Ide-ide jender ini alih-alih memperbaiki sistem sosial masyarakat, malah menghancurkan. Harapan memperbaiki nasib wanita pun tak kunjung terwujud. Justru wanitalah yang menjadi korban utama dari ide liberal kesetaraan jender ini.

Kesalahan utama mereka adalah dalam memandang apa yang menjadi penyebab berbagai persoalan yang menimpa wanita seperti penindasan terhadap wanita, kekerasaan di rumah tangga, upah buruh wanita yang murah, pelecehan seksual, dll. Kelompok feminis melihat semua persoalan perempuan muncul akibat dari paradigma patriarki, ketidaksetaraan jender, dan dominasi laki-laki.

Padahal apa yang terjadi bukanlah problem yang merupakan khas perempuan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pandangan jender. Kemiskinan bukan hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki. Kekerasan bukan hanya dialami perempuan, namun juga laki-laki. Upah buruh murah juga terjadi pada laki-laki. Persoalan ini bukanlah persoalan jenis kelamin, tetapi persoalan 'kemanusiaan' yang menimpa laki-laki maupun perempuan. Persoalan di atas muncul sebagai bentuk kegagalan sistem Kapitalisme menyelesaikan persoalan manusia.

Karena itu, yang kita butuhkan bukanlah paradigma kesetaraan atau keadilan jender, namun sistem yang adil yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan manusia tanpa memandang apakah dia laki-laki atau perempuan. Di sinilah relevansi mengapa kita membutuhkan syariah Islam secara menyeluruh. Sebabnya, syariah Islam adalah sistem kehidupan untuk menyelesaikan persoalan manusia, laki-laki dan perempuan.

Berkaitan dengan kesejahteraan, Islam mewajibkan negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, pendidikan gratis dan kesehatan gratis, baik laki-laki ataupun perempuan. Siapapun yang melakukan kejahatan (*jarimah*) akan ditindak tanpa memandang jenis kelaminnya, baik di ranah domestik ataupun di luar rumah.

Karena itu, dalam ideologi Islam tidak akan muncul masalah kesetaraan jender. Sebab, laki-laki dan wanita sama-sama hamba Allah. Mereka sama-sama diperintahkan hanya menyembah Allah SWT dan terikat dengan aturan-aturan

Allah SWT. Saat menjalankan syariah Islam ini, apapun jenisnya, siapapun dia, baik laki-laki ataupun perempuan, akan mendapat pahala dari Allah SWT. Seruan ketaatan kepada Allah SWT berlaku sama (Lihat, antara lain: QS al-A'raf [7]: 158; (Ali 'Imran [3]: 195).

Dalam masalah keterikatan dengan syariah Islam ini, ada yang hukumnya yang sama untuk laki-laki maupun perempuan, ada yang khusus untuk perempuan, dan ada yang khusus untuk laki-laki. Kewajiban shalat, misalnya, berlaku sama baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kewajiban menuntut ilmu, kewajiban mengoreksi penguasa zalim, kewajiban untuk berdakwah, dll semuanya berlaku sama baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, jelas khusus untuk wanita. Terdapat juga beberapa hukum yang khusus untuk laki-laki, semisal kewajiban shalat Jumat. Siapapun yang menjalankan hukum Allah ini akan mendapat pahala.

Laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga (*qawwam*), sementara posisi wanita sebagai *ummu wa rabbah al-bayt* (ibu dan pengatur rumah tangga). Meskipun berbagi tugas, semuanya mendapat pahala dari Allah SWT, karena sama-sama menjalankan perintah Allah SWT. Perbedaan fungsi ini tidak menunjukkan bahwa laki-laki lebih baik dari wanita atau sebaliknya.

Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sesungguhnya adalah tanggung jawab, jadi bukan legitimasi penindasan terhadap wanita. Sebagai pemimpin. Laki-laki (suami) wajib mencari nafkah, melindungi keluarganya dan mendidik keluarganya. Sebaliknya, kalau ada pelanggaran hukum syariah oleh suami, seperti menyiksa istri, atau menelantarkan istri, misalnya, tetap merupakan kejahatan (*jarimah*) yang wajib dihentikan dan pelakunya wajib diberi sanksi hukum.

Pelanggaran kehormatan, kekerasan domestik dan penganiayaan terhadap istri adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian melalui hubungan kemitraan antara suami dan istri.

Dalam hal lain, menuntut ilmu, misalnya, adalah kewajiban bagi setiap orang, lelaki maupun perempuan. Bahkan sangat penting bagi perempuan Muslimah untuk memiliki pendidikan islami setinggi mungkin, karena merekalah yang nantinya akan menjadi sumber pengetahuan pertama bagi anak-anaknya.

Negara Khilafah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan terbaik bagi warganegaranya. Dengan begitu, diperlukan banyak sekali perempuan yang berprofesi sebagai dokter, perawat dan guru untuk menjalankan peran dan tugas itu.

Wanita pun berhak untuk memiliki sesuatu dan mengembangkan harta dengan cara berdagang, industri, atau pertanian. Wanita memiliki hak untuk menduduki salah satu jabatan dalam negara seperti urusan pendidikan, pengadilan, dan kedokteran. Umar bin Khatab pernah meminta Asy-Syifa binti Abdullah al-Makhzumiyah, seorang wanita dari kaumnya, sebagai seorang *qadhi* di sebuah pasar di Madinah. Para wanita pada masa Rasul saw. ikut berperan serta dalam banyak peperangan untuk melakukan pengobatan kepada orang-orang yang terluka dan mengatur urusan-urusan mereka (yang terluka).

Wanita juga memiliki hak untuk menjadi salah satu anggota majelis umat. Alasannya, Rasul saw. pun saat menghadapi suatu musibah, beliau memanggil umat Islam ke masjid baik laki-laki maupun wanita, dan beliau mendengarkan pendapat mereka semuanya. Rasul saw. juga bermusyawarah dengan istrinya, Ummu Salamah, dalam Perjanjian Hudaibiyah.

Walhasil, tudingan tentang perlakukan buruk Islam terhadap wanita adalah keliru dan sering merupakan propaganda belaka. **[Farid Wadjdi]**

Pembaca

Opini

Tema *Opini*
Tema Opini Edisi 143/Juli 2012:
Wacana Penghematan Anggaran Negara

Peran Penting Kontak Dakwah

Abdul Rohim
Pengurus Kelompok Kajian El-FaruQ *Islamic Thought and Civilization*

Ada yang menarik ketika menyimak penyataan Guru Besar Ilmu Politik Harvard, Amerika Serikat, Samuel P. Huntington, dalam bukunya, *The Clash Of Civilization.* Dalam salah satu bab buku itu dia menyatakan, *"Absennya Negara Islam yang berperan sebagai negara inti merupakan faktor utama yang menjadi sebab terjadinya konflik-konflik internal maupun eksternal dikalangan masyarakat Islam. Kesadaran tanpa keterikatan menjadi sumber kelemahan Islam serta memudahkan jalan bagi kemungkinan timbulnya ancaman dari peradaban lain."*

Apa yang disampaikan oleh Samuel di atas tentu saja bukanlah omong-kosong belaka dilihat dari berbagai sudut pandang. Walaupun Samuel adalah orang Barat dan bukan orang Islam, kesimpulan yang dia nyatakan sedikit-banyak adalah suatu kebenaran.

Sekilas setelah membaca kesimpulan dari analisis tersebut, kita mungkin merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Samuel adalah sebuah bentuk dukungan bagi umat Islam dalam memperjuangkan kebangkitan Islam, memang itu bisa saja terjadi, namun kenyataannya berkata lain. Buku yang memantik banyak perdebatan baik di kalangan Barat maupun Muslim itu muncul tentu untuk memberikan lampu merah kepada Barat tentang akan bangkitnya peradaban Islam beserta pengaruh-pengaruhnya terhadap peradaban Barat. Buku itu juga sebagai salah satu rujukan serta justifikasi ilmiah bagi Barat dalam mengambil kebijakan-kebijakan luar negerinya. Karena itu, salah satu hasilnya bisa kita lihat bersama, yaitu kebijakan-kebijakan Barat yang cenderung represif dalam beberapa tahun terakhir terhadap negeri-negeri Muslim.

Karena itu pula tidak aneh jika sejak berakhirnya Perang Dingin dengan Uni Soviet, Barat getol sekali melakukan kontak dan menyerukan kampanye-kampanye anti Islam di berbagai belahan dunia, dengan dalih *war on terorism*. Semua itu tentu saja untuk menggalang dukungan Internasional terutama pihak-pihak yang seideologi dengannya sebagai jalan menghalangi tegaknya Daulah Islamiyah di kancah perpolitikan dunia.

Satu hal yang kemudian patut menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sesungguhnya saat ini tiada kesempatan bagi umat Muslim untuk meragukan kebangkitan Islam dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah. Mengapa? Di dalam al-Quran dan as-Sunnah sudah dengan sangat jelas Allah dan Rasul-Nya menjanjikan bahwa Daulah Islam bakal tegak dan umat Islam bakal berjaya. Mau berdalih apa lagi? Bahkan Barat yang notabene sangat memusuhi Islam saja sebegitu yakinnya akan kebangkitan Islam. Masa iya kita sebagai umat yang dijanjikan kebangkitannya malah

mengingkari hal tersebut?

Tentu sebuah ironi yang menyedihkan, ketika Barat bersemangat sekali melakukan kontak, mencari dukungan dan koalisi untuk menghalang-halangi kebangkitan Islam; pada saat yang sama kita hanya diam pasrah menonton, tidak tergerak untuk berjuang menyongsong tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah. Padahal *nashrulLah* tidak akan cepat turun jika umat masih dalam keadaan bodoh pemahamannya tentang Islam. Begitu penting peran dan gerak kita dalam perjuangan ini. Karena itu, marilah kita terus bersemangat dalam menebarkan kabar gembira, melakukan kontak dan mempersiapkan semua orang yang berada dalam jangkauan kita agar *nashrulLah* cepat turun, Daulah Khilafah Islamiyah cepat tegak dan Islam *rahmatan lil 'alamin* bisa kembali menaungi seluruh alam. Allahu Akbar! []

eLHutriSLAMiC
(Penulis KUTLAH-Media)

Seorang pedagang yang sukses adalah pedagang yang mampu menarik keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan Da'i yang sukses adalah *da'i* yang mampu menarik hati umat sedalam-dalamnya sehingga kesadaran umat akan Islam semakin meningkat. Dalam artian ia mampu mengajak orang yang ia dakwahi untuk turut serta dalam jalan panjang dakwah dan perjuangan itu sendiri." Begitu kalimat yang saya kutip dari *statement* ustadz Arief B.Iskandar.

Apabila *statement* ini dipahami oleh setiap penyeru dakwah, tentu akan menjadi keuntungan bagi pergerakan dakwah secara umum. Semakin banyak *da'i* yang dapat menarik orang untuk masuk barisan dakwah, akan semakin besar pula kekuatan dakwah ini. Inilah urgensitas *dakwah fardhiyyah* yang termanifestasikan dalam sebuah aktivitas mulia yang bernama *ittishal* (kontak).

Sejak Allah SWT menurunkan surat al-Mudatsir, Nabi Muhammad saw. semakin memperluas zona dan pengaruh dakwahnya. Setelah sebelumnya beliau sukses mengislamkan orang terdekatnya dalam rumah semacam; Sayyidah Khadijah (istri beliau), Zaid bin Haritsah (maula beliau) dan Ali bin Abi Thalib (sepupu beliau). Beliau mulai merambah orang-orang 'luar' rumahnya seperti Abu Bakar dan sahabat-sahabat beliau lainnya. Begitulah Rasulullah, tak pernah lelah melakukan dakwah melalui wasilah kontak ini. Beliau rela meninggalkan 'zona nyaman'-nya untuk bersua dengan manusia bangsa Qurays guna menyadarkan mereka terhadap risalah kebenaran Islam.

Tak hanya sampai di situ, ketika mengutus sahabat Mush'ab bin Umair pun, Rasulullah saw. tak lupa membersitkan sebuah pesan yang dipegang teguh oleh Mushab, yaitu "*Sibghah* (warnai) kota Yatsrib!" Dari pesan agung ini Mushab bin Umair pun tak bisa tinggal diam menyusuri segenap penjuru kota Yatsrib untuk mengenalkan Islam kepada mereka. Lewat kontak Mushab inilah akhirnya 'kunci gerbang' tegaknya Daulah Islam mulai tergenggam. Lewat lisan dan gaya elegannyalah Saad bin Muadz, Usaid bin Hudhair dan para pemuka kaum penghuni Yatsrib memeluk Islam. Maka jadilah nama Mushab melegenda sebagai 'Muqri' Madinah', karena dialah yang pertama membacakan titah dan petuah dari Rasulullah saw. kepada penduduk Yatsrib.

Kini, urgensitas *ittishal* (kontak dakwah) baik yang *maqsudah* (terencana) maupun *ghayru maqsudah* (tidak terencana) tetap tak tergantikan. Lewat lisan-lisan mulia para pengemban dakwah, satu-persatu manusia mulai sadar akan arti dan makna Islam yang sebenarnya. Maka tak mengherankan jikalau kebangkitan Islam akan segera tercapai, tidak lama lagi. Lanjutkan! (kontak).[]



SAAT TOKOH BICARA JENDER

Muhammad Rahmat Kurnia
DPP Hizbut Tahrir Indonesia

Indonesia terus di-'Barat'-kan. Nilai kafir penjajah terus dicekokkan. Salah satunya adalah isu jender. Isu ini terlihat manis, padahal isinya racun. Kini sedang digodog Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender (RUU KG) di DPR. Bahkan pada tanggal 15 Maret 2012 Komisi VIII DPR RI mengadakan *hearing* tentang RUU KG tersebut.

Mereka yang berada di Parlemen tampak semangat untuk mengegolkan RUU KG menjadi undang-undang. Namun, sikap berbeda disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam yang bergerak di akar rumput.

Ada realitas yang menarik pada Ahad (8/4/2012) yang lalu di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Di masjid bersejarah tersebut, para jamaah yang hadir membuat pernyataan tertulis disertai keterangan diri, lalu dikirim ke DPR agar persoalan RUU Gender ini mendapatkan perhatian. Ketika saya bertanya kepada salah seorang yang hadir mengapa memiliki sikap demikian, dia menyatakan: "Sebab, bila RUU Gender ini ada maka akan menjadi malapetaka bagi negara dan bangsa, bahkan agama. Kita perlu segera memberi respon yang serius. Kita harus proaktif dan tidak bisa tinggal diam. Perlu digalang persatuan umat Islam untuk segera mengantisipasi pengesahan RUU tersebut sebelum terlambat."

Bukan hanya di kalangan jamaah masjid. Banyak pemimpin umat yang masih memiliki kepekaan terhadap upaya penghancuran umat. Beruntung, saya dapat berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh umat dari berbagai lembaga/organisasi tersebut. Saya menjadi dapat memahami secara langsung apa yang menjadi sikap mereka. Sebut saja Anwar Abbas, salah seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menyikapi RUU KG beliau mengatakan, "Hanya orang gila yang mau menyamaratakan perempuan dengan laki-laki. Laki-laki bukan perempuan. Oleh karena itu, pasti beda laki-laki dengan perempuan. Menyamakan sesuatu yang tidak sama tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logika."

Pernyataan ini tentu bukan tanpa alasan. Isu jender lahir akibat ketertindasan kaum perempuan di dunia Barat. Sayangnya, solusi yang diambil justru berasal dari Kapitalisme liberal, bukan dari Islam.

Sikap yang sama disampaikan oleh Ichwan Sam, Pengurus Nahdhatul Ulama (NU) sekaligus Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyampaikan, "Ada yang boleh sama persis, tapi tentu ada yang harus berbeda karena adanya hal-hal kodrati yang memang berbeda."

Pak Ichwan, begitu panggilan akrab saya, menambahkan, "Bagi seorang Muslim, implementasinya harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam."

Pandangan serupa dimiliki juga oleh pimpinan lembaga Islam lain. Ketua Umum al-Irsyad al-Islamiyah, KH Abdullah Zaidi, menyatakan, "RUU KG ini berbahaya." Lanjutnya, "Lihat surat al-Baqarah ayat 228 dan an-Nisa' ayat 34."

Dalam ayat 228 surat al-Baqarah dinyatakan (yang artinya): ...*Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya...*

Adapun surat an-Nisa' ayat 34 menyatakan (yang artinya): *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*

Dalam kedua ayat itu dijelaskan bahwa laki-laki merupakan '*qawwam*' (pemimpin, pengarah)

perempuan. Upaya untuk menyamadudukkan laki-laki dengan perempuan hanya akan melahirkan malapetaka.

Tokoh lainnya, Ketua Umum Sarekat Islam, Djauhari Syamsudin, memiliki pandangan bahwa sudah ada aturan hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Karena itu, pihak yang berupaya menentang aturan tersebut tidak boleh dibiarkan. "Mereka yang melawan al-Quran harus kita hadapi," ujarnya.

Zulkifli yang aktif di al-Ittihadiyah dan MUI menyampaikan dengan tegas, "Rujukan kita jelas al-Quran dan as-Sunnah."

"Ini memang proyek Yahudi. Harus kita hentikan," tambahnya dengan semangat.

Ketua Umum Perti, Amin Lubis, lugas menyampaikan, "Isu jender bertentangan dengan al-Quran dan melawan syariah Islam. Kewajiban semua umat Islam untuk melawannya."

Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri, menyikapi RUU KG dengan kalimat pendek, "Sangat sesat!"

Pemahaman bahwa isu jender ini hanyalah upaya penghancuran nilai Islam dan penanaman racun Barat (*westoxiation*) rupanya merata di kalangan tokoh lembaga/organisasi Islam. Ide ini merupakan bagian dari liberalisme. Pimpinan Tim Pengacara Muslim (TPM), Mahendradatta, menyampaikan kegeramannya kepada saya, "Kami sudah mempelajari RUU Gender tersebut. Kita sudah lawan. Kita harus menggelorakan 'Indonesia Tanpa JIL'. Kegilaan RUU Gender ini memang karya orang liberal sehingga harus difokuskan pada mereka."

Derasnya upaya liberalisasi ini harus disikapi serius oleh umat Islam. Semestinya, tokoh Islam dimana pun harus berpihak pada Islam. Zahir Khan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dengan penuh semangat mengatakan, "RUU Gender jelas bertentangan dengan syariah. Karenanya, perlu ditemui partai Islam yang ada di DPR."

Beliau juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Hari Jumat lalu (13/4/2012) saya khutbah di Tanah Abang. Di masjid sana ada Buletin *Al-Islam* HTI tentang RUU Gender. Bagus sekali," tambahnya.

Beliau mengharapkan masih ada kesadaran dari para tokoh umat Islam yang ada di Parlemen untuk berpihak pada kepentingan umat.

Harapan adanya keberpihakan dan pembelaan terhadap kepentingan umat Islam dari tokoh umat Islam di Parlemen pun disampaikan oleh Fuad Amsyari, pengurus pusat Partai Bulan Bintang. Pak Fuad menyampaikan, "Jika DPR setuju dengan RUU Gender maka jelas salah, menentang tuntunan Allah SWT, dan membuat bangsa rusak. Siapa yang mengajukan RUU tersebut? Jika Pemerintah maka dia yang bertanggung jawab. Jika itu merupakan usulan DPR dan disetujui oleh Pemerintah maka keduanya bertanggung jawab. Di sini perlunya DPR dan pemerintahan yang islami supaya tidak terjadi kasus-kasus yang menambah beban. Maka dari itu, umat Islam harus diarahkan memilih partai Islam dalam Pemilu."

Namun, realitas yang ada memang sulit mengharapkan orang yang ada di Parlemen. Semua tahu, politik yang ada di Senayan adalah politik dagang sapi. Keberpihakan pada syariah Islam nyaris tak terdengar. Mantan anggota DPR yang kini menjadi pemimpin *Eramuslim.com* Mashadi, menyampaikan, "Buang ke tong sampah. Tidak berguna. Orang cuma satu *kok* tujuan mereka: menghancurkan Islam."

Bahkan Ketua Serikat Pekerja BUMN Strategis, Ahmad Daryoko, menyatakan dengan keras, "Wah, *kok* tambah kacau ya?! *Lha* itu PPP, PAN, PKS *kan* banyak tokoh-tokoh Islam, masa terus persamaan jender? Lha, *arrijâlu qawwamûna 'alâ nisâ*-nya kemana tuh! DPR ini bubarkan saja!"

Begitulah ketika tokoh bicara RUU KG. Semua sepakat bahwa isu jender merupakan upaya untuk meliberalkan umat Islam dalam bidang sosial. Realitas ini pun menunjukkan bahwa ada keterpisahan penguasa dengan rakyat. Penguasa ingin menerapkan Kapitalisme liberal dalam segala bidang, umat dan tokohnya tidak. *WalLâhu a'lam.* []



KEGAGALAN KEBANGKITAN INDONESIA

Prof. Dr. Fahmi Amhar

Berbicara tentang kebangkitan sebuah bangsa, kita harus menetapkan dulu apa definisi kebangkitan itu; apa indikator sebuah bangsa dikatakan telah bangkit, maju, kuat dan mandiri; juga sebaliknya, kapan bangsa itu itu disebut bangsa yang gagal, terbelakang, lemah dan pengekor.

Pertama-tama kita bisa menggunakan definisi yang relatif berlaku umum. Bangkit berarti bangun dari suatu kondisi yang dianggap memiliki kemampuan lebih rendah, misalnya dari posisi berbaring ke duduk, dari duduk menjadi berdiri, dan dari berdiri menjadi berjalan atau berlari. Dalam konteks sosial-politik, bangkit adalah berubah dari posisi "mati" (statis) menjadi "hidup" (dinamis) secara sosial-politik.

Dari sisi kualitas, bangkit menuju hidup ini ada tiga tingkatan (level), yaitu:

1) *Level-1*: bergerak ke arah yang positif (*self-build*), tidak merusak diri sendiri (*self-destroy*);
2) *Level-2*: melakukan sesuatu yang ada hasilnya (produktif), yang tidak habis sekali pakai;
3) *Level-3*: memberikan sesuatu yang kontributif kepada orang banyak atau masa sesudahnya.

Untuk ukuran sebuah bangsa, bangsa yang statis adalah bangsa yang sepenuhnya bergantung kepada bangsa lain, baik dalam perkara mempertahankan hidupnya, menjaga martabatnya, maupun mewujudkan cita-citanya. Kehidupan maupun keamanannya ada di tangan bangsa lain. Bahkan mungkin untuk pangan, air dan energi harus disuplai atau disubsidi bangsa lain. Hukum yang berlaku dan siapa penguasa yang menjalankan hukum itu sepenuhnya juga ditentukan bangsa lain. Tentu saja, apa saja yang dianggap baik yang perlu diperjuangkan sebagai cita-citanya juga diberikan oleh bangsa lain yang

menguasai bangsa tersebut. Bangsa tersebut menjadi "bangsa robot" meski mungkin memiliki kemajuan material yang tinggi seperti adanya konstruksi pencakar langit, pabrik-pabrik, perkebunan, pertambangan besar, atau penggunaan teknologi transportasi atau informasi yang canggih. Namun, semua kemajuan material ini dirancang asing, dioperasikan di bawah supervisi asing dan keuntungannya juga paling banyak dinikmati oleh asing.

Sebuah bangsa dikatakan keluar dari kondisi statisnya ketika dia mulai merintis untuk memiliki kemauan dan kemampuan sendiri guna mempertahankan kehidupannya, menjaga martabatnya dan mewujudkan cita-citanya. Proses inilah yang sering disebut perjuangan kemerdekaan. Persoalannya, sejauh mana kualitas "merdeka" setelah bangkit tersebut?

Sebuah bangsa dapat dikatakan telah bangkit pada Level-1 ketika setelah merdeka benar-benar bergerak positif, kondisinya tidak sama atau makin buruk dengan sebelumnya. Namun, jika setelah "merdeka" kemudian terjadi perang saudara, ekonomi memburuk, pendidikan tidak lagi berjalan, dan di jalanan berlaku hukum rimba, maka Level-1 ini pun tidak tercapai. Baru setelah Level-1 tercapai, bangsa itu dapat meraih Level-2 atau Level-3.

Level-2 adalah ketika kebangkitannya itu memberi dirinya kemampuan untuk produktif, menghasilkan SDM cerdas berkualitas, membuat sendiri fasilitas produksi yang mampu membuat dirinya mandiri, sekalipun belum lebih maju dari capaian material yang dimiliki negara lain. Intinya bukan kualitas capaian materialnya, tetapi bahwa itu dirancang sendiri, dioperasikan sendiri dan keuntungannya lebih untuk mereka sendiri.

Pada Level-3, mereka benar-benar dapat memberikan kontribusi ke luar, bahkan ke masa sesudahnya. Kontribusi ini bergantung pada visi yang dia emban; bisa positif, bisa negatif. Mereka bisa membebaskan atau memajukan bangsa lain, bisa pula menjajah bangsa lain.

Peta Kebangkitan Dunia

Saat ini ada bangsa-bangsa yang statis, misalnya sejumlah negeri jajahan Inggris, Prancis, Rusia atau Amerika. Irlandia Utara adalah jajahan Inggris dan Puerto Rico adalah negeri di Caribia jajahan Amerika Serikat. Sekalipun di sana ada kemajuan material, faktanya bangsa itu adalah bangsa "robot". Mereka bergantung total pada politik negara penjajahnya.

Sebagian negara jajahan pernah bergolak menuju kemerdekaan, misalnya Chechnya di Rusia, atau Irlandia Utara di Inggris. Meski negeri tersebut sudah dimasukkan sebagai provinsi penuh dari negara penjajahnya, dan rakyatnya dianggap memiliki hak yang sama dengan rakyat di provinsi lain, mereka tetap merasa tidak puas karena merasa memiliki martabat dan cita-cita yang berbeda. Hal yang mirip pernah terjadi di Nusantara saat menjadi sebuah koloni Negeri Belanda dengan adanya seorang gubernur jenderal yang memerintah Hindia-Belanda.

Lalu ada bangsa-bangsa merdeka pada Level-1 yang sudah berangsur-angsur bergerak ke arah positif, seperti Vietnam atau Malaysia. Walau mungkin belum semaju Malaysia, Indonesia dapat dikatakan juga sedang menuju Level-1, dengan indikator bahwa sejak merdeka secara umum hampir tak ada lagi perang saudara yang berkepanjangan, walaupun masih ada bentrokan kecil-kecilan atau separatisme di daerah rawan konflik seperti di Papua. Ekonomi Indonesia juga secara umum tidak lagi memburuk dengan cepat; pangan atau energi masih relatif mudah diperoleh walaupun cenderung makin mahal dan utang negara semakin besar. Pendidikan bisa berjalan walaupun masih ada jutaan rakyat yang

kesulitan mengaksesnya. Di jalanan hukum juga sedikit-banyak bisa berjalan walaupun ada mafia peradilan.

Namun, kebangkitan di Indonesia dapat dikatakan gagal mencapai Level-2. Level-2 dapat dikatakan telah diraih oleh negara-negara maju seperti Skandinavia, Switzerland atau negara berkembang seperti Cina atau India, bahkan oleh negara yang lebih kecil seperti Iran atau Venezuela. Cina dan India dalam tiga dekade terakhir dapat dikatakan berhasil mentransformasi masyarakatnya menjadi cerdas dan mandiri. Mereka berhasil merancang sendiri banyak hal terkait teknologi dan industri, mengoperasikannya sendiri, dan mereguk keuntungannya sendiri. Meski produk mereka belum sekaliber negara-negara adidaya, mereka sudah tidak akan melemah oleh suatu embargo, bahkan mereka mulai disegani di kancah global.

Karena Indonesia gagal meraih kebangkitan Level-2, maka tentu saja gagal meraih Level-3. Level-3 saat ini dimiliki oleh negara-negara adidaya atau mantan adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan mungkin ditambah Jepang atau Jerman. Umat Islam hanya memiliki negara pada Level-3 pada masa lalu, yakni Daulah Khilafah.

Pada masa Orde Lama, Soekarno ingin dengan cepat mentransformasi Indonesia yang baru saja merdeka menuju kebangkitan Level-3. Secara politik Indonesia di bawah pimpinan Soekarno berusaha tegak, tidak mengekor politik negara adidaya saat itu. Namun, fakta di lapangan, jangankan Level-3, Level-1 pun saat itu belum tercapai. Memang tentara penjajah tidak lagi bercokol di Indonesia, tetapi perang saudara saat itu masih berkecamuk di mana-mana. Inflasi sangat tinggi, harga-harga meroket dan *rate*-pendidikan sangat rendah.

Pada masa Orde Baru, Soeharto belajar dari pengalaman Soekarno, mencoba membangun Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. Soeharto bahkan membangun berbagai industri strategis seperti PT IPTN, PT PAL, PT PINDAD dsb. Sayangnya, mayoritas ekonom dan teknokrat yang direkrut Soeharto kurang mandiri sehingga mengikuti arahan nyaris total dari asing. Ini tampak pada kebijakan utang luar negeri, pembuatan berbagai instrumen hukum yang lebih pro kapitalis (kurang pro UKM) serta kebijakan politik yang lebih represif. Semua ini ditambah lagi dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru ditunjukkan secara mencolok oleh keluarga Presiden. Akibatnya, kebangkitan Level-1 pun justru ditinggalkan lagi. Pada akhir kekuasaan Soeharto, ekonomi dengan cepat memburuk dimulai dari krisis moneter menjadi krisis ekonomi, dan krisis multidimensi, termasuk perang saudara yang meluas di Aceh, Ambon, Poso dll. Industri strategis yang telah disiapkan ditelantarkan kembali dan ribuan SDM cerdas yang pernah dididik ramai-ramai hengkang ke luar negeri.

Orde Reformasi sempat memberikan harapan. Krisis ekonomi sementara dapat diatasi. Perang saudara dapat diredam. Namun, liberalisasi yang membonceng reformasi justru membuat kebangkitan Level-1 saja semakin sulit didekati kembali. Berbagai perundangan yang dibuat di era reformasi justru membuat negeri ini makin "ramah" (baca: "dikuasai") investor asing. Akibatnya, kesempatan kerja makin berkurang; semakin banyak rakyat yang kehilangan daya beli dan di sisi lain rakyat semakin tidak terurus oleh para petualang politik yang naik ke kekuasaan (legislatif dan eksekutif) melalui proses demokrasi yang sarat permainan uang.

Faktor Ideologi

Di dunia, ada bangsa dengan ideologi yang bermacam-macam berhasil bangkit hingga ke Level-3. Amerika bangkit dengan Kapitalisme. Soviet dulu bangkit dengan Sosialisme. Yang membedakan hanya pada Level-3 ini kontribusi

seperti apa yang dihasilkan oleh bangsa itu. Faktanya, dua ideologi itu menebar kerusakan di luar negeri. Penjajahan, eksploitasi sumberdaya alam dan penggunaan tenaga kerja yang nyaris seperti budak menjadi menu sehari-hari. Sosialisme bahkan dalam jangka panjang tidak berhasil mempertahankan keberlangsungan negara Soviet. Sekarang Kapitalisme sedang menjadikan Amerika diujung tanduk.

Indonesia mengklaim menjadikan Pancasila sebagai ideologi kebangkitannya. Namun, ada yang terlupa, bahwa Pancasila sebenarnya baru sekadar falsafah, belum berupa ideologi yang lengkap. Karena itu, dalam praktiknya, Pancasila bisa ditarik-tarik ke arah sosialis seperti pada masa Orde Lama, ke arah kapitalis seperti pada masa Orde Baru, atau ke arah kapitalis-liberal seperti pada era Reformasi.

Hanya ideologi intelektual yang sehat dan secara rinci menunjukkan tak cuma tentang cita-cita, tetapi juga jalan yang terang untuk meraih cita-cita itu, yang akan mampu mengantarkan Indonesia ke kebangkitannya, tak hanya Level-1, tetapi hingga Level-3. Ideologi seperti itu ada dalam Islam. Pengalaman empiris dari sejarah menunjukkan bahwa itu hanya akan terjadi bila kita meraih cita-cita itu melalui kendaraan berupa Daulah Khilafah yang akan menerapkan seluruh paket sistem syariah.

Dengan ideologi Islam, visi kebangkitan sangat jelas, yaitu sampai mampu mewujudkan umat terbaik yang mampu melakukan amar makruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah (QS 3: 110). Tugas ini memerlukan tipe-tipe manusia *muttaqin*, mereka yang hanya takut kepada Allah saja dan taat kepada semua yang diperintahkan syariah. Selanjutnya kebangkitan Level-1, 2, 3 akan terwujud dengan sendirinya seiring dengan penerapan syariah yang *kaffah* dan istiqamah.

Indonesia mengklaim menjadikan Pancasila sebagai ideologi kebangkitannya. Namun, ada yang terlupa, bahwa Pancasila sebenarnya baru sekadar falsafah, belum berupa ideologi yang lengkap. Karena itu, dalam praktiknya, Pancasila bisa ditarik-tarik ke arah sosialis seperti pada masa Orde Lama, ke arah kapitalis seperti pada masa Orde Baru, atau ke arah kapitalis-liberal seperti pada era Reformasi.

Untuk konteks Indonesia, faktor ideologi ini juga akan berpengaruh pada seberapa cepat kebangkitan akan diraih. Karena 85% rakyat Indonesia adalah Muslim dan berbagai survei menunjukkan mereka masih memiliki ikatan emosional dan spiritual Islam yang tinggi, maka sudah seharusnya ideologi yang dipakai untuk membangkitkan adalah ideologi Islam.

Inilah rahasia mengapa kebangkitan Level-1 pun tidak sepenuhnya kita raih, karena kita lengah tidak menggunakan ideologi Islam sebagai ideologi kebangkitan. Hanya dengan ideologi Islam, tak cuma kebangkitan Level-1 yang akan kita raih, tetapi juga Level-2 dan Level-3.

Dalam konteks materialisme seperti pada bangsa Barat, kualitas suatu bangsa memang diukur dari produk peradaban (teknologi, industri, seni, arsitektur, dll). Namun, dalam konteks Islam, ukuran yang standar adalah kontribusi bangsa itu dalam amar makruf nahi munkar kelas dunia. Itulah kebangkitan yang kita dambakan. *WalLahu a'lam.* []

ISLAM: JALAN KEBANGKITAN INDONESIA

Ali Mustofa Akbar

Kebangkitan Indonesia tentu amat diidam-idamkan. Namun, patut disayangkan, setelah lebih dari satu abad Hari Kebangkitan Nasional diperingati bangsa ini, fenomena yang terjadi sangat kontras dengan harapan dan keinginan.

Penjajahan fisik memang telah pergi. Namun, penjajahan non-fisik ternyata masih mencengkeram kuat di seluruh sendi kehidupan; baik di sektor politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Keterpurukan bangsa ini tercermin dari angka kemiskinan yang tinggi, kasus korupsi yang menggurita, penegakkan hukum yang bobrok, dekadensi moral, dan masih banyak lagi.

Padahal beberapa faktor pendukung untuk menjadi negara bangkit dan maju sudah ada pada negeri ini. Di antaranya ialah potensi kekayaan alam yang begitu melimpah-ruah serta sumberdaya manusia yang cukup luar biasa.

Tentu patut dipertanyakan, mengapa Indonesia tidak juga kunjung bangkit?

Narasi sejarah mencatat, bahwa tidak cukup untuk membangkitkan Indonesia ketika negeri ini sudah sebanyak enam kali berganti pucuk pimpinan, bergilir pula wajah-wajah baru di jajaran kabinet maupun wakil rakyat, juga beberapa kali bangsa ini melakukan eksperimen sistem kenegaraan dengan menjajal beberapa bentuk sistem negara; zaman Orde Lama dengan nuansa sosialismenya, zaman Orde Baru dengan corak kapitalisme, dan era reformasi dengan corak liberalnya. Ternyata hasilnya adalah nol.

Faktor Penyebab

Setidaknya ada beberapa penyebab mengapa negeri ini tidak juga kunjung bangkit. *Pertama:* Penguasa yang tidak layak memimpin. Kebangkitan suatu bangsa membutuhkan seorang pemimpin yang kredibel. Kualitas dan integritas pemimpin tersebut harus mumpuni. Hal itu belum ditemukan pada pemimpin Indonesia selama ini.

Presiden pertama RI, misalnya, meski memiliki beberapa disiplin ilmu, dipandang tegas dan berani, penguasa yang satu ini tidak memiliki pemikiran ideologi yang sahih. Salah satu blunder politik yang telah dia lakukan ialah ketika dia memaksakan pemikiran NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) kepada masyarakat dan bersikeras menolak pembubaran PKI sehingga membuat Indonesia merana.

Presiden-presiden Indonesia selanjutnya cenderung tunduk kepada pihak asing. Alhasil, penjajahan di negeri ini pun semakin mencengkeram. Penguasa yang seharusnya menjadi *ra'in* (pengurus rakyat) malah acapkali

membuat kebijakan yang menambah derita rakyat, seperti menyerahkan kekayaan alam kepada pihak asing, menaikkan harga BBM, menjual aset-aset negara, dsb. Rasulullah saw. bersabda, *"Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi."* Seorang Sahabat bertanya, *"Bagaimana amanat disia-siakan?"* Nabi saw. menjawab, *"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."* (HR. al-Bukhari).

Kedua: Mental para pejabat, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, yang buruk. Korupsi, suap-menyuap dan perilaku hedonis sudah menjadi budaya bagi mayoritas pejabat. Riset global barometer 2009 oleh Tranparancy International (TI) menyatakan, korupsi tertinggi adalah di parlemen. Lalu disusul institusi peradilan di peringkat kedua, Parpol bertengger di urutan ketiga, dan keempat adalah pegawai publik.

Ketiga: Sistem negara yang lemah. Sistem negara menjadi faktor paling dominan mengapa Indonesia tidak kunjung bangkit. Sistem sekularisme-demokrasi yang diterapkan di negeri ini menjadi pintu masuk penjajahan. Karena sistem pula, banyak manusia yang sebelumnya baik akhirnya berubah menjadi tidak baik. Sebagai contoh adalah para politisi idealis yang kemudian bermetamorfosis menjadi politisi pragmatis, hedonis dan opurtunis.

Keempat: Belum terbentuknya kesadaran ideologis di tengah-tengah masyarakat. Sejak Orde Lama sampai sekarang, umat terus dicekoki dengan pemikiran sekularisme. Akibatnya, sebagian besar umat tidak memiliki pemikiran dan ideologi yang benar, kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, serta belum mengerti bagaimana mengkontruksi sebuah perubahan yang bersifat komprehensif untuk kebangkitan bangsa. Sebagai contoh adalah masih gandrungnya sebagian masyarakat dengan sistem kufur seperti demokrasi.

Kelima: Ulama yang kurang mengindahkan perannya. Ungkapan dari ulama besar Imam al-Ghazali—meski disampaikan sejak beberapa abad lalu—sudah cukup untuk menggambarkan kiprah para ulama. Berikut petikannya:

Dulu di antara tradisi para ulama adalah mengoreksi dan mengawal penguasa untuk menerapkan hukum Allah. Mereka mengikhlaskan niat dan pernyataan mereka membekas di hati. Sebaliknya sekarang, terdapat penguasa yang tamak, namun ulama hanya diam. Andai mereka berbicara, pernyataannya berbeda dengan perbuatannya sehingga tidak mencapai keberhasilan. Kerusakan masyarakat itu adalah akibat kerusakan penguasa dan kerusakan penguasa itu adalah akibat kerusakan ulama. Kerusakan ulama adalah akibat digenggam cinta harta dan jabatan. Siapa saja yang digenggam oleh cinta dunia, niscaya dia tidak mampu menguasai 'kerikilnya', bagaimana lagi dapat mengingatkan penguasa dan para pembesar (Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, VII/92).

Islam: Jalan Kebangkitan

Menurut Syaikh Hafidz Shalih, maksud dari kebangkitan ialah perpindahan umat, bangsa atau individu dari suatu keadaan menuju ke keadaan yang lebih baik (Hafidz Shalih, *Falsafah Kebangkitan: Dari Ide Hingga Metode*. (terj. An-Nahdhah).

Kebangkitan suatu bangsa akan dapat diperoleh saat taraf berpikir masyarakatnya meningkat, yakni dengan memeluk suatu pemikiran yang mendasar dan menyeluruh, atau memeluk sebuah ideologi.

Kaum sekular Barat mampu bangkit dengan ideologi Kapitalisme. Bangsa Uni Soviet, mereka mampu bangkit dengan memeluk ideologi Sosialisme. Namun perlu digarisbawahi, kebangkitan dengan kedua ideologi tersebut adalah kebangkitan semu belaka. Fakta empirik menunjukkan ideologi-ideologi batil ini justru menimbulkan efek kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia. Akibatnya, Sosialisme kemudian hancur setelah berkuasa selama 74 tahun. Ideologi Kapitalisme juga mulai tampak borok-boroknya.

Hal tersebut sangat wajar mengingat paradigma kedua ideologi tersebut tidak sesuai

dengan fitrah manusia dan tidak memuaskan akal. Akidah dari Sosialisme-komunis adalah materialisme yang menafikan adanya sang Pencipta. Padahal secara fitrah manusia memiliki kecenderungan untuk mensucikan atau menyembah sang Pencipta. Ideologi Sosialisme-komunis juga bertentangan dengan akal. Pasalnya, mustahil manusia, alam semesta, dan kehidupan ini tidak ada yang menciptakannya.

Adapun akidah dari ideologi Kapitalisme adalah sekularisme. Meski mengakui adanya Tuhan, ideologi ini menolak campur-tangan Tuhan dalam mengatur kehidupan. Ini juga tidak sesuai fitrah manusia yang serba lemah dan terbatas, yang sangat membutuhkan aturan dari Tuhan, sang Pencipta.

Karena itu, kebangkitan hakiki adalah yang pernah dialami bangsa Arab saat mereka mengambil Islam sebagai ideologinya. Kebangkitan ini pelopori oleh Rasulullah saw. Bangsa yang dulunya Jahiliah berubah menjadi bangsa berperadaban tinggi dan mulia, bahkan kemudian berhasil menerangi dua pertiga dunia.

Ideologi Islam berpijak pada akidah Islam, satu-satunya akidah yang benar, bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah. Inilah akidah yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Kebangkitan yang benar tentunya harus bersumber dari ideologi (*mabda'*) yang benar. *Mabda'* yang benar haruslah berpijak di atas akidah yang benar.

Akidah Islam memiliki karakteristik sebagai akidah *ruhiyah* sekaligus akidah *ri'ayah* yang haq. Akidah ini memancarkan sebuah sistem (aturan) kehidupan yang menyeluruh, mengatur urusan pribadi, keluarga maupun negara. Sebagai contoh: Islam memerintahkan untuk melakukan shalat dan puasa. Lalu untuk melangsungkan generasi penerus, Islam memerintahkan supaya menikah dengan lawan jenis. Dalam rangka untuk menjamin sebuah pernikahan itu, Islam juga memerintahkan sejumlah sanksi berupa hukum cambuk dan rajam bagi pelaku zina. Contoh lain, Islam memerintahkan untuk memperoleh harta secara halal. Lalu untuk menjamin kepemilikan harta tersebut, Islam memerintahkan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Keunggulan Ideologi Islam

1. Secara normatif.

Tidak ada ideologi yang lebih baik dari ideologi Islam sebab ideologi ini bersumberkan wahyu Ilahi. Ia datang dari Zat Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, Penggenggam jagatraya beserta isinya. Tentu ideologi ini tak perlu diragukan lagi.

Ideologi Islam merupakan jalan terang yang diberikan oleh Allah SWT, yang mendapat garansi langsung dari sang Pencipta. Ini berbeda dengan ideologi atau hukum buatan manusia yang hanya berlandaskan hawa nafsu sehingga tak lepas dari kepentingan sekelompok manusia pembuat hukum itu sendiri.

أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

2. Secara faktual.

Di dunia saat ini tidak ada satu pun negara yang menerapkan syariah Islam secara *kaffah*. Namun, bukan berarti hal itu membuat pesona syariah Islam menjadi pudar. Beberapa fakta empirik menunjukkan bagaimana kehebatan syariah Islam ketika diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meski penerapannya baru sebagian kecil saja.

Saat Perda bernuansa syariah Islam di Bulukumba, Sulsel, pada 2001, misalnya, tingkat kriminalitas turun 85 persen. Di Arab Saudi, negara yang menerapkan *hudud* dan *qishash* terbukti juga mampu menekan angka kriminalitas dengan angka yang begitu minim.

3. *Secara historis.*

Ideologi Islam telah menorehkan tinta emas sejarah peradaban umat manusia ketika diterapkan selama berabad-abad lamanya. Banyak bukti historis menunjukkan kemajuan peradaban Islam mulai dari bidang politik, ekonomi hingga sains dan teknologi. Meski kaum orientalis berusaha menyembunyikannya, kegemilangan peradaban Islam tak mampu ditutupi.

Islam telah mampu mensejahterakan, memberi rasa nyaman dan memberi kebahagiaan bagi umat manusia. Sejahrawan Barat seperti Will Durrant sekalipun tak sanggup menahan tutur-katanya untuk memberikan pujian kekaguman pada peradaban Islam, seperti dia ungkapkan dalam *The Story of Civilization.*

Bahkan peradaban Islamlah yang memberi sumbangsih besar atas kemajuan barat saat ini. Robert Briffault , dalam *The Making of Humanity*, menyatakan, "Seluruh segi kemajuan peradaban di Eropa secara pasti dapat ditelusuri akarnya dari peradaban Islam. Peradaban Islamlah yang telah menghidupkan energi yang menggerakkan peradaban modern."

Pentingnya Negara Khilafah

Karena itu, jika ingin bangkit, negeri ini tidak cukup hanya dengan berganti pemimpin atau pejabatnya, namun diperlukan pula sebuah sistem negara dengan kualitas nomor wahid. Umat pun perlu diarahkan supaya memiliki kesadaran ideologis.

Sistem itu tiada lain adalah sistem Islam, yang mewujud dalam penerapan syariah Islam secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan melalui penegakkan Khilafah Islamiyah. Hanya dengan Khilafahlah, syariah Islam dapat diterapkan secara sempurna.

Sedikitnya ada dua alasan mengapa harus syariah dan khilafah. *Pertama*: tuntutan akidah kita sebagai seorang Muslim. Allah SWT mencela siapa saja yang menerapkan sistem/aturan/hukum (ideologi) selain hukum Allah SWT (Lihat: QS al-Maidah [5]: 44, 45, 47).

Karena itu, jika ingin bangkit, negeri ini tidak cukup hanya dengan berganti pemimpin atau pejabatnya, namun diperlukan pula sebuah sistem negara dengan kualitas nomor wahid. Umat pun perlu diarahkan supaya memiliki kesadaran ideologis.

Kedua: Syariah Islam membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Hanya melalui penegakkan syariah dan Khilafah itulah segala bentuk penjajahan dapat dihapuskan dan negara menjadi mandiri sehingga apa yang dicita-citakan berupa kebangkitan bangsa dapat terwujud. Sungguh, Indonesia dan dunia membutuhkan syariah dan Khilafah untuk kehidupan yang lebih baik. *WalLahu a'lam.* []

Ali Mustofa Akbar adalah Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst) Desk Sosial-Politik dan Staf Humas HTI Soloraya.

Daftar Pustaka

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ath-Thusi al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, juz 7.
Risky Ridyasmara, "20 Mei Bukan Hari Kebangkitan Nasional," *Eramuslim.com*.
Quthb, Muhammad. 1995. *Perlukan Menulis Ulang Sejarah Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A. *Dari Soekarno Sampai SBY*. Gramedia Pustaka Utama. 2009.
Robert Briffault. (1919). *Making of Humanity*. Kissinger Publissing. 2009.
Bunga Rampai Syariat Islam, Hizbut Tahrir Ind. 2002.
Majalah *Al-Wa'ie*, edisi 113, 2010
Hafidz Shalih. 2003. *Falsafah Kebangkitan: Dari Ide Hingga Metode*. (terj. An-Nahdhah). Bogor: Idea Pustaka Utama.
Republika Online, Senin, 26 September 2011.

HM Ism usanto:

PENTING MEMBACA ULANG SEJARAH

Peran umat Islam baik sebelum maupun setelah kemerdekaan negeri ini sesungguhnya amatlah besar, bahkan dominan. Sayangnya, ada upaya-upaya sistematis dari para pendengki Islam untuk mengecilkan, bahkan menghapus sama sekali peran besar umat Islam ini. Akibatnya, generasi bangsa ini hari ini benar-benar tercerabut dari akar sejarah yang sebenarnya. Justru, sejarah yang penuh manipulasi dan pengkerdilan peran umat Islamlah yang kini memenuhi buku-buku sejarah.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Bagaimana pula seharusnya umat Islam di negeri ini menyikapi sejarah? Itulah di antara persoalan yang dijawab secara lugas oleh **Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, HM Ismail Yusanto** dalam wawancara dengan Redaksi kali ini. Berikut petikannya.

Menurut Ustadz, sejauh mana peran nyata umat Islam dalam sejarah negeri ini?

Sesungguhnya umat Islam memiliki peran sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dalam menumbuhkan kebangkitan. Peperangan yang terjadi pada abad ke-19 melawan penjajah Belanda selalu bernafaskan jihad. Ketika Pangeran Diponegoro memanggil sukarelawan, kebanyakan dari mereka yang tergugah adalah para ulama dan ustadz dari berbagai pelosok desa. Pemberontakan petani menentang penindasan yang berlangsung terus-menerus sepanjang masa penjajahan selalu di bawah bendera Islam. Demikian pula perlawanan yang dilakukan oleh Tengku Cik Di Tiro, Teuku Umar dan diteruskan oleh Cut Nyak Dien dari

tahun 1873-1906 adalah jihad melawan "kape-kape" Belanda.

Dalam proses kemerdekaan pun, peran umat sangatlah sentral. Di sana ada tokoh-tokoh umat seperti KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, KH Kahar Muzakkir dan lainnya yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Mereka bukan sekadar menginginkan Indonesia merdeka, tetapi juga gigih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Setelah kemerdekaan, peran umat Islam juga tetap sentral. Resolusi Jihad yang didengungkan oleh KH Hasyim Asy'ari menggetarkan pasukan NICA-Belanda yang ingin masuk lagi ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Resolusi ini juga menjadi tonggak penting bagi pembentukan TNI melalui Hizbullah yang asalnya terdiri dari para santri dan ulama.

Namun, dalam sejarah peran umat Islam tampaknya tidak terlalu menonjol, dan bila ada pun seolah dalam kerangka patriotisme dan nasionalisme?

Memang, dalam sejarah yang ditulis secara tidak obyektif, peran umat Islam yang sesungguhnya sangat sentral itu dihapus atau dikecilkan; kalaupun tetap tercatat, itu terbaca dalam bingkai yang berbeda, yakni dalam kerangka nasionalisme sempit, bukan lagi dalam bingkai Islam. Salah satu contoh sangat nyata dari penghapusan peran Islam adalah apa yang dialami oleh Sarikat Islam (SI). Sejarah kita mencatat, gagasan kebangkitan itu datang dari Boedi Oetomo (BO). Karena itu, setiap tanggal 20 Mei, hari lahir BO, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Padahal kenyataan sebenarnya tidaklah seperti itu. BO tidak bisa disebut sebagai organisasi yang menggagas, apalagi menggerakkan kebangkitan.

Menurut Savitri Scherer dalam thesisnya di Universitas Cornell, Amerika Serikat pada tahun 1975, Boedi Oetomo hanyalah sebuah gerakan sosial bagi kepentingan kelompok priyayi non birokrat yang bersifat lokal dan rasis *(Savitri Prasisiti Scherer, "Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiranPriyayi Nasionalis Jawa Abad XX", Terjemahan Jiman S. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan, 1985)*. Pasal 2 Anggaran Dasar Boedi Oetomo menyebut: *Tujuan organisasi untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis.*

Karena itu, banyak pengamat sejarah yang menolak penyematan Boedi Oetomo sebagai pelopor kebangkitan nasional. Pelaku dan penulis sejarah, KH Firdaus AN, misalnya, dengan tegas mengungkap, *"Tidak pernah sekalipun rapat Boedi Oetomo membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka. Mereka ini hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Ratu Belanda, memperbaiki nasib golongannya sendiri."*

Menurut KH Firdaus AN, Boedi Oetomo tidak memiliki andil sedikit pun dalam perjuangan kemerdekaan, karena mereka terdiri dari para pegawai negeri yang digaji Belanda untuk mempertahankan penjajahan atas Indonesia. Boedi Oetomo tidak pula turut serta mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan, karena telah lebih dulu bubar pada tahun 1935.

Lalu siapa yang layak disebut sebagai sebagai penggerak kebangkitan dan kesadaran perlawanan terhadap penjajah Belanda? Itulah Sarikat Islam (SI). Lihatlah, keanggotan SI berbeda dengan BO yang hanya untuk suku tertentu. SI terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Haji Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur, Agus Salim dan Abdoel Moeis dari Sumatera Barat dan AM. Sangaji dari Maluku. Penyebaran SI juga menasional. Tahun 1916 tercatat ada 181 cabang SI di seluruh Indonesia dengan sekitar 700.000 anggota. Tahun 1919 anggota SI melonjak drastis hingga 2 juta orang. Ini adalah angka yang fantastis kala itu. Adapun Boedi Oetomo pada masa jayanya saja hanya beranggotakan tak lebih dari 10.000 orang.

Jadi, SI-lah pelopor yang sebenarnya dari

kebangkitan yang bersifat nasional. Lalu mengapa sejarah menempatkan Boedi Oetomo sebagai pelopor? Dari sini terlihat kecenderungan adanya usaha peminggiran Islam atau bahkan menghilangkan spirit Islam dari perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Demikian "kejam" sejarah meminggirkan peran umat Islam. Bahkan *Resolusi Jihad* KH Hasyim Asy'ari yang sangat fenomenal itu tidak tertulis sama sekali dalam sejarah nasional. Ini sangat aneh, karena sesungguhnya tidak pernah ada perlawanan Bung Tomo di Surabaya, yang kemudian dicatat sebagai Hari Pahlawan, tanpa *Resolusi Jihad*. Resolusi inilah yang mendorong Bung Tomo dan para pemuda Surabaya ketika itu berani bergerak melawan Belanda.

Mengapa terjadi penyimpangan atau pembelokan seperti itu?

Sejarah memang adalah realitas tangan kedua (*second-hand reality*). Yang kita baca sekarang dalam buku-buku sejarah bukanlah fakta sejarah, tetapi perumusan terhadap fakta sejarah pada masa lalu. Sebagai realitas tangan kedua, sejarah sangat bergantung pada siapa yang merumuskan atau menuliskan dan atas dasar kepentingan apa sejarah itu ditulis. Karena itu, sejarah sesungguhnya sangat bergantung pada lingkup politik yang dominan saat sejarah itu ditulis. Tentu bukan sebuah kebetulan belaka ketika sejarah Kebangkitan Nasional didasarkan pada kelahiran Boedi Oetomo, bukan Sarikat Islam, yang sejatinya tidaklah tepat untuk dijadikan tonggak sejarah penting itu. Ini sebagaimana Hari Pendidikan Nasional yang bukan didasarkan pada kelahiran Muhammadiyah dengan sekolah pertama yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, berbelas tahun sebelum Ki Hadjar mendirikan Taman Siswa. Sebab, bila itu dilakukan maka yang akan tersembul adalah spirit atau semangat Islam. Dalam *setting* politik penguasa, itu tidak dikehendaki.

Oleh karena itu, kinilah saatnya membaca ulang sejarah kebangkitan nasional, sejarah pendidikan nasional dan sejarah nasional lainnya secara kritis dan obyektif. Sejarah sebagaimana kisah dalam al-Quran, mengandung *ibrah* atau pelajaran. Penyimpangan atau penutupan sejarah dari fakta yang sebenarnya tentu akan menutupi *ibrah* yang mestinya didapat, yakni spirit Islam dalam perjuangan negeri ini.

Jadi bagaimana gambaran peran serta dan perjuangan umat Islam yang sebenarnya dalam sejarah negeri ini?

Tokoh-tokoh umat pada masa lalu, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan Indonesia, sangat memahami bahwa setiap Muslim mempunyai kewajiban dalam amar makruf nahi mungkar, perjuangan mengusir penjajah dan menegakkan *'izzul Islam wal Muslimin*. Oleh karena itu, setiap langkah, gerak dan kegiatan yang mereka lakukan, sebagaimana dibuktikan dalam sejarah, selalu dijiwai, diwarnai dan didasari oleh semangat Islam. Andaipun ada semangat yang disebut nasionalisme maka nasionalisme di sini maknanya tidak lain adalah kecintaan pada negeri dan kesadaran untuk tidak membiarkan negeri Muslim dikuasai oleh kaum penjajah.

Itulah yang terjadi pada Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien ketika melawan Belanda, KH Hasyim Asy'ari dengan *Resolusi Jihad*-nya, KH Wahid Hasyim dengan perjuangan untuk Islam sebagai dasar negara, KH Ahmad Dahlan untuk perjuangan pentingnya pendidikan Islami, atau para pahlawan terdahulu lainnya yang semua berjuang dengan spirit Islam.

Apakah itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap spirit perjuangan umat Islam?

Ya jelas, itu sebuah pengkhianatan; setidaknya sebuah penyimpangan atau penipuan sejarah.

Menurut Ustadz, perjuangan kebangkitan negeri ini bisa dianggap berhasil atau gagal?

Bergantung pada apa tolok ukurnya. Bila menggunakan tolok ukur Islam, apapun perkembangan sebuah negara—sama halnya

dengan apapun yang disebut keberhasilan pada hidup seseorang, baik dari sisi pendidikan, kedudukan sosial, maupun pencapaian materi—bila itu semua tidak berdasar pada Islam atau makin menjauh dari Islam, harus kita katakan gagal.

Deskripsi kebangkitan Indonesia yang hakiki itu seharusnya seperti apa?

Kebangkitan hakiki adalah kembalinya kesadaran akan hakikat hidup manusia di dunia sebagai *'abdulLah* dan *khalifatulLah* dengan misi menyembah sang Khalik dan memakmurkan bumi dengan menjalankan syariah-Nya secara *kaffah*. Itulah kebangkitan hakiki dengan spirit Islam. Spirit itu pula yang semestinya sekarang kita ikhtiarkan untuk muncul kembali karena Islamlah sumber kekuatan perjuangan yang tak akan pernah padam guna membawa negeri ini ke arah yang lebih baik di masa datang.

Bagaimana mewujudkan kebangkitan Indonesia yang hakiki itu?

Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani dalam kitab *Nizahm al-Islam* menyatakan bahwa kebangkitan yang hakiki harus dimulai dengan perubahan pemikiran *(taghyir al-afkar)* secara mendasar (*asasiy[an]*) dan menyeluruh (*syamil[an]*) menyangkut pemikiran tentang kehidupan, alam semesta dan manusia, serta hubungan antara kehidupan dunia dengan sebelum dan sesudahnya. Pemikiran yang membentuk pemahaman *(mafahim)* akan mempengaruhi tingkah laku; akan terwujud tingkah laku islami bila pada diri seorang Muslim tertanam pemahaman Islam. Dengan demikian kebangkitan umat Islam adalah kembalinya pemahaman seluruh ajaran Islam ke dalam diri umat dan terselenggaranya pengaturan kehidupan masyarakat dengan cara Islam.

Untuk itu diperlukan dakwah. Dakwah di tengah kemunduran umat seperti sekarang ini—akibat tidak adanya kehidupan Islam—menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab *Al-Manhaj* haruslah berupa "dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam" (*da'wah li isti'nafi al-hayah al-islamiyyah*). Itulah dakwah untuk *'awdah al-Muslimin ila al-'amal bi jami'i ahkami al-Islam min aqa'id[in], ibadat[in]...bi thariqi iqamah al-khilafah* (mengembalikan umat Islam pada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam baik menyangkut akidah, ibadah, makanan minuman, pakaian, akhlak, *'uqubat* maupun muamalah (sosial, budaya, pendikan, politik dan ekonomi) dengan jalan menegakkan kembali Khilafah Islam.

Dakwah semacam ini harus dilakukan secara berjamaah (*jama'iyy[an]*) atau berkelompok. Jamaah atau kelompok yang dimaksud haruslah bersifat politis (*siyasiy[an]*) oleh karena tujuan dakwah, yakni tegaknya kembali kehidupan Islam, adalah tujuan politik.

Dari segi individu, dakwah bertujuan membentuk Muslim yang berkepribadian Islam (*syakhsiyyah islamiyyah*). Secara komunal, dakwah bertujuan untuk melakukan perubahan ke arah Islam hingga terbentuk masyarakat Islam dengan adanya penerapan syariah Islam di bawah naungan Daulah Khilafah. Harus tumbuh kesadaran umum (*al-wa'yu al-Islamy*) di tengah masyarakat bahwa hanya di bawah naungan Khilafah sajalah seluruh hukum Islam dapat ditegakkan secara *kaffah* dan segenap umat dapat disatukan. Hanya dengan syariah saja problematika umat dapat diselesaikan dengan cara yang benar. Saat itu kerahmatan yang dijanjikan Allah SWT akan terujud bukan hanya kepada orang Islam, tetapi juga buat umat selain Islam karena Islam memang memberikan rahmat bagi sekalian alam.

Mengapa untuk itu harus dengan syariah dan Khilafah?

Karena tanpa Daulah Khilafah tidak akan mungkin ada persatuan umat yang hakiki dan penerapan syariah yang diingini. Lalu tanpa syariah bagaimana mungkin problematika umat akan dapat teratasi dan umat Islam bisa bangkit mencapai kemuliaannya kembali?[]



KEGIGIHAN PARA PEJUANG SYARIAH DAN KHILAFAH DI BUMI NUSANTARA

Sudah menjadi rahasia umum di antara orang/pejabat Belanda bahwa banyak sultan di Indonesia memberikan baiat (sumpah kesetiaan dan kepatuhan)-nya kepada Khalifah di Istanbul. Dengan itu secara efektif membuat kaum Muslim menjadi warga negara Khilafah (Negara Islam).

Kaum Muslim di Aceh adalah yang paling menyadari akan status mereka. Koran *Sumatera Post* menulis tentang ini pada tahun 1922, "Sesungguhnya kaum Muslim Aceh mengakui Khalifah di Istanbul."

Bukan hanya itu, mereka juga mengakui fakta bahwa tanah mereka adalah bagian dari Negara Islam. Ini adalah salah satu alasan atas perlawanan sengit mereka melawan Belanda. Sebagaimana yang diakui Koran *Sumatra Post* tahun 1922: "*Pada hari ini, serangan-serangan atas kami menjadi hal penting karena merupakan sikap mentalitas atas ide Perang Suci (jihad fi sabilillah, pen.)*".

Khalifah juga mengirimkan perwakilannya ke Indonesia untuk mendukung kaum Muslim. Koran *Het Nieuws van den Dag*, misalnya, melaporkan tentang seorang konsul dari Khalifah di Batavia bahwa dia mendukung gerakan mengembalikan Islam (Khilafah, pen.): "Di Indonesia hanya ada satu konsul, yakni di Batavia, dan dia telah menunjukkan antusiasme yang besar bagi gerakan mengembalikan Islam. Oleh karena itu, pemerintah memintanya untuk diganti."

Koran yang sama menginformasikan kepada pembacanya pada tahun 1912 bahwa Khalifah mengirimkan misi rahasia ke Indonesia untuk mendukung kaum Muslim Indonesia, "Konsul Belanda di Konstantinopel telah memperingatkan pemerintah bahwa utusan rahasia Muhammedan telah dikirim dari Turki ke Indonesia yang dikuasai Belanda, dengan tugas memotivasi orang-orang Islam (untuk memberontak kepada penjajah)."

Begitulah suasana dan semangat perjuangan para tokoh Islam pada masa pendudukan penjajah Belanda untuk mengembalikan syariah Islam dalam ranah politik. Apa yang ditulis oleh koran-koran pada waktu itu, baik koran lokal Indonesia maupun koran yang terbit di Belanda, ternyata secara gamblang menunjukkan bahwa pada masa pendudukan penjajah Belanda telah terjalin hubungan yang baik bangsa Nusantara dengan Khilafah Turki Utsmani. Bukan hanya hubungan

'pertemanan' namun lebih dari itu yakni hubungan 'kenegaraan'. Oleh karena itu, perjuangan formalisasi syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan bukanlah perjuangan individual para tokoh-tokoh, namun merupakan perjuangan yang di- *back up* langsung oleh institusi Khilafah di Turki saat itu.

Pasca Khilafah Ustmani hancur pada tahun 1924, perjuangan untuk mengembalikan Khilafah berlangsung di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dr. Deliar Noer menulis bahwa penghapusan Kekhalifahan di Turki menimbulkan kebingungan di Dunia Islam pada umumnya, yang mulai berpikir tentang pembentukan suatu kekhilafahan baru. Masyarakat Islam Indonesia bukan saja berminat dalam masalah ini, malah merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya. Kebetulan Mesir bermaksud mengadakan kongres tentang Khilafah pada bulan Maret 1924. Sebagai sambutan atas maksud ini, dibuatlah Komite Khilafah yang didirikan di Surabaya tanggal 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirdjo (kemudian dikenal dengan nama Wondoamiseno) dari Sarekat Islam dan wakil ketua KHA Wahab Hasbullah. Guliran usul ini selanjutnya diperkuat dalam Kongres Al-Islam ketiga di Surabaya bulan Desember 1924, yang antara lain memutuskan untuk mengirim sebuah delegasi ke Kongres Kairo, terdiri dari Surjopranoto (Sarekat Islam), Haji Fachruddin (Muhammadiyah) serta KHA Wahab dari kalangan tradisi.[1]

Pada kongres Al-Islam di Bandung yang sejatinya hanya memperkuat keputusan rapat di Cianjur, KH Abdul Wahab Hasbullah, atas nama kalangan tradisi, mengajukan usul agar kebiasaan-kebiasaan agama seperti membangun kuburan, membaca doa seperti *dalail al-khairat*, ajaran mazhab, dihormati oleh kepala negeri Arab yang baru dalam negaranya, termasuk di Makkah dan Madinah. Karena terdapat 'friksi' dalam masalah inilah maka kalangan 'pembaru' yang lebih dominan dalam Kongres Al-Islam di Bandung ini tidak menyambut baik usul-usul KH Abdul Wahab Hasbullah ini. Akhirnya, beliau dan tiga orang pendukungnya keluar dari Komite Khilafah tersebut di atas.

KH Wahab selanjutnya mengambil inisiatif mengundang dan mengajak para ulama-ulama yang beliau kenal seperti dari Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem, Pati dan masih banyak lagi untuk diajak rapat-rapat membahas masalah hancurnya Khilafah. Dalam rapat-rapat tersebut dihasilkan keputusan bahwa mereka bersepakat untuk mendirikan suatu panitia yang disebut Komite Merembuk Hijaz. Komite inilah yang diubah menjadi Nahdlatul Ulama pada suatu rapat di Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Dalam Rapat itu pula diputuskan untuk tetap konsisten menempatkan masalah Hijaz [penegakan kembali Khilafah] sebagai pokok pembicaran utama.[2]

Perjuangan mengembalikan syariah dan Khilafah ternyata bukan hanya dilakukan oleh KH Wahab semata, tetapi hampir seluruh tokoh Islam. Spirit perjuangan sebagian besar dari mereka adalah memperjuangkan formalisasi syariah Islam walau ada yang tidak secara 'tegas' menyatakan Khilafah. Sebut saja Hadji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto. Beliau secara gigih memperjuangkan agar syariah Islam dijadikan sebagai sumber hukum dalam bernegara. Tatkala HOS Cokroaminoto melihat rakyat yang tertindas oleh penjajah kolonial Belanda secara ekonomi dan politik, beliau pun 'mengejawantahkan' kegundahan hatinya melalui statemen, "Negara dan bangsa kita tidak akan mencapai kehidupan yang adil dan makmur, pergaulan hidup yang aman dan tenteram selama ajaran-ajaran Islam belum dapat berlaku atau dilakukan menjadi hukum dalam negara kita, sekalipun sudah merdeka."[3]

Beliau juga mengatakan bahwa saat itu

telah terjadi jahiliah modern. "Kalau alat-alat Pemerintah RI yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan, baik pihak pejabat sampai bawahan, sudah tidak takut lagi kepada hukuman Allah, yakinlah negara akan rusak dan hancur dengan sendirinya. Sebab segala perbuatan jahat, korupsi, penipuan, suap dan sebagainya yang secara terang-terangan merugikan negara dilakukan dengan aman oleh mereka, rakyat yang menjadi korban."[4]

Apa yang disampaikan oleh Cokroaminoto tampak jelas bahwa syariah Islam dijadikan sebagai landasan pikiran, perasaan dan hatinya.

Oemar Said juga menyatakan, "Tidak bisa manusia menjadi utama yang sesungguhnya, tidak bisa manusia menjadi besar dan mulia dalam arti kata yang sebenarnya, tidak bisa ia menjadi berani dengan keberanian yang suci dan utama, kalau ada banyak barang yang ditakuti dan disembahnya. Keutamaan, kebesaran, kemuliaan dan keberanian yang sedemikian itu hanyalah bisa tercipta karena 'tauhid' saja. Tegasnya menetapkan lahir batin: tidak ada sesembahan melainkan Allah saja."[5]

Muhammad Natsir pun melakukan hal serupa. Berbicara tentang Muhammad Natsir sejatinya tidak bisa dilepaskan dengan perjuangan syariah Islam di Indonesia. Natsir menganggap bahwa agama dan negara harus dipersatukan dalam semangat untuk menegakkan hukum Allah.[6] Artinya, tidak ada pemisahan antara Islam dan negara. Bahkan Natsir menegaskan bahwa Islam tidak terbatas pada aktivitas ritual Muslim yang sempit, tetapi pedoman hidup bagi individu, masyarakat dan negara.[7]

Muhammad Natsir memahami bahwa tugas seorang pemimpin adalah memastikan bahwa hukum-hukum Allah dapat dijalankan dengan baik. Syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin Negara Islam adalah agamanya, sifat dan tabiatnya serta akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan

"Negara dan bangsa kita tidak akan mencapai kehidupan yang adil dan makmur, pergaulan hidup yang aman dan tenteram selama ajaran-ajaran Islam belum dapat berlaku atau dilakukan menjadi hukum dalam negara kita, sekalipun sudah merdeka."

yang diberikan kepadanya; bukan bangsa, keturunannya ataupun semata-mata karena kapasitas intelektualnya. Islam tidak mengenal lembaga 'Kepala Agama' seperti Paus dalam tradisi Katolik. Islam hanya mengenal satu 'Kepala Agama', yakni Muhammad Rasulullah saw. Rasulullah Muhammad sudah wafat dan tidak ada gantinya lagi untuk selama-lamanya. Rasulullah saw. sebagai kepala agama telah meninggalkan satu sistem yang bernama Islam, yang harus dijaga dan dipelihara oleh kaum Muslim. Sistem ini juga harus dijalankan oleh 'kepala-kepala pemerintahan' apapun gelarnya, seperti khalifah, amir dan lain sebagainya yang memegang kekuasaan dalam kenegaraan kaum Muslim. Dia mengambil contoh bahwa para Sahabat Nabi saw. yang pernah menjadi khalifah sesudah beliau seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali tidaklah merangkap jadi 'Kepala Agama'. Mereka itu hanyalah 'kepala pemerintahan' yang menjadikan pemerintahannya menurut aturan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad. Negara, oleh karena itu, bukan merupakan tujuan Islam, tetapi sebagai sarana

untuk menegakkan Islam dan merealisasikan aturan-aturan Ilahi yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.[8]

Aturan-aturan tersebut lengkap mulai dari sistem pemerintahan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pergaulan dan sistem-sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan lainnya. Karena itu, negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan kesempurnaan berlakunya hukum ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri ataupun sebagai anggota masyarakat dalam sebuah negara.

Pergulatan untuk menjadikan syariah Islam sebagai dasar negara tidaklah mudah. Kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan tegaknya syariah Islam berusaha menghadang setiap langkah Natsir di Parlemen. Hal ini bisa tercermin dalam perdebatan di Konstituante pada masa itu. Dalam sidang Konstituante tatkala membahas tentang dasar negara, Natsir secara tegas menjelaskan perbedaan pokok sekularisme dengan Islam. Menurut Natsir, sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap yang hanya di dalam batas keduniaan. "Seorang sekuleris tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun oleh bekas-bekas kehewanan manusia, semata-mata dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam kehidupan sekarang belaka," ujar M. Natsir.[9]

Bahkan, seperti dikutip dalam buku R.M.A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidik Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, Ki Bagus Hadikusumo lebih tegas lagi meminta kata-kata "bagi pemeluk-pemeluknya" ditiadakan sehingga berbunyi: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam."

Demikian juga yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadikusumo, salah satu tokoh Muhammadiyah. Beliau cukup lantang meneriakkan syariah Islam. Beliau memberikan antitesis atas 'Lima Prinsip Dasar' yang kemudian dikenal dengan Pancasila yang diajukan oleh Sukarno-Yamin dengan mengajukan pendapat 'Islam Sebagai Dasar Negara'[10] dalam sidang-sidang di BPUPKI. Bahkan, seperti dikutip dalam buku R.M.A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidik Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, Ki Bagus Hadikusumo lebih tegas lagi meminta kata-kata "bagi pemeluk-pemeluknya" ditiadakan sehingga berbunyi: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam."

Artinya, dalam pandangan Ki Bagus, syariah Islam harus berlaku secara umum di Indonesia.

Tatkala perdebatan mengenai kepala negara, salah satu peserta sidang, Kiai Masykur mempertanyakan dengan nada retorika: "*...Kalau dalam Republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, padahal Republik Indonesia dikepalai oleh orang beragama lain daripada Islam, umpamanya, apakah keadaan itu dapat dijalankan dengan baik? Dan apakah umumnya golongan Islam dapat menerimanya dan apakah demikian itu tidak jahat?*"

Statemen ini membuat sidang BPUPKI menjadi tegang. Ketegangan semakin memuncak tatkala Tuan Abdul Kahar Moezakir mengajukan pendapatnya untuk mempertegas

pendapat Kiai Masykur. Ia bahkan sampai menggebrak meja.

Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Tuan Abdul Kahar Moezakir ini didukung penuh oleh Ki Bagus Hadikusumo. Beliau menegaskan: "*Saya berlindung kepada Allah terhadap setan yang merusak. Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerap kali diterangkan di sini bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam. Jadi saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar Moezakir tadi: kalau ideologi Islam tidak diterima, (saya) tidak terima! Jadi nyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral.*"[11]

Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan hal serupa. Beliau menyerukan kepada masyarakat dan para pemimpin bangsa untuk kembali pada syariah Islam. Menurut murid beliau, HR Hadjid, tentang KH Ahmad Dahlan bahwa dalam menggerakkan masyarakat untuk beramal dan berorganisasi KH Ahmad Dahlan berpegang pada prinsip yaitu senantiasa mempertanggungjawabkan tindakan kepada Allah.[12] Ini berarti bahwa setiap tindakan manusia hendaknya senantiasa merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam bentuk syariah-Nya. Seruan terikat pada syariah Allah ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat awam, namun juga diserukan kepada para pengambil keputusan (penguasa). KH Ahmad Dahlan menyerukan perlunya setiap pemimpin menambah terus ilmu (Islam, *red.*) sehingga bijaksana dalam mengambil keputusan dan perlunya dilakukan perubahan untuk menuju keadaan lebih baik.[13]

Selain itu, cita-cita KH Ahmad Dahlan sebenarnya adalah ingin menumbuhkan masyarakat Islam. Maksud masyarakat Islam ini adalah masyarakat yang berkarakter Islam dengan pola sunah Muhammad saw. Mendidik masyarakat supaya terjadi perubahan perilaku menjadi berkarakter Islam dengan kesadaran dan ilmu, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Sebagaimana yang dijalankan Muhammad saw (Sunnah).[14]

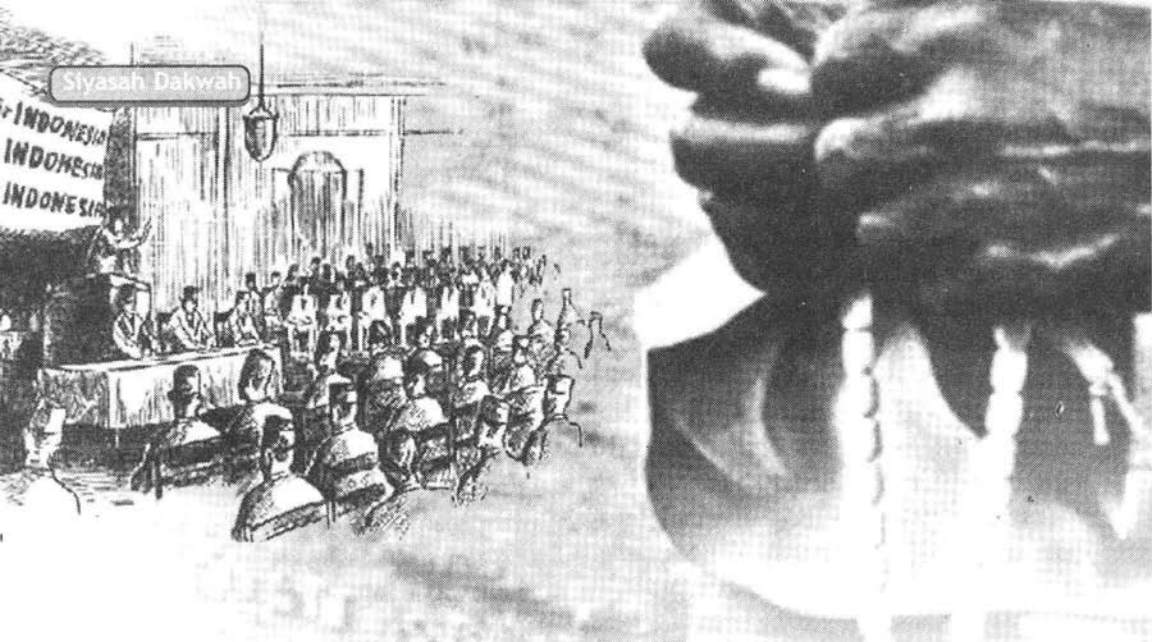
Walhasil, dari paparan di atas nampak jelas bahwa sejak awal Bumi Nusantara punya hubungan erat dengan Khilafah. Tatkala Khilafh Utsmaniyah tumbang, para pemuka Islam di Nusantara berlomba-lomba untuk berkontribusi dalam mengembalikan tegaknya Khilafah, termasuk di dalamnya perjuangan untuk menjadikan syariah Islam menjadi dasar dan sumber hukum di negeri ini pada saat awal-awal pebentukan negara Indonesia.

Karena itu, jika ada yang mengatakan bahwa perjuangan mengembalikan syariah Islam disebut ahistoris maka sejatinya dialah yang ahistoris. Fakta memperlihatkan sebaliknya. Bahkan perjuangan mereka justru dengan kesungguhan dan penuh dengan pengorbanan. Semoga kita bisa menjadi penerus perjuangan mereka dengan penuh ikhlas. *Insya Allah.*

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. [Gus Uwik]

Catatan kaki:

1. Deliar Noer. *Bendera Islam. Jakarta*, 22 Januari 1925
2. Deliar Noer. *ibid*, hlm. 243. mengutip *Utusan Nahdlatul Ulama*, Tahun I No. I (1 Rajab 1347H; yaitu 14 Desember 1928). hal 9.
3. Amelz, 1952. h. 2 dalam *Api Sejarah*. Ahmad Mansur Suryanegara, Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
4. Petikan kata Wondoamiseno. Sekjen PSSI 1950
5. Amelz. 1952. h. 2 dalam *Api Sejarah*. Ahmad Mansur Suryanegara, Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
6. *http://www.rahmatan.org/artikel/mengingat-sejarah/29-muhammad-natsir-pejuang-islam-kontemporer.*
7. Ningsih dalam *http://www.pks-jaksel.or.id/Article133.phtml*
8. *http://www.rahmatan.org/artikel/mengingat-sejarah/29-muhammad-natsir-pejuang-islam-kontemporer.*
9. Adian Husaini. "Pesan Terakhir Hussein Umar: Puisi Hamka untuk Natsir," dalam *www.swaramuslim.net*
10. Syafi'i Maarif. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*. Jakarta, GIP, 1996.
11. *Ibid.*
12. Sofaat Rahmat Selamet, S. Hum, *Pemikiran dan Cita-Cita KH Ahmad Dahlan*
13. Sofaat Rahmat Selamet, S. Hum, *Ibid.*
14. Ahmad Mansur Suryanegara, Prof. *Filsafat Sejarah (Makalah Mata Kuliah)*. Jurusan SPI Fak.Adab IAIN SGD, Bandung, 2003



PEMBELOKAN SEJARAH PERJUANGAN UMAT ISLAM

Salman Iskandar

Konspirasi dalam Piagam Jakarta

Piagam Jakarta ditandatangani para pendiri bangsa pada 22 Juni 1945. Keberadaan Piagam Jakarta dirumuskan sejak BPUPKI membentuk panitia khusus yang diamanahi membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang panitia khusus yang dikenal dengan nama Panitia Sembilan itu, empat orang tokoh Islam, yaitu KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakar, Abikoesno Tjokrosoeyoso dan H. Agus Salim mengusulkan Islam sebagai dasar negara, bahkan mereka memperkuat argumentasinya dengan membawa puluhan ribu tanda tangan tokoh Islam, alim ulama dan pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia yang mengingin-kan negara yang akan diproklamasikan berdasarkan Islam.

Namun, tokoh-tokoh nasionalis sekular yang ada di Panitia Sembilan, seperti Soekarno, Moh. Hatta, Achmad Soebardjo, Muhammad Yamin dan perwakilan non-Muslim, yaitu A.A. Maramis, menolak tegas usulan tokoh-tokoh Islam tersebut.

Akhirnya, setelah berdebat panjang, Panitia Sembilan merekomondasikan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (*Djakarta Charter*) pada 22 Juni 1945. Di antara kesepakatannya adalah, "Negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Dalam pidatonya pada 9 Juli 1945, Soekarno menyebut Piagam Jakarta ini sebagai *gentlemen's agreement* antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Bahkan A.A Maramis, tokoh nasionalis yang mewakili kepentingan non-Muslim menyatakan bahwa dia dan warga non-Muslim setuju 200% atas Piagam Jakarta karena Syariat Islam yang dilaksanakan hanya berlaku bagi penduduk Muslim.

Pada 17 Agustus 1945, para aktivis dan pejuang kemerdekaan berkumpul di Jl. Pegangsaan 65, Jakarta untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, ada fakta yang tidak banyak diketahui bahwa menjelang pembacaan naskah

proklamasi, upacara dimulai dengan pembacaan UUD 1945 yang berisi *Piagam Jakarta* oleh Dr. Moewardi seperti terungkap dalam buku *Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia* karya Sidik Kertapati.

Fakta lainnya, saat proklamasi dibacakan, tidak ada seorang pun tokoh Kristen yang hadir dalam peristiwa bersejarah itu. Ternyata para aktivis Kristen sibuk berkonsolidasi untuk menuntut penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Kesimpulan ini didasarkan pada pernyataan Soekarno yang mengatakan bahwa malam hari usai Proklamasi, ia ditelepon mahasiswa Prapatan 10. Mereka mengatakan bahwa pada 17 Agustus siang hari pukul 12.00 WIB, tiga anggota PPKI asal Indonesia Timur—Sam Ratulangi, Latuharhary dan I Gusti Ketut Pudja—mendatangi asrama mahasiswa dan mengatakan bahwa mereka keberatan dengan isi *Piagam Jakarta*.

Mahasiswa lalu menghubungi Hatta, yang kemudian mengundang mereka untuk datang menemui dirinya pukul 17.00 WIB. Hadir dalam pertemuan itu aktivis Prapatan 10, Piet Mamahit dan Imam Slamet. Setelah berdialog, Hatta menyetujui usul perubahan tujuh kata dalam *Piagam Jakarta*. Sepulang dari pertemuan dengan Hatta, malam itu juga para mahasiswa menelepon Soekarno untuk menyatakan keberatan dari tokoh Kristen Indonesia Timur.

Singkat kata, keesokan harinya Soekarno dan Hatta mengadakan rapat dengan PPKI di Pejambon Jakarta. Agenda sidang dibatasi hanya membahas perubahan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45. Rapat yang diagendakan berlangsung pukul 09.30 WIB mundur sampai pukul 11.30 WIB karena terjadi perdebatan sengit dalam lobi-lobi untuk menghapus tujuh kata dalam *Piagam Jakarta*.

Begitu sengit dan tegangnya pertemuan itu hingga Soekarno memilih tidak terlibat dalam lobi tersebut. Ia jeri dengan kegigihan Ki Bagus dalam mempertahankan *Piagam Jakarta*. Di sinilah peran Kasman Singodimejo yang sesama Muhammadiyah melakukan pendekatan secara personal kepada Ki Bagus dengan bahasa Jawa *kromo inggil*, sebagaimana terungkap dalam memoirnya, *Hidup Adalah Perjuangan*. Kasman menjelaskan perubahan yang diusulkan Hatta, bahwa kata "Ketuhanan" ditambah dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" itu adalah Allah SWT.

Kasman juga menjelaskan kepada Ki Bagus soal janji Soekarno yang mengatakan bahwa enam bulan lagi akan ada sidang MPR untuk membuat undang-undang yang sempurna. "Janji Soekarno" itulah yang setidaknya membuat Ki Bagus merasa masih ada harapan untuk memasukan Islam dalam undang-undang yang lengkap dan tetap.

Akhirnya, dalam hitungan kurang dari 15 menit, seperti diceritakan Hatta dalam bukunya, *Sekitar Proklamasi*, tujuh kata dalam *Piagam Jakarta* dihapuskan. Menyikapi penghapusan ini, Ketua Umum Masyumi, Prawoto Mangkusasmito dengan sedih mengatakan, "*Piagam Jakarta* yang didapat dengan susah payah, memeras otak dan tenaga berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka, pada rapat PPKI 18 Agustus 1945 dalam beberapa menit saja dapat diubah. Kekuatan apakah yang mendorong dari belakang hingga perubahan itu terjadi?"

Selain Prawoto, tokoh Masyumi lainnya seperti Mohammad Natsir mengatakan, peristiwa 18 Agustus 1945 adalah peristiwa sejarah yang tak dapat dilupakan. "Menyambut Proklamasi 17 Agustus kita bertahmid. Menyambut hari besoknya, tanggal 18 Agustus, kita beristighfar. *Insya Allah* umat Islam tidak akan lupa," kata Natsir.

Dalam buku *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidik Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan* (Jakarta: Badan Penerbit PH-UI,

2004) R.M.A.B Kusuma mengatakan, "Hatta adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terhapuskannya tujuh kata dari *Piagam Jakarta*. Ia menghapusnya tanpa berunding dengan tokoh-tokoh Islam yang menyusun Piagam Jakarta."

Hatta sendiri menceritakan kronologis peristiwa penghapusan tujuh kata tersebut dalam bukunya *Sekitar Proklamasi* bahwa pada 17 Agustus 1945 sore, Hatta menerima telepon dari Nishijima, pembantu Admiral Maeda yang memintanya untuk menerima seorang Opsir Kaigun. Hatta mengatakan bahwa Opsir Kaigun yang ia lupa namanya itu memberitahu bahwa wakil Nasrani berkeberatan dengan kalimat pembukaan UUD yang berbunyi: *kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Jika kalimat itu ditetapkan, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Menurut Ridwan Saidi, seperti dikutip dalam *Mahasiswa '45 Prapatan 10* karya Dr. Sujono Martosewojo dkk, anggapan bahwa ada Opsir Kaigun yang menemui Hatta kemungkinan adalah Iman Slamet, mahasiswa kedokteran yang memang berpostur tegap, berambut pendek, sipit dan suka berpakaian putih-putih. Iman Slamet inilah yang dikira sebagai opsir Jepang oleh Hatta.[1]

Oleh karena itu, keterangan Hatta soal adanya pertemuan dengan Opsir Kaigun yang ia lupa namanya itu sangat meragukan hingga Ridwan Saidi dalam sebuah diskusi tentang *Piagam Jakarta*, mengatakan, "Dengan segala hormat saya kepada Bung Hatta, ia seorang yang bersahaja, tapi dalam kasus Piagam Jakarta, saya harus mengatakan bahwa ia berdusta."

Pernyataan Ridwan Saidi ini dikuatkan dalam buku dari Cornell University AS, bahwa dalang di balik sosok misterius Opsir Kaigun itu adalah Sam Ratulangi yang dia sebut sebagai *an astute Christian politician from Manado, North Sulawesi* (Seorang politisi Kristen yang licik dari Sulawesi Utara).

Janji Palsu Soekarno kepada Daud Beureu'eh

Pengkhianatan berikutnya kembali harus dialami umat Islam negeri ini, khususnya apa yang dialami oleh para ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di Tanah Rencong. Mereka, melalui ketuanya, Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, meminta kepada Presiden Soekarno untuk mendapatkan kebebasan dalam menjalankan syariah Islam di wilayahnya.

Soekarno sendiri mengakui dalam pidatonya di Blang Padang Aceh, bahwa Aceh adalah daerah modal bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui perjuangan rakyat Aceh seluruh wilayah Indonesia dapat direbut kembali dari tangan penjajah.

Para ulama dan rakyat Aceh telah berjuang mengorbankan harta dan jiwa demi kemerdekaan bangsa ini. Perjuangan dan pengorbanan itu, mereka buktikan dengan mengumpulkan dana demi membeli pesawat Seulawah untuk kepentingan perjuangan melawan penjajah. Seulawah yang jadi cikal-bakal Garuda Indonesia Airways ini tidak hanya menjadi instrumen penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, namun juga menjadi modal utama dalam mempertahankan kemerdekaan itu.

Melalui Seulawah, Indonesia mampu menembus blokade udara pasukan penjajah. Pesawat ini pula yang membawa tokoh-tokoh Indonesia ke luar negeri untuk memperkenalkan bayi Indonesia yang baru lahir ke dunia internasional.

Seulawah yang bernilai US$ 120.000 berdasarkan kurs mata uang saat itu ternyata bukan satu-satunya kontribusi Aceh bagi kemerdekaan bangsa ini. Saat Jogjakarta kembali ke pangkuan Indonesia, para ulama dan rakyat Aceh kembali mengalirkan bantuan dana, alat perkantoran dan obat-obatan. Tercatat,

sebanyak lima kilogram emas disumbangkan rakyat Aceh demi keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Mereka juga menyumbangkan uang tunai sebesar US$ 500.000, di antaranya US$ 250.000 untuk membiayai angkatan perang, US$ 50.000 untuk biaya perkantoran pemerintah, US$ 100.000 untuk pengembalian pemerintahan dari Jogjakarta dan US$ 100,000 untuk pemerintahan pusat. Bahkan rakyat Aceh kembali membantu membiayai perwakilan Indonesia di Singapura dan pendirian kedutaan pemerintah di India.

Namun, apa yang didapat oleh para ulama dan rakyat Aceh, khususnya Teungku Muhammad Daud Beureu'eh atas semua yang telah mereka korbankan itu? Sungguh, pada 16 Juni 1948, Soekarno pernah berjanji, bahkan bersumpah atas nama Allah SWT dengan berlinang air mata, bahwa ia akan memberikan kebebasan kepada para ulama dan rakyat Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri berdasarkan syariah Islam.

Kenyataannya, Soekarno tidak pernah menepati janjinya, bahkan sumpahnya sendiri. Ia tidak pernah memberikan kebebasan kepada para ulama dan rakyat Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan Islam dan kebebasan menjalankan syariah Islam di Tanah Rencong. Para ulama dan rakyat Aceh yang diwakili Teungku Muhammad Daud Beureu'eh telah dikhianati oleh pemerintah pusat. Bahkan mereka dicap sebagai pemberontak. Padahal sesungguhnya mereka menuntut haknya sekaligus menagih janji atas penerapan syariah Islam yang telah dilecehkan.

Orde Baru: Petaka Umat Islam

Pada masa rezim Orde Baru, atas nama pemulihan keamanan dan ketertiban maka Pancasila dipaksakan sebagai asas tunggal bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua organisasi, baik organisasi massa maupun politik, Islam maupun bukan, semuanya diharuskan berasaskan atau berdasarkan Pancasila. Semua lawan politik bagi kekuasaan dan pemerintahan dibungkam dengan kekuatan yang memaksa.

Berikutnya, ketika kaum Muslim memiliki kesadaran untuk menghidupkan syariah Islam maka rezim Orde Baru membungkamnya dengan kekuatan militer. Tidak hanya itu, bahkan untuk sekadar mengenakan penutup aurat bagi wanita Mukminah seperti kerudung pun dilarang. Tidak hanya di instansi pemerintahan, larangan ini sampai masuk ke ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah. Arus sekularisme meluas dalam semua sendi kehidupan.

Bahkan tokoh-tokoh Muslim yang vokal dan kritis atas semua kebijakan rezim Orde Baru ini diteror dengan intimidasi dan kekerasan. Meminjam istilah budayawan Permadi, mereka segera di-3B-kan: Bungkam, Bui dan Bunuh. Fakta berdarah peristiwa Pembantaian Tanjung Priok, Haur Koneng dan Talangsari di Lampung adalah tiga di antara kezaliman rezim Orba terhadap umat Islam.

Kelahiran Rezim Orde Baru sejak 1967 ini tidak lepas dari skenario orang-orang kafir Barat untuk menguasai Indonesia. Sejak rezim ini berkuasa, cengkeraman *Globo Capitalism* atas bangsa Muslim terbesar di dunia ini tampak nyata dari hasil *Indonesian Investment Conference* untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia oleh para kapitalis asing. Konferensi ini dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar dunia, para kapitalis dan bankir Yahudi, seperti David Rockefeller. Dari sini pula, istilah *Mafia Barkeley* yang memandu arah kebijakan ekonomi dan pemerintahan Indonesia mulai mengemuka.

Sejak 1967 pula, globalisasi ekonomi Indonesia mulai dijalankan. Atas nama pemulihan ekonomi nasional, rezim yang berkuasa mengikat janji dengan para kapitalis asing untuk mengeksploitasi kekayaan alam negeri ini. Demi melicinkan jalan penguasaan mereka atas Indonesia, mereka pun membentuk

Inter Government Group on Indonesia (IGGI) yang ironisnya diketuai oleh bekas negara penjajah Indonesia sendiri: Belanda!

Oleh karena itu, rezim yang berkuasa pun tunduk pada kepentingan asing yang bermain untuk mencengkram Indonesia dengan *Globo Capitalism* dan mustahil memedulikan aspirasi rakyat yang mayoritas umat Islam.

Orde Reformasi: Keluar dari Mulut Buaya, Masuk Mulut Harimau

Euforia Reformasi yang didengungkan sejak awal kejatuhan Orde Baru ternyata berdampak luas di tengah masyarakat Indonesia. Tidak hanya arus kebebasan, HAM dan demokratisasi pada semua sendi kehidupan. Dampak arus Liberalisme ini menyinggung pula tatanan kehidupan umat beragama, khususnya umat Muslim.

Atas nama HAM dan kebebasan berkeyakinan, ide-ide, pemahaman dan keyakinan keimanan umat Islam diracuni dengan pemahaman ide-ide Sepilis (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme). Kaum Muslim Indonesia pun direcoki dengan keberadaan sekte-sekte sesat dan menyesatkan seperti Ahmadiyah.

Selain itu, negeri Muslim terbesar ini pun tiba-tiba sibuk dengan kampanye *Global War on Terrorism* yang diusung AS sejak pemerintahan George W. Bush. Pemerintah pun manut saja mengikuti skenario AS dengan menjadikan Islam dan umatnya sebagai sasaran tembak perang melawan teroris. Bahkan untuk mendefinisikan teror, terorisme dan siapa teroris, pemerintah mengikuti kebijakan politik luar negeri negara adidaya itu, yang dikenal dengan *Doktrin Wolfowitz*. Doktrin ini adalah modifikasi *Protocols of Zion* yang dirancang oleh Paul Abraham Wolfowitz, mantan duta besar AS untuk Indonesia pada masa pemerintahan Habibie dan Gus Dur.

Melalui doktrin ini pula, umat Islam yang berpegang teguh dengan syariah Islam dan yang berusaha memperjuangkan penegakkan syariah Islam di negeri ini secara otomatis menjadi lawan bagi kepentingan Amerika dan layak dilabeli sebagai teroris. Rezim yang berkuasa pun lebih nyaman melayani kepentingan asing daripada mengurusi rakyatnya sendiri.

Sungguh tepat apabila pepatah mengatakan bahwa gambaran umat Muslim Indonesia saat ini: keluar dari mulut buaya masuk ke dalam mulut harimau.

WalLahu a'lam bi ash-shawwab. []

Salman Iskandar adalah Editor dan Penulis Buku, Pembina Asosiasi Penulis Ideologis (API) Islam.

Catatan kaki

1 Hal ini pula yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Deliar Noer dalam otobiografinya, *Aku Bagian Umat Aku Bagian Bangsa* (Mizan, 2000).

Maraji'

1 Ahmad Mansur Suryanegara. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta. 2009.
2 Ahmad Mansur Suryanegara. *Menemukan Sejarah*. Bandung: Mizan, 1998.
3 Anwar Hardjono, dkk., *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
4 Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
5 Hartono Ahmad Jaiz. *Di Bawah Bayang-Bayang Soekarno-Soeharto*. Jakarta: Darul Falah, 1999.
6 Kasman Singodimedjo. *Hidup Itu Berjuang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
7 Mohammad Hatta. *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tinta Mas, 1982.
8 Mohammad Natsir. *Agama dan negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 2001
9 Ridwan Saidi. *Status "Piagam Jakarta" Tinjauan Hukum dan Sejarah*." Jakarta: 2007. (Makalah disampaikan dalam pertemuan tokoh Islam di Jakarta, 22 Mei 2007).
10 R.M.A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidik Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Badan Penerbit PH-UI, 2004
11 Salman Iskandar. *55 Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh*. Solo: Tinta Medina imprint of Tiga Serangkai, 2011, cet. ke-1.
12 Sidik Kertapati. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Jajasan Djambatan, 1964, cet. ke-3.



Diasuh oleh: KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting dan urgen yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BAGAIMANA ISLAM MEMANDANG IDE KESETARAAN JENDER?

Soal:

Bagaimana status ide kesetaraan jender? Bagaimana hukumnya orang Islam mengadopsi, mengusung dan menerapkan ide seperti ini?

Jawab:

Ide keteraan jender sebenarnya berangkat dari fakta diskriminatif yang menimpa kaum perempuan. Setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis pada 1792 berkembang pemikiran, bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya.

Ketika itu, perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik dan pekerjaan. Karena itu, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki di hadapan hukum.

Pada 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda.

Ide Kesetaraan Gender (KG) ini diusung oleh gerakan feminisme. Feminisme sendiri dicetuskan pertama kali oleh aktivis Sosialis Utopis, Charles Fourier, pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, *The Subjection of Women* (Perempuan sebagai Subyek) pada tahun (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang Pertama.

Pada awalnya gerakan ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya, terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah, sementara kaum perempuan di dalam rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datang era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Prancis di abad ke-XVIII yang merambah ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Situasi ini diperburuk oleh adanya fundamentalisme agama yang melakukan opresi terhadap kaum perempuan. Di lingkungan Kristen terjadi praktik-praktik dan khotbah-khotbah yang menunjang hal ini ditilik dari banyaknya gereja yang menolak adanya pendeta perempuan, dan beberapa jabatan "tua" hanya dapat dijabat oleh pria.

Pergerakan di Eropa untuk "menaikkan derajat kaum perempuan" disusul oleh Amerika Serikat saat terjadi revolusi sosial dan politik. Pada tahun 1792, Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul, *Vindication of the Right of Woman* (Mempertahankan Hak-hak Wanita), yang berisi prinsip-prinsip feminisme dasar yang digunakan di kemudian hari.

Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan dengan pemberantasan praktik perbudakan, hak-hak kaum prempuan mulai diperhatikan dengan adanya perbaikan dalam jam kerja dan gaji perempuan, diberi kesempatan ikut dalam pendidikan, serta hak pilih. Menjelang abad 19, feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan

apa yang mereka sebut sebagai keterikatan (perempuan) universal (*universal sisterhood*).

Pada tahun 1960 muncul negara-negara baru. Ini menjadi awal bagi perempuan untuk mendapatkan hak pilih dan selanjutnya terlibat dalam ranah politik kenegaraan saat mereka diikutsertakan dalam hak suara parlemen. Gelombang kedua ini dipelopori oleh para feminis Perancis seperti Helene Cixous (seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Prancis) dan Julia Kristeva (seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Prancis) bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis, Derrida.

Dalam *the Laugh of the Medusa*, Cixous mengkritik logosentrisme yang banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin.

Di negeri-negeri kaum Muslim, ide ini dibawa oleh mereka yang mendapatkan pendidikan di Barat, atau yang telah di-*brainwash* di Barat. Tokoh-tokoh awal yang membawa ide ini masuk ke dunia Islam, sebut saja Rufa'ah at-Thahthawi di Mesir dan Khairuddin at-Tunisi. Mereka merupakan generasi awal yang dikirim ke Prancis. Ketika kembali ke negerinya, merekalah yang menyuarakan ide *tahrir al-mar'ah* (liberalisasi perempuan).

Jadi, ide ini secara historis bukan dari Islam, tetapi berakar pada budaya kafir Barat. Karena itu, ide ini tidak memiliki akar sejarah dalam peradaban Islam. Sebagian ahli tafsir ada yang mengutip riwayat, bahwa Ummu Salamah pernah menyampaikan kepada Nabi ihwal warisan yang berbeda antara kaum pria dengan wanita. "*Ya Rasulullah, kaum pria berperang, sedangkan kami tidak, sehingga kami bisa mendapatkan mati syahid. Kami pun hanya mendapatkan bagian saparuh warisan (kaum pria).*"

Lalu Allah menurunkan QS an-Nisa' [04]: 32.[1] yang intinya menegaskan bahwa Allah menjadikan masing-masing kelompok ini (pria dan wanita) dengan bagiannya, sesuai dengan ketentuan *iradah* (kehendak) dan hikmah-Nya.[2]

Namun, riwayat ini tidak bisa digunakan sebagai argumen, bahwa ide jender ini juga dimiliki oleh sahabat, termasuk Ummul Mukminin. Sebab, konteks pernyataan Ummu Salamah ini terkait dengan keinginannya untuk bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana kaum pria. Bisa berjihad, terlibat perang dan mendapatkan mati syahid. Namun Allah mengingatkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (Sebab) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS an-Nisa' [4]: 32).

Meski ayat ini didahului larangan, yaitu *La tatamannau* (Janganlah kalian iri), tidak serta merta ayat ini menafikan jerih-payah kaum perempuan. Sebaliknya, ayat ini menegaskan, bahwa apa saja yang dilakukan oleh kaum pria pasti akan kembali kepada dirinya. Demikian juga kaum wanita. Apapun yang dia lakukan, juga akan kembali kepada dirinya. Ini artinya, baik pria maupun wanita, bisa meraih kemuliaan yang sama di hadapan Allah dengan amal yang mereka lakukan.

Ketika wanita tidak bisa dan tidak wajib berjihad, Nabi saw. menyatakan:

«جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ أَوْ حَسْبُكُنَّ الْحَجُّ»

Jihad kalian (kaum wanita) adalah haji, atau cukup bagi kalian (kaum wanita) dengan haji (HR al-Bukhari).[3]

Begitulah Islam mengatur. Suatu ketika ada wanita ditampar oleh suaminya, dia datang kepada Nabi saw. dan meminta agar diberi hak

untuk membalas tamparan suaminya. Awalnya, Nabi saw. membolehkan pembalasan (*qishash*) tersebut, namun Allah segera menegur Nabi saw., dan turunlah:

وَلَا تَعۡجَلۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أَن يُقۡضَىٰٓ إِلَيۡكَ وَحۡيُهُۥۖ وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ﴿١١٤﴾

Janganlah kamu membacakan al-Quran (kepada siapapun) sebelum wahyu-Nya sampai (dibacakan tuntas) kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan (QS Thaha [20]: 114).[4]

Nabi pun berhenti, kemudian turun ayat:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (QS an-Nisa' [4]: 34).

Ayat ini menjelaskan, bahwa kaum pria ditetapkan oleh Allah sebagai *qawwam* (mengurus dan mengontrol) kaum perempuan. Kata *qawwam* ini merupakan bentuk *mubalaghah* dari kata *qa'im*, karena dianggap kaum prialah yang paling pas untuk melaksanakan tugas ini.[5]

Penetapan status ini diikuti dengan alasan (*sababiyah*), *bima fadhala-Llah* (karena kelebihan yang Allah berikan kepada pria); *wa bima anfaqu* (karena harta yang mereka belanjakan untuk kaum wanita).[6] Selain kewajiban, Allah juga memberikan hak kepada kaum pria (suami) untuk mendidik istrinya, ketika dikhawatirkan melakukan *nusyuz*. Begitulah Islam mengatur kehidupan pria dan wanita. Masing-masing dengan hak dan kewajibannya.

Namun, ayat-ayat seperti ini juga ditentang oleh pengusung ide kesetaraan jender karena dianggap diskriminatif atau setidaknya harus ditafsirkan ulang agar sejalan dengan konotasi yang mereka inginkan. Karena itu, ide kesetaraan jender ini jelas bukan merupakan ide Islam, bahkan jelas-jelas tidak memiliki akar di dalam Islam. Ide ini juga ditolak oleh Islam.

Dengan kata lain, ide kesetaraan jender ini merupakan ide kufur, yang tidak boleh diadopsi, diterapkan dan diusung oleh seorang Muslim. Hukum mengadopsi, menerapkan dan mengusung ide ini jelas-jelas haram dalam pandangan Islam, sebagaimana mengusung ide-ide kufur yang lain. []

Catatan kaki:

1. HR 'Abdurrazaq, Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, at-Tirmidzi, Ibn Jarir, Ibn al-Mundir, Ibn Abi Hatim, al-Hakim dan al-Baihaqi.
2. Muhammad bin 'Ali As-Syaukani, *Tafsir as-Syaukani*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1997, I/459.
3. Syarufuddin an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, XXI/18.
4. Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.t., V/168.
5. Muhammad bin 'Ali As-Syaukani, *Tafsir as-Syaukani*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1997, I/459.
6. Muhammad bin 'Ali As-Syaukani, *Tafsir as-Syaukani*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1997, I/459.



'ZONA NYAMAN'

Kini, 'zona aman' atau 'zona nyaman' telah menjadi pilihan banyak orang dalam mengarungi kehidupan. Keyakinan (agama) tak lagi jadi pedoman. Idealisme tak lagi jadi tumpuan. Ideologi tak lagi jadi sandaran. Singkatnya, kini banyak orang makin pragmatis dalam pikiran maupun tindakan; yang penting aman dan nyaman. Saat demikian, tantangan penuh risiko tentu sejauh mungkin dihindarkan.

Di tingkat elit politik, zona aman dan nyaman telah lama jadi patokan. Saat menyokong pihak asing dianggap menguntungkan, kebijakan apapun akan dikeluarkan; tak peduli jika itu menjadikan rakyat sebagai korban, asal mereka tak melakukan pemberontakan. Sebaliknya, saat berpihak kepada rakyat dipandang bermanfaat untuk pencitraan, berpura-pura menolak kebijakan penguasa yang menyengsarakan rakyat segera ditonjolkan; tak peduli itu dilakukan hanya di saat-saat akhir, saat arus penolakan rakyat tak tertahankan, bukan dilakukan sejak awal perencanaan kebijakan.

Karena mencari zona aman dan nyaman pula, tak sedikit tokoh agama, kiai, ulama atau ustadz yang tetap tak tertarik untuk melibatkan diri dalam dakwah yang penuh risiko atau dianggap riskan. Alasannya klasik: *toh* dakwah itu bisa bagi-bagi peran; tak harus semuanya terjun ke ranah dakwah politik atau perjuangan penegakkan syariah dan Khilafah, misalnya. "*Ente* silakan bergerak di jalur politik Islam. *Ana* di bagian pendidikan. Dengan begitu, kita bisa maju bersama, menuju tujuan yang sama." Begitulah kira-kira yang sering dilontarkan. Mereka menganggap dakwah seperti permainan sepak bola: ada penjaga gawang, penyerang, bek kiri-bek kanan, dst. Mereka tidak sadar bahwa saat mereka mengabaikan dakwah yang fokus pada perjuangan penegakan syariah dan Khilafah, mereka sesungguhnya sedang menjadi 'penonton', bukan pemain. Tak seperti pemain yang berisiko terpeleset, terjatuh, kena tendangan lawan, dijegal kakinya oleh musuh, harus berlari kesana-kemari mengejar dan menggiring bola sambil terengah-engah, dst; mereka tentu sekadar duduk manis, bersorak, ataupun sekadar berkomentar berisi pujian terhadap kawan atau cemoohan terhadap lawan. Itulah zona aman dan nyaman yang memang sejak awal menjadi pilihan mereka sebagai penonton, bukan pemain di lapangan.

*****

Dakwah, sejak awal kelahirannya—yakni sejak nabi dan rasul pertama diutus hingga nabi dan rasul akhir zaman diturunkan—sejatinya bukanlah zona aman dan nyaman. Tidak ada seorang nabi/rasul pun dalam dakwahnya—tak terkecuali Baginda Nabi Muhammad saw. sang teladan—yang tidak mengalami masa-masa pahit dan sulit: didustakan, ditentang, dihalang-halangi, diboikot, dimusuhi bahkan diancam secara fisik. Alasannya sederhana: apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul memang selalu berseberangan dengan keyakinan, pemikiran, tradisi, adat-istiadat dan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dimana para nabi dan rasul itu diutus. Tentu, sejak pertama

menerima wahyu, risiko demikian sudah mereka bayangkan.

Karena itu, rasa aman dan nyaman dalam dakwah—termasuk saat ini—hanya mungkin karena satu hal: karena dakwah yang dilakukan adalah dakwah yang tidak mengusik keyakinan, pemikiran, tradisi, adat-istiadat dan hukum yang berlaku di masyarakat; karena da'i atau aktivis dakwah tak mau berseberangan apalagi menentang keyakinan, pemikiran, tradisi, adat-istiadat dan hukum di masyarakat yang menyimpang dari Islam. Singkatnya, sang da'i atau aktivis dakwah sejak awal memang mencari 'zona aman'. Bahkan ada yang sejak awal berupaya selalu ada di 'zona nyaman', yakni di medan dakwah yang bisa mendatangkan materi berkelimpahan.

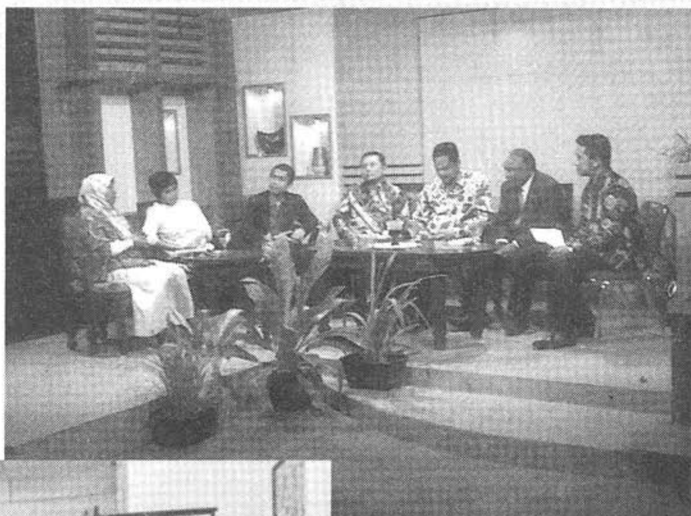
Saat 'zona aman' atau 'zona nyaman' jadi pilihan, tentu tak lagi penting apakah masyarakat akan berubah ke arah lebih baik ataukah tidak; apakah yang disampaikan dalam dakwah *al-haq* atau *al-bathil*; apakah tatacara dakwahnya sesuai dengan tatacara dakwah Baginda Rasul saw. yang tegas, berani dan tentu didasarkan pada hikmah (*hujjah*) ataukah tidak. Yang penting, rutinitas 'dakwah' tetap berlangsung; masyarakat tetap bersikap baik kepada sang da'i/aktivis dakwah; pekerjaan dan jabatan tetap lancar; bisnis tetap aman terkendali; kehidupan keluarga tenteram-nyaman; dst.

Karena dalam dakwahnya yang dicari adalah zona aman dan nyaman, cibiran tetangga wajib dihindarkan, pengucilan masyarakat harus dijauhkan. Demikian pula ancaman terhadap pekerjaan dan jabatan serta bisnis jika itu merupakan efek dari dakwah yang dilakukan.

Sayangnya, 'zona aman' atau 'zona nyaman' ternyata masih pula menjadi pilihan sebagian orang yang ada dalam gerakan Islam, yang sehari-hari mendapat julukan 'keren' *hamil ad-da'wah*, pejuang syariah dan Khilafah. Asal selalu berada di zona aman dan nyaman, kadang ia tak peduli jika dakwah harus selalu minimalis; tak masalah jika dakwah harus bermanis-manis; tak galau jika ide tentang syariah dan Khilafah tak tersampaikan; tak sungkan kalau keberadaannya sebagai anggota gerakan Islam tak tampak di permukaan. Bahkan statusnya sebagai pejuang syariah dan Khilafah sejauh mungkin berusaha ia sembunyikan; khawatir bisa 'mengganggu' zona aman dan nyaman yang selama ini ia upayakan. Dalam kondisi demikian, jangan heran jika masyarakat tidak mengenal dirinya sebagai aktivis sebuah gerakan meski ia tinggal di tengah-tengah mereka selama tahunan. Jangan aneh pula jika yang bersangkutan, meski dikenal sebagai 'tokoh panutan', justru hilang dari peredaran medan dakwah yang fokus pada perjuangan penegakan syariah dan Khilafah Islam.

Dalam kondisi demikian, kita sering melupakan perjuangan Baginda Nabi saw. yang akrab dengan penderitaan: dicaci, dilempari batu dan kotoran, diboikot dan dikucilkan, termasuk diancam dibunuh dan dimusnahkan. Dalam kondisi demikian, kita pun sering mengabaikan penderitaan para Sahabat beliau—seperti Bilal bin Rabbah yang pernah dijemur di atas pasir yang panas, di bawah terik matahari, lalu dicambuk berkali-kali; atau Abdullah bin Mas'ud yang dikeroyok kafir Qurays di tengah pasar; atau Habbab bin al-Arts yang tubuhnya diseret di atas bara api hingga kulit dan dagingnya matang terpanggang, dll. Mereka memilih demikian hanya karena memperjuangkan Islam. Tentu karena mereka sangat paham, bahwa zona aman dan nyaman di dunia akibat meninggalkan dakwah pasti akan berbuah ancaman dan siksaan di akhirat nanti. Mereka pun amat paham, bahwa zona aman dan nyaman yang hakiki hanya bisa dirasakan saat kedua kaki sudah berada di surga yang diimpikan, bukan di dunia yang penuh kepalsuan!

Wama tawfiqi illa billah. **[Arief B. Iskandar]**



Yogyakarta. Ustadzah Iffah Ainur Rochmah (Jubir Muslimah HTI) mengkritisi bahwa kenaikan BBM adalah wujud kebijakan untuk menyempurnakan liberalisasi migas dari hulu-hilir yang dilakukan oleh pihak asing. Hal itu ia sampaikan dalam dialog live *Ranah Publik* di TVRI Stasiun Yogyakarta, senin [2/4], bertajuk *Mengantisipasi Ekses Kenaikan BBM.*



Yogyakarta. Senin [9/4], Muslimah HTI DPD I DIY melakukan kunjungan ke Koran *Harian Jogja* [Jaringan Bisnis Indonesia] yang bertempat di jalan MT Haryono No 7B Yogyakarta. Kunjungan media ini dimaksudkan sebagai *silah ukhuwah* dan menyampaikan buah pemikiran Muslimah HTI sebagai kontribusi penyelesaian terhadap masalah perempuan dalam rangka sosialisasi hasil dari International Women Conference (ICW) di Tunisia pada tanggal 10 Maret 2012 lalu.



Bandung. 1.600 Muslimah dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari Ibu Rumah Tangga, Intelektual, Mahasiswi, Pelajar, dan Tokoh Perempuan se-Jawa Barat menghadiri Temu Akbar Perempuan Jawa Barat di Graha Emerald Bandung pada Ahad, [8/4] yang lalu. Pertemuan tersebut mengangkat Tema, "Khilafah: Model Cemerlang bagi Kemuliaan dan Kesejahteraan Perempuan". Tujuannya adalah untuk mengenalkan dan menggambarkan sistem Islam yang komprehensif dalam mengatasi masalah-masalah perempuan, khususnya di Jawa Barat.



Yogyakarta. Para guru se-DIY hadir dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh MHTI DIY dengan tema, "Guru di Persimpangan: Antara Realita dan Idealita" di Aula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Provinsi DIY pada Minggu (18/3).



Balikpapan. Muslimah Hizbut Tahrir daerah Balikpapan menyelenggarakan Seminar "Khilafah: Sebuah Model Cemerlang bagi hak-hak dan peran politik perempuan". Acara yang bertempat di Hotel City, pada hari Senin [12/3] dipadati oleh 100 Muslimah dan tokoh Muslimah yang diikuti dengan serius dan antusis.



Jakarta. 300 peserta dari kalangan mubalighah, praktisi pendidikan, praktisi kesehatan serta aktivis mahasiswa dan pelajar hadir dalam acara Temu Tokoh Muslimah yang diadakan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Jakarta. Acara yang digelar di Graha 57 SMKN 57 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Sabtu [17/3] ini dalam rangka merefleksi Konferensi Perempuan Internasional di Tunisia dengan tema, "Satukan Langkah, Wujudkan Hak – Hak & Peran Politik Perempuan".



Bogor. Para intelektual dari kalangan profesor, dosen, peneliti, maupun akademisi memenuhi Ruang Papandayan di Hotel Pangrango Bogor untuk menghadiri *Muslim Intelectual Circle* (MIC) pada hari Ahad (8/4). Acara yang digagas oleh Lajnah Khusus Intelektual (LKI) HTI Kabupaten Bogor ini mengambil tema "Membangun Kesadaran Islam Menuju Kebangkitan Umat".



Semarang. Tim Lajnah Khusus Ulama (LKU) HTI DPD I Jateng pada Ahad [7/4] mengunjungi dua ulama besar di Rembang, yaitu KH Abdul Qayyum dan KH Muhammad Najih Maimoen. Dalam kunjungan ini didiskusikan tentang kondisi masyarakat yang masih memperihatinkan di berbagai sisi. Ini adalah cabang dari persoalan yang lebih besar, yaitu tidak diterapkannya syariah Islam dalam kehidupan dunia.



Ternate. 50 orang yang mayoritas berasal dari mahasiswa hadir dalam Halqah Islam dan Peradaban [HIP] edisi 5 yang diselenggarakan oleh DPD I HTI Maluku Utara, pada hari sabtu [17/3]. Acara tersebut mengangkat tema "BBM Naik, Rakyat Menderita, Di Mana Tanggungjawab Pemerintah?". Pembicara: Azis Hasim, SE (pengamat ekonomi dari Univ. Khairun/Unkhair) dan Humas HTI DPD I Malut Ust. Ir. Sabaruddin, MM.



Langsa. Silaturrahmi dan audiensi DPD II HTI Kota Langsa dengan Kapolres Kota Langsa pada Rabu [11/4] diwarnai dengan diskusi yang akrab mengenai berbagai persoalan khususnya yang menyangkut persoalan umat di Kota Langsa seperti narkoba, judi, khalwat, aliran sesat dan juga yang menyangkut isu nasional lainnya. Rombongan HTI Kota Langsa diterima langsung oleh Kapolres Langsa, AKBP Hariadi, SH, SIk yang juga didampingi oleh Kabag Ops AKP Hadi SR dan dua staf lainnya.



Subang. Pada hari Jumat [6/4], rombongan DPD II HTI Subang berkunjung ke Pimpinan PP Miftahul Ulum [KH Mujahidin Fatawi] yg beralamat di Jl. Raya Kebon Danas Pusaka Jaya Kec. Pusaka Nagara Subang. Rombongan diterima dikediaman beliau dan menyambut dengan hangat, disertai KH Al FaniKirom pimpinan PP Nurul Iman Dusun Sukajaya Pamanukan. KH Mujahidin mengatakan dan menjelaskan dalil Ijmak Sahabat tentang kewajiban mengangkat seorang khalifah.



Lubuk Linggau. "Aneh kalau ada ulama yang menolak Khilafah, seperti juga aneh kalau ada ayam yang menolak dikasih beras atau gabah, *lho* itu kan hidup matinya mereka." ungkap Mudir Ponpes Ar Risalah KH Dr. Saiful Hadi Ma'afi saat silaturahmi dengan pengurus DPD II HTI Lubuk Linggau, Ahad (8/4) di Ponpes Ar-Risalah, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.



Bogor. 30 orang tokoh, akademisi dan ulama di kota hujan pada hari Sabtu [24/3], antusias mengikuti Talkshow Live di RRI Bogor dengan tema Menyoal Kenaikan BBM . Interaksi dari pendengar dan sms yang masuk, semua menyatakan tidak setuju rencana kenaikan harga BBM dengan menyampaikan dampak yang muncul baik sebelum atau sesudah jika jadi dinaikkan.

Palembang. 120 ulama memberi dukungan terhadap perjuangan penegakan syariah dan Khilafah. Komitmen tersebut mengalir pada acara Temu Ulama Sumsel dan Jambi yang diadakan oleh DPD HTI Sumatera Selatan, di Aula Musdalifah asrama haji Palembang pada hari ahad [1/4]. Acara yang mengangkat tema "Peran Ulama dalam Menegakkan Syariah dan Khilafah" ini menghadirkan narasumber Ustadz Ahmad Junaidi ath-Thoyyibi dari DPP HTI Jakarta.





Catatan Jubir HTI
H.M. Ismail Yusanto

'TELMI'

"HTI pantas mendapat piala sebagai pengkhayal terbesar abad ini karena proyek palsunya mewujudkan Negara Islam di Indonesia."

Kalimat itu tertulis di kulit muka buku karya Dr. Ainur Rofiq al-Amin berjudul *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (LKis, 2012) yang merupakan ringkasan dari disertasi S-3-nya di IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Dalam menuduh HT(I) sebagai pemimpi atau pengkhayal dan menyebut dengan kalimat-kalimat nyinyir seperti tertulis di atas, Ainur Rofiq tidak sendiri. Ada beberapa lagi orang yang *ngaku* sebagai peneliti (tapi tidak teliti) dan intelektual Muslim (tapi lebih mirip sebagai provokator dan anggota kaum pendengki) yang juga kerap menyebut HT(I) dengan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan kepada sesama Muslim. Ini tentu sikap yang aneh. Orang kafir saja, misalnya mereka yang tergabung dalam NIC (*National Intelligence Council*), tidak mengatakan begitu.

NIC alih-alih menyebut HT(I) atau siapa saja yang memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah sebagai pengkhayal, lalu menyebut dengan kata-kata nyinyir, mereka justru sibuk mengerahkan energi dan segenap kemampuannya untuk melakukan riset mendalam guna menilai sejauh mana *possibilitas* (kemungkinan) berdirinya kembali Khilafah itu benar-benar bakal terjadi. Hasil riset itu kemudian mereka bukukan dalam *Mapping The Global Future* (MGF), yang diterbitkan pada Desember 2004.

Dalam riset itu, intinya NIC memperkirakan ada 4 skenario global yang bakal terjadi pada tahun 2020. *Pertama*: disebut Dunia Davos (*Davos World*) memberikan gambaran tentang bagaimana kekuatan ekonomi pada 15 tahun ke depan dapat membentuk proses globalisasi yang lebih memberikan wajah non-Barat. Dalam skenario ini, raksasa Asia—Cina dan India—serta negara paling berkembang lain menggeser ekonomi "Barat", melalui penguasaan ekonomi domestik dan penguasaan teknologi.

Kedua: disebut *Pax Americana*. Dalam skenario ini digambarkan bagaimana dominasi AS dapat terus bertahan menghadapi perubahan radikal dalam *landskap* politik global. Washington tetap menjadi pusat dari poros politik internasional.

Ketiga: *A New Chalipate*. Dalam skenario ini digambarkan bagaimana identitas global yang didorong oleh gerakan Islam radikal bisa muncul. Sebuah Khilafah baru diproklamasikan dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah seperti Timur Tengah, sebagian Afrika dan Asia, yang memang telah menjadi bagian dari Khilafah pada masa lalu. Khilafah juga tumbuh menjadi lawan dari ideologi yang ada.

Keempat: disebut *The Cycle of Fear*. Skenario ini menggambarkan tentang kekhawatiran bila proliferasi (pengayaan) WMD (*weapon of mass destruction* atau senjata pemusnah massal) terus meningkat. *The Cycle of Fear* terjadi ketika perlombaan WMD terus terjadi, dan WMD, melalui tangan *dealer*, jatuh ke tangan pihak-pihak yang disebut sebagai para teroris.

++++

Robert L Hutching, *Chairman* dari *National Intelligence Council* (NIC), dalam pengantar dari dokumen itu mengatakan bahwa pembuatan *Mapping The Global Future* (MGF) bertujuan untuk membuka pemikiran (*open mind*) untuk segala kemungkinan (*possibilities*) yang bakal

terjadi setelah mengamati kecenderungan-kecenderungan global (*global trends*). Dengan begitu AS siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin terjadi pada masa depan.

MGF dibuat dengan bersumber pada dua bahan utama, yakni *Global Trends 2010* dan *Global Trends 2015*, ditambah dengan diskusi dengan banyak ahli pemerintahan dan non pemerintahan. *Global Trends 2010* dibuat pada 1997 dari serangkaian konferensi yang diselenggarakan di Washington DC yang diikuti oleh sejumlah akademisi dan pengusaha serta sejumlah pakar intelijen. *Global Trends 2015* merupakan studi yang mengidentifikasi 7 perubahan global penting, yakni demografi, lingkungan dan sumber daya alam, sains dan teknologi, ekonomi global dan globalisasi, tata kelola nasional dan internasional, konflik-konflik masa depan dan peran AS. Studi ini disusun pada tahun 2000 dengan melibatkan ribuan orang. Bagian awal didasarkan pada hasil diskusi antara NIC dan para ahli non pemerintah di AS. Kemudian hasilnya didiskusikan bersama para ahli dari seluruh dunia dalam serangkaian konferensi regional di 5 benua guna benar-benar mendapat perspektif tentang apa yang bakal terjadi pada 15 tahun ke depan. Kemudian pembahasan difokuskan pada kecenderungan-kecenderungan kunci (*key-global trends*) yang bakal berpengaruh di region tersebut. Diskusi juga diselenggarakan secara *on line* melalui *website* yang telah disiapkan.

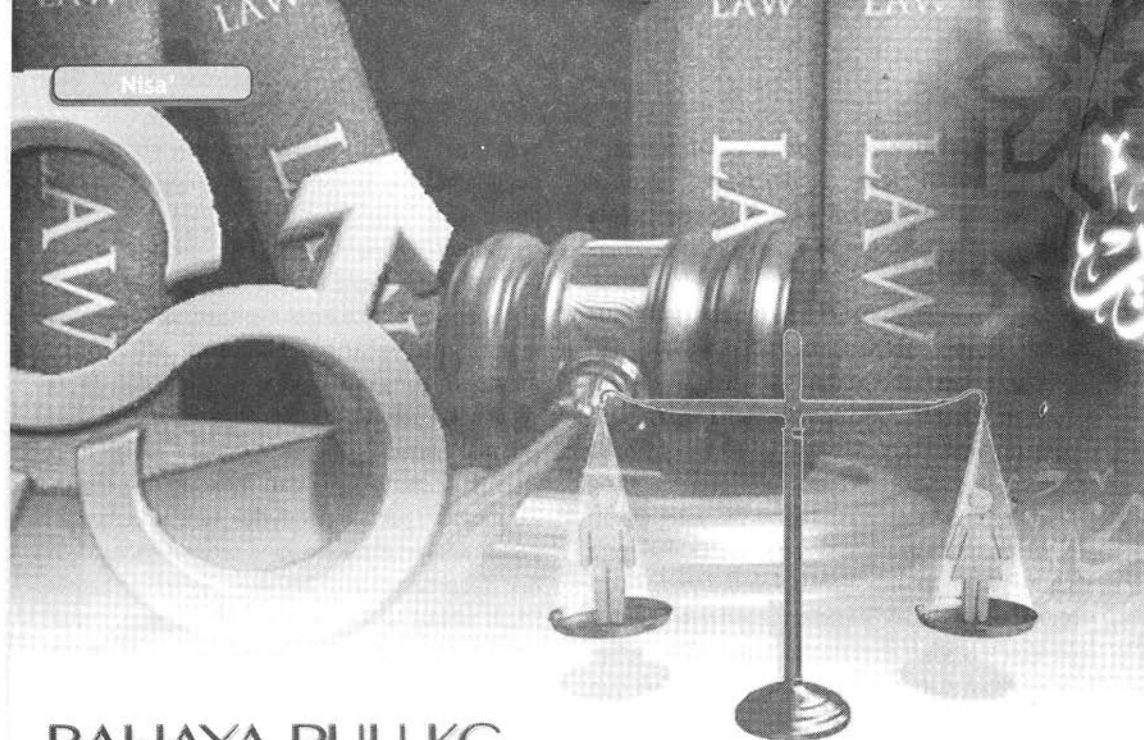
Di antara kepastian yang dicatat oleh riset ini adalah kemunculan potensi kekuatan politik Islam serta tetap bertahannya AS sebagai kekuatan ekonomi, politik dan militer paling besar di dunia dan menguatkan kekuatan non negara. Riset juga mencatat berbagai ketidakpastian, yakni apakah negara lain akan menantang AS secara terbuka, juga sejauh mana kesediaan negara-negara untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan non negara itu. Adapun yang dianggap memunculkan ketidakpastian adalah dampak dari semangat religius (Islam) untuk penyatuan negara-negara, termasuk munculnya idelologi jihad.

Dalam kesimpulannya, NIC memperkirakan bahwa AS tetaplah akan menjadi kekuatan dominan yang bakal turut membentuk dunia pada masa mendatang. Namun, NIC juga memperhitungkan pengaruh Cina dan India sebagai kekuatan baru. Bila abad 20 adalah abad AS, maka abad 21 menurut mereka adalah milik Asia, khususnya Cina dan India. Kedua negara itu memiliki jumlah penduduk sangat besar dan pertumbuhan ekonomi yang terus menanjak. Di luar itu, secara khusus NIC memperkirakan bahwa Islam politik akan memberikan dampak global yang makin signifikan menjelang tahun 2020. Karena itu, NIC menyebut Islam politik akan menjadi kekuatan utama.

++++

Bila benar Khilafah adalah ide khayal, mengapa dalam riset berskala dunia dengan melibatkan ribuan ahli dari seluruh dunia, NIC justru memperkirakan bakal berdirinya Khilafah sebagai salah satu skenario global pada tahun 2020? Ingat, dalam memperkirakan itu, NIC mendasarkan diri pada data dan analisis empirik dari kecenderungan-kecenderungan global, termasuk di dunia Muslim. Artinya, kesimpulan itu sepenuhnya berdasar pada rasionalitas belaka, tanpa dibumbuhi dengan keyakinan atau akidah karena memang mereka tidak mempercayai hal itu. Karena itu, bagaimana bisa HT(I) dan banyak kelompok Islam lain yang tengah berjuang bagi tegaknya Khilafah disebut sebagai pengkhayal?

Sebaliknya, bila NIC—yang tidak mengenal dalil-dalil dalam al-Quran maupun hadis, juga tentu tidak percaya kepada janji Allah serta *busyra* Rasulullah saw.—berpikir sangat rasional, futuristik dan antisipatif tentang bakal berdirinya Khilafah, maka kiranya tepat orang-orang seperti Ainur Rofiq dan siapa saja yang meragukan bakal berdirinya Khilafah disebut orang-orang '*telmi*' (telat mikir). ▯



BAHAYA RUU KG

Pratma Julia Sunjandari (Lajnah Siyasiyah MHTI)

Dengar pendapat RUU Kesetaraan Gender (RUU-KG) 15 Maret 2012 antara Komisi VIII DPR dan beberapa ormas Islam tak berjalan mulus. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), Aisyiah, Muslimat Nahdhatul Ulama, MUI, BMOIWI tak begitu saja menyetujui rancangan itu. Pada prinsipnya semua ormas Islam menolak RUU tersebut dengan catatan, sedangkan MHTI menolak sepenuhnya.

Kontroversi RUU KG

Upaya legalisasi RUU KG tidak lepas dari ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang disahkan Indonesia menjadi UU No. 7/1984. Kemudian UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menguatkan keseriusan Pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak perempuan. Pasal 45 UU itu menyatakan: *Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia.*

Selain alasan yuridis, tinjauan sosiologis juga menjadi aspek yang melatarbelakangi RUU ini. Dalih klasik yang acap dilontarkan pegiat jender adalah perempuan masih mengalami diskriminasi dalam keluarga, masyarakat dan negara. Merekalah obyek penderita akibat pembedaan, pengucilan, pembatasan, dan segala bentuk kekerasan berdasar jenis kelamin. Akibatnya, kebebasan menikmati hak politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya berkurang, bahkan terhapus.

Walaupun Indonesia telah memiliki beberapa UU berbasis jender, ternyata semua itu tak cukup kuat menjadi landasan gerakan pengarusutamaan jender. Inpres No.9/2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang lahir pada masa Abdurrahman Wahid belum mampu menjadi undang-undang payung (*umbrella act*). Maka dari itu, melegalkan UU yang mengatur hak warga negara dan kewajiban negara untuk mewujudkan kesetaraan jender adalah ambisi yang harus direalisasi.

Sesi ke-39 Sidang Komite *CEDAW* PBB pada 23 Juli-10 Agustus 2007 secara khusus memberi beberapa catatan pelaksanaan agenda *CEDAW* di Indonesia. Komite memuji komitmen Indonesia terhadap mekanisme PUG dalam pembangunan nasional. Demi memastikan pemberlakuan konvensi itu, Komite meminta Pemerintah segera menuangkannya dalam hukum nasional. Bahkan dengan terus-terang Indonesia didorong untuk melakukan studi banding tentang kodifikasi dan penerapan tafsir progresif terhadap hukum Islam. Karena itulah mereka memerlukan dukungan bagi reformasi hukum, termasuk menjalin kemitraan dengan lembaga penelitian yurisprudensi Islam, masyarakat sipil, organisasi non-Pemerintah dan tokoh masyarakat yang mendukung kesetaraan perempuan.

Dokumen itu sengaja diminta untuk dipublikaskan tentu dengan maksud untuk memberikan petunjuk bahwa beginilah seharusnya arah pembangunan jender di Indonesia. Bukankah bisa kita simpulkan bahwa keislaman mayoritas penduduk Indonesia hanya menjadi obyek perubahan agenda internasional? Karena itulah, sejak pembukaan, RUU ini telah mengundang kontroversi paradigmatis. Kewajiban meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi internasional yang bahkan diikuti dengan sanksi menunjukkan bahwa Indonesia tidak cukup berdaulat untuk memperhatikan kepentingan rakyat yang mayoritas Muslim.

Menohok Ideologi Islam

Selain *CEDAW*, RUU ini juga merujuk pada *Beijing Platform For Action (BPFA)* sebagai landasan aksi. Secara lebih khusus perspektif jender diintegrasikan dalam pencapaian *Millenium Developments Goals*. Semuanya adalah permufakatan yang didasari dogma sekularisme dalam memandang persoalan perempuan. Bila dibiarkan, PUG akan menjadi bola liar yang mengarahkan perempuan menuju liberalisme yang makin liar. Karena itu, upaya mengkritisi RUU ini harus dilakukan secara paradigmatis, Islam versus Kapitalisme.

1. *Ketentuan umum.*

Ketentuan umum pada RUU ini diawali dengan definisi jender, kesetaraan jender, diskriminasi, pengarusutamaan jender dan perangkat pelaksananya. Tentu diskriminasi menjadi pemicu utama kelahiran RUU ini. Diskriminasi didefinisikan sebagai segala bentuk pembedaan dan kekerasan berdasar jenis kelamin yang berpengaruh untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat/penggunaan HAM dan kebebasan di segala bidang.

Islam, bagi Barat, adalah diskriminan kelas wahid terhadap perempuan. Aturan syariah seperti batasan aurat, pakaian (*hijab*), pemimpin negara, tanggung jawab keibuan, relasi suami-istri, perkawinan, dan perwalian dianggap kontradiktif terhadap konsepsi jender. Islam lekat dengan idiom patriarkis (memihak laki-laki), bahkan banyak ayat dan hadis yang dituduh memiliki muatan *misogynist* (membenci perempuan). Semangat RUU ini untuk membebaskan perempuan dari diskriminasi adalah dengan memberikan kemitraan seimbang antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam perkawinan dan peran kenegaraan. Karena itu, hal itu akan diterjemahkan sebagai gugatan terhadap hukum-hukum Islam yang dinilai mensubordinasi (merendahkan) perempuan seperti masalah izin istri kepada suami/wali, *nusyuz*, poligami, kepala keluarga, juga keharaman perempuan menjadi kepala negara/pemerintahan.

2. *Tujuan penyelenggaraan KG.*

Mewujudkan keadilan di segala bidang kehidupan bagi perempuan dan laki-laki adalah

tujuan umum yang terangkum dalam RUU ini. Membedakan hak dan kebebasan seseorang karena jenis kelamin adalah ketidakadilan. Tidak boleh membedakan perempuan karena pandangan tertentu—apalagi agama, terutama Islam—terhadap peran dan fungsinya dalam kehidupan. Dengan jelas poin f Pasal 3 menyatakan akan menghapus segala praktik yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin. Artinya, peran khas laki-laki sebagai *qowwam 'ala an-nisa'* dan perempuan sebagai *umm[un] wa rabbah al-bayt* adalah pembedaan yang layak untuk dihapuskan.

3. *Hak dan kewajiban warganegara*

Pasal 8-b menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan melalui peraturan yang tidak diskriminatif jender. Peraturan diskriminatif—yang mereka kategorikan sebagai perundang-undangan yang tidak jelas rumusannya—jelas menyasar pada peraturan bernuansa syariah. Data yang dihimpun Komnas Perempuan sampai akhir September 2010 menunjukkan ada 189 Perda diskriminatif. Di antaranya mengenai *khalwat* di Aceh, pemberantasan pelacuran di Jawa Barat, keharusan berpakaian Muslim dan Muslimah di Bulukumba, serta pelarangan keluar malam bagi perempuan di Tanggerang. Komite *CEDAW* memberikan catatan khusus agar Pemerintah mengidentifikasi dan melakukan revisi terhadap Perda tersebut. Selain desentralisasi yang mengakibatkan diskriminasi perempuan, Komite juga mengkhwatirkan kebangkitan kelompok agama fundamentalis.

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) menyatakan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi, hak pendidikan, hak ekonomi dan ketenagakerjaan, keterwakilan perempuan, perkawinan dan hubungan keluarga.

Keadilan pada hak ekonomi mencakup peniadaan izin perempuan dari keluarganya sebelum bekerja pada malam hari. Terpenuhinya hak reproduksi mencakup ketidakharusan izin suami soal sterilisasi dan aborsi. Komite juga menganjurkan jaminan agar perempuan/anak perempuan mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk kemudahan mendapatkan kontrasepsi bagi remaja untuk mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan kehamilan. UU Perkawinan No. 1/1974 disebut Komite CEDAW mengabadikan pandangan diskeiminatif. Undang-undang itu juga dianggap tidak melindungi perempuan karena melegalkan poligami dan perkawinan dini pada perempuan berusia 16 tahun. Demi memperbesar keterwakilan perempuan, Komite mendesak Indonesia untuk memperkuat sistem kuota 30 persen bagi calon perempuan sebagai syarat wajib dalam UU Pemilu, dengan memastikan sanksi apabila syarat itu tidak dipenuhi.

4. *PUG: Partisipasi masyarakat, penghargaan dan sanksi.*

Dengan jelas poin f Pasal 3 menyatakan akan menghapus segala praktik yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin. Artinya, peran khas laki-laki sebagai *qowwam 'ala an-nisa'* dan perempuan sebagai *umm[un] wa rabbah al-bayt* adalah pembedaan yang layak untuk dihapuskan.

Pengarusutamaan jender adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif jender atas kebijakan dan program pembangunan nasional, termasuk penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perlindungan terhadap perempuan. *Pemberdayaan masyarakat* menjadi kata kunci PUG, termasuk meminta keterlibatan dunia usaha dan swasta. Pasal 20 RUU ini mencantumkan sanksi administratif atau pemberian disinsentif bagi pihak yang mencedarai komitmen PUG. Bahkan Pasal 21 ayat (2) menentukan bila terjadi tindak pidana yang dilatarbelakangi diskriminasi jender. Pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan dalam KUHP dan UU lainnya. Jelas, ini adalah upaya untuk mendudukkan hukum positif di atas hukum syariah ciptaan Allah yang Mahatinggi!

Hikmah pembedaan hukum yang berkaitan dengan erempuan sejatinya adalah perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian perempuan, sesuatu yang tidak disadari dan dipahami kaum feminis. Maka dari itu, Islamlah jaminan kelestarian generasi yang tangguh, bebas dari krisis keyakinan dan moralitas.

Islam Tak Memerlukan PUG

Sebagaimana Kapitalisme, kelahiran ide jender berangkat dari pandangan absurd yang meniadakan penghargaan bagi perempuan. Karena itulah perempuan di luar Dunia Islam perlu berjuang untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 1777 perempuan di beberapa negara bagian Amerika Serikat belum mendapatkan hak pilih dalam Pemilu. Baru tahun 1920 mereka boleh memilih. Adapun di Dunia Islam, sejak abad ke-7 M Rasulullah saw. telah memberi kesempatan pada Ummu Imarah dan Ummu Mani' untuk menjadi *naqibah* (wakil kelompok) bagi delegasi Baiat 'Aqabah II. Hak mendapatkan pendidikan medis pun baru dirasakan perempuan AS saat tahun 1850 saat didirikan *Female Medical College of Pennsylvania*. Adapun Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1470 telah memiliki sekolah kedokteran di RS Al-Fatih dan membolehkan perempuan menjadi mahasiswanya. Sebuah risalah abad 15 M berjudul *Cerrahiyet Ul Haniye of Sabuncuoglu* menunjukkan dokter perempuan pada masa Utsmaniyah terlibat dalam operasi pasien perempuan.

Setiap aturan yang diberlakukan Allah SWT menjamin keadilan bagi seluruh manusia. Melaksanakan Islam *kaffah* bukan berarti mengancam kebebasan, bahkan justru menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda dari kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Hakikat kedudukan perempuan dan laki-laki secara syariah adalah setara. Pelaksanaan hak dan kewajiban berlaku seimbang di antara keduanya. Namun, secara fitrah penciptaan, Allah telah membedakan keduanya dalam rangka mengemban misi kehidupan.Perbedaan tersebut diciptakan bukan untuk mendiskriminasikan perempuan, tetapi demi harmonisasi peran masing-masing. Hikmah pembedaan hukum yang berkaitan dengan erempuan sejatinya adalah perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian perempuan, sesuatu yang tidak disadari dan dipahami kaum feminis. Maka dari itu, Islamlah jaminan kelestarian generasi yang tangguh, bebas dari krisis keyakinan dan moralitas. []



Rubrik Tafsir
Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



MEMAKNAI NIKMAT DAN MEMILIH PETUNJUK

(Tafsir QS al-Balad [90]: 7-10)

أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا
وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihat dirinya? Bukankah Kami telah memberi dia dua buah mata, lidah dan dua buah bibir serta telah menunjuki dia dua jalan (QS al-Balad [90]: 7-10).

Dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan mengenai kesalahan persangkaan sebagian manusia. Mereka menyangka tidak ada yang berkuasa atas dirinya. Padahal manusia diciptakan dalam keadaan sempit dan berkeluh-kesah. Realitas tersebut jelas menunjukkan kesalahan nyata persangkaan mereka. Ayat-ayat berikutnya masih membeberkan persangkaan yang salah beserta bantahan terhadapnya.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Ayahsabu an lam yarahu ahad* (Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihat dirinya?). Pengertian *yahsabu* dalam ayat ini, sebagaiamana ayat sebelumnya, bermakna *yazhunnu* (menduga, menyangka).[1] Dijelaskan Ibnu Jarir ath-Thabari, pelakunya adalah orang yang mengatakan dalam ayat sebelumnya: *Ahlaktu mâl[an] lubad[an]* (Aku telah menghabiskan harta yang banyak). Dengan demikian ayat ini memberitakan: *Apakah orang yang mengatakan perkataan tersebut menyangka tidak ada seorang pun yang melihat dia ketika menginfakkan hartanya?*[2] Qatadah menafsirkan ayat ini: *Apakah mereka menyangka Allah tidak melihat dia serta tidak menanyakan tentang hartanya dari mana berasal dan untuk apa dibelanjakan.*[3]

Menurut Ibnu Juzyi al-Kalbi, ayat ini bisa mendustakan perkataan orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya: *Ahlaktu mâl[an] lubad[an]* (Aku telah menghabiskan harta yang banyak) atau mengisyaratkan bahwa orang tersebut menginfakkan hartanya dengan riya'.[4]

Sebagaimana ayat sebelumnya, bentuk *istifhâm* dalam ayat ini juga bermakna *inkâri li al-tawbîkh* (pengingkaran yang berguna sebagai teguran).[5] Artinya, ayat ini menyalahkan dan memberikan teguran kepada orang yang memiliki persangkaan bahwa tidak ada satu pun yang melihat mereka. Pasalnya, Allah Maha Melihat segala perbuatan hamba-Nya, termasuk terhadap mereka (Lihat: QS Ali Imran [3]: 15).

Kemudian dalam ayat selanjutnya dijelaskan tentang berbagai kenikmatan yang dianugerahkan kepada mereka dengan firman-Nya: *Alam naj'al lahu 'aynayni* (Bukankah Kami telah memberi dia dua buah mata). Kata *al-'ayn* dalam konteks ayat inimenunjuk pada organ tubuh tertentu yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dengan organ tersebutlah manusia bisa melihat dan menyaksikan aneka realitas dan fakta dalam alam semesta.

Ditegaskan ayat ini, bahwa Allahlah yang telah menciptakan dua mata untuk manusia. Dijelaskan Wahbah az-Zuhaili, kalimat *istifhâm* dalam ayat ini bermakna *istifhâm taqrîri* (pertanyaan untuk menetapkan), berguna untuk mengingatkan berbagai kenikmatan. Penetapan ini jelas menepis persangkaan salah mereka. Mereka bukan pencipta dua mata tubuh mereka. Mata itu juga tidak menempel dengan sendirinya. Organ sangat penting itu diciptakan Allah SWT.

Tak hanya mata, namun juga: *wa lisân[an] wa syafatayn* (lidah dan dua buah bibir). Kata *al-lisân* menunjuk pada satu organ tubuh tertentu yang memiliki khasiat berbicara. Dengan lisan itu manusia bisa mengungkapkan apa yang dalam pikiran dan hati. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap; bisa merasakan lezatnya aneka makanan dan minuman.[6]

Adapun kata *as-safatayn* berasal dari kata *asy-syafah* (bibir). Kedua bibir tersebut berfungsi untuk membantu manusia dalam berbicara, makan, minum dan meniup;[7] juga untuk memperindah wajah dan mulutnya.[8]

Semua itu menunjukkan besarnya kekuasaan Allah SWT atas manusia. Jika Allah SWT berkuasa membuat semua organ tubuh manusia tersebut, maka Dia juga berkuasa atas manusia dan mengetahui semua tindak-tanduk manusia. Ayat tersebut sekaligus mengingatkan manusia tentang besarnya kenikmatan yang telah mereka terima.

Kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya: *Wa hadaynânhu an-najdayn* (dan Kami telah menunjukkan kepada dia dua jalan). Pada asalnya, kata *an-najd* berarti *al-makân al-murtafi'* (tempat yang tinggi). Bentuk jamaknya *an-nujûd*. Dinamakan *an-najd* karena jalan tersebut naik atau mendaki setelah ada penurunan. Oleh karena itu, makna *an-najdâyn* adalah *ath-tharîqâni al-'âliyâni* (jalan yang tinggi, mendaki).[9] Dipaparkan Fakhruddin ar-Razi, seolah-olah tatkala berbagai petunjuk itu telah terang, maka petunjuk tersebut dijadikan seperti jalan yang mendaki tinggi. Sebab, petunjuk tersebut amat jelas bagi akal sebagaimana layaknya jalan yang mendaki tinggi bagi penglihatan. Ini merupakan penafsiran para mufassir mengenai *an-najdyn*, yakni dua jalan, *sabîla al-khayr wa a-syarr* (kebaikan dan keburukan).[10]

An-Najdayn dalam ayat ini yang berarti *ath-tharîqayn* (dua jalan) juga dikemukakan banyak mufassir seperti al-Qurthubi, az-Zamakhsyari, Ibnu Katsir, an-Nasafi, al-Baghawi, Ibnu Juzyi, dan lain-lain. Maknanya adalah *tharîq al-khayr wa asy-syarr* (kebaikan dan keburukan).[11] Demikian juga menurut Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ali, Ibnu 'Abbas, Mujahid, Ikrimah, Abu Wail, Abu Shalih, Muhammad bin Kaab dan 'Atha' al-Khurasani.[12]

Dengan demikian pengertian ayat ini, sebagaimana dinyatakan az-Zujjaj, adalah: *Bukankah Kami telah menerangkan kepada dia jalan kebaikan dan jalan keburukan, sebagaimana jelasnya dua jalan yang tinggi.*[13]

Menurut al-Qurthubi ayat ini bermakna: *Kami menjelaskan dua jalan tersebut kepada dia dengan mengutus para rasul.*[14]

Memahami Nikmat dan Petunjuk Penggunaannya

Di antara perkara penting yang dikandung ayat-ayat ini adalah bantahan telak terhadap persangkaan sebagian manusia, yakni bantahan terhadap persangkaan bahwa tidak ada satu pun yang melihat perbuatan mereka.

Persangkaan tersebut jelas salah besar. Mungkin ketika melakukan suatu perbuatan, manusia bisa menyembunyikannya dari penglihatan orang lain. Akan tetapi, mustahil manusia bisa menghindar dari penglihatan Allah SWT. Di mana pun manusia berada, Allah SWT senantiasa mengawasi perbuatan mereka (Lihat: QS al-Mujadilah [58]: 7).

Ayat-ayat ini juga telah memberikan bantahan atas persangkaan salah mereka dengan argumentasi yang telak dan tak terbantahkan. Bukankah mata yang melekat pada tubuh mereka dan berguna sebagai indera penglihat diciptakan Allah SWT? Jika Allah SWT berkuasa menciptakan mata buat mereka sehingga mereka bisa melihat, bagaimana mungkin Dia tidak berkuasa melihat semua tingkah-polah mereka?

Dengan mata itu pula, seharusnya manusia bisa menyaksikan dengan jelas berbagai tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT di alam semesta. Alam semesta beserta isinya yang serba teratur, namun lemah dan terbatas jelas membutuhkan al-Khaliq yang menciptakan dan mengaturnya. Semua itu tak mungkin ada dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan dan mengaturnya. Maka dari itu, penglihatan manusia tersebut bisa mengantarkan manusia untuk beriman kepada-Nya. Itulah yang semestinya dilakukan dengan mata mereka.

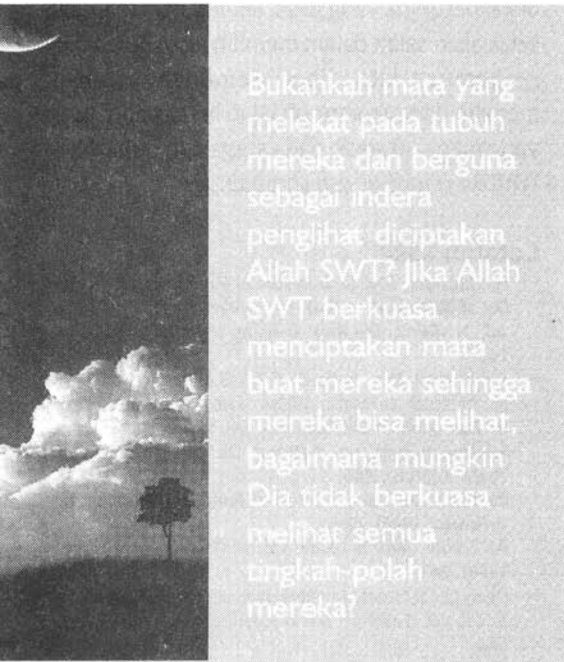
Ayat-ayat ini juga mengingatkan keberadaan organ tubuh penting lainnya, yakni lidah dan dua bibir. Keduanya juga diciptakan Allah SWT untuk manusia. Dengan kedua organ tersebut manusia bisa mengungkapkan kesan dan kesimpulan dari apa yang dilihat oleh matanya, juga mengungkapkan semua hal yang terpikir dalam akalnya dan terlintas dalam benaknya. Ini merupakan kelebihan yang menjadi ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Meskipun hewan di sekitarnya juga memiliki lidah dan dua bibir, namun organ tersebut tidak bisa digunakan untuk berbicara. Kedua organ



tersebut juga berguna sebagai indera pengecap yang dapat merasakan lezatnya aneka makanan dan menjadi pelengkap keindahan tubuh manusia. Sungguh, ini merupakan kenikmatan terkira buat manusia.

Realitas itu seharusnya memudahkan manusia untuk beriman dan bersyukur kepada Allah SWT. Keimanan itu melahirkan ketundukan terhadap semua perintah dan larangan-Nya. Adapun bersyukur atas anugerah kenikmatan-Nya diwujudkan dengan

mempergunakannya sesuai dengan petunjuk-Nya. Untuk itu, manusia tidak perlu repot dan bingung. Sebab, Allah SWT telah memberikan petunjuk yang terang, jelas dan gamblang. Dalam ayat ini ditegaskan: *Wa hadaynâhu al-najdayn* (dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan). Pengertian *an-najd* adalah jalan naik dan mendaki setelah ada penurunan. Dengan demikian, dua jalan tersebut amat terang dan jelas sehingga memudahkan manusia dalam dalam memilih yang dia kehendaki.



Sebagaimana telah dipaparkan, dua jalan yang dimaksud adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan; jalan yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesengsaraan; jalan *al-fujûr* dan *al-taqwâ*, seperti disebutkan dalam QS al-Syams [91]: 8; juga sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

Sesungguhnya Kami telah menunjuki dia jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir (QS al-Insan [76]: 3).

Tatkala manusia dikaruniai mata untuk melihat, disertakan pula petunjuk penggunaannya. Apabila digunakan di jalan takwa, seperti belajar, membaca al-Quran, menuntunnya untuk melakukan jihad dan amal shalih lainnya, maka mata tersebut dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Sebaliknya, apabila mata itu digunakan di jalan kemaksiatan, seperti melihat perkara yang diharamkan, maka itu bisa mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Abu Raihanah ra. Menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ
وحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ،
قَالَ: وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ سَمِعْتُ بَعْدُ
أَنَّهُ قَالَ: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ غَضَّتْ عَنْ
مَحَارِمِ اللَّهِ، أَوْ عَيْنٍ فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ».

"Neraka diharamkan atas mata yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Neraka diharamkan atas mata yang tidak tidur di jalan Allah." Abu Raihanah berkata, "Aku lupa yang ketiganya." Abu Syuraih berkata, "Saya mendengar setelah itu beliau bersabda, 'Neraka diharamkan atas mata yang berpaling dari segala yang diharamkan Allah atau mata yang tercukil di jalan Allah.'" (HR Ahmad al-Hakim).

Demikian pula dengan lidah dan dua bibir. Kedua organ tubuh tersebut juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya. Apabila digunakan di jalan ketakwaan seperti berzikir, membaca al-Quran, berdakwah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, amar makruf nahi munkar dan perkataan baik lainnya, maka itu

dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Demikian pula dengan perkataan yang benar (*kalimah haqq*) yang disampaikan kepada penguasa zalim. Nabi saw menyebut itu sebagai *afdhal al-jihâd* (jihad yang paling utama) dan pelakunya yang terbunuh sebagai *sayyid al-syuhadâ'* (penghulu para syahid).

Namun sebaliknya, organ tersebut juga dapat menggelincirkan pelakunya ke dalam neraka apabila digunakan di jalan kemaksiatan, seperti berdoa kepada selain Allah, berdusta, bersaksi palsu, *ghibah*, memecah-belah umat Islam, dan merusak kehormatan seorang Muslim; juga ketika digunakan untuk mempropagandakan ide-ide kufur seperti sekularisme, kapitalisme, liberalisme, demokrasi, pluralisme, dan lain-lain. Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»

Sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah, dia tidak menganggapnya penting; dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkannya beberapa derajat. Sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah, dia tidak menganggapnya penting; dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka Jahanam **(HR al-Bukhari dari Abu Hurairah).**

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan makna "dia tidak menganggapnya penting", yaitu dia tidak memperhatikan dengan pikirannya, tidak memikirkan akibat perkataannya, serta tidak menduga bahwa kalimat itu akan mempengaruhi sesuatu.[15]

Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati dalam menggunakan lidah. Rasulullah saw. pernah ditanya oleh Sufyan bin Abdullah al-Tsaqafi, *"Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?"*. Beliau memegang lidah beliau sendiri, lalu bersabda, *"Ini."* (HR al-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Tak hanya menurunkan petunjuk bagi mata, lidah dan bibir manusia. Allah SWT telah memberikan petunjuk lengkap bagi manusia dalam menempuh kehidupannya. Dengan bekal petunjuk yang jelas, semestinya manusia tidak akan salah dalam memilih jalan hidupnya.

Semoga kita diberi kemudahan untuk memilih dan menempuh jalan ketakwaan, jalan yang mengantarkan pada surga dan ridha-Nya. *WalLâh a'lam bi ash-shawâb.* ▯

Catatan kaki:

1. Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 20 (Kairo: Dar al-Mishriyyah, 1964), 64; ar-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 31 (Beirut: Dar Ihyâ' at-Turats al-'Arabi, 1420 H), 167.
2. Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24 (tt: Muassah ar-Risalah, 2000), 436.
3. Ar-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 31, 167; al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzil*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1420 H), 255.
4. Ibnu Juzyi, *At-Tas-hîl li 'Ulûm at-Tanzil*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Arqam, 1996), 484.
5. Az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 30 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 243.
6. Lihat: QS al-Nasafi, *Madârik at-Tanzîl wa Haqâ'iq at-Ta'wîl*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kalam ath-Thayyib, 1998), 644.
7. Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 775.
8. Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 393.
9. Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 540.
10. Ar-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 31, 167.
11. Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 20, 65; Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, vol. 4, 775; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 393; an-Nasafi, *Madârik at-Tanzîl wa Haqâ'iq at-Ta'wîl*, vol.3, 644; al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzîl*, vol. 5, 256; Ibnu Juzyi, *at-Tas-hîl li 'Ulûm at-Tanzîl*, vol. 2, 484.
12. Ar-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 31, 167; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 393.
13. Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 540.
14. Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 20, 65.
15. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fat-h al-Barri*.



HAK MEMILIH DAN MEMBAIAT KHALIFAH

Muhammad Bajuri

Pengantar

Sistem pemerintahan Islam tegak di atas empat pilar, di antaranya adalah "*as-sulthân li al-ummah* (kekuasaan berada di tangan rakyat)". Berdasarkan penelitian dan pengkajian mendalam atas hukum-hukum syariah dan realitas politik dalam kehidupan Islam, diketahui bahwa pengangkatan seorang kepala negara (khalifah) tidak sah kecuali melalui kehendak (baiat) dari umat (rakyat). Artinya, rakyat yang memilih dan membaiat seseorang hingga ia menjadi khalifah yang wajib ditaati dan dijaga dari pihak-pihak lain yang hendak merebut kekuasaan darinya. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ»

Siapa saja yang telah membaiat seorang imam/khalifah, lalu memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, hendaklah ia menaati khalifah itu selama masih mampu. Kemudian jika datang orang lain yang akan merebut kekuasaannya maka penggallah leher orang itu (HR Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah mendapatkan kekuasaan (baiat) dari rakyat wajib ditaati, sebab ia adalah seorang khalifah yang telah dibaiat. Hadis ini adalah dalil yang jelas bahwa "*kekuasaan berada di tangan rakyat*" (An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, hlm. 112; Khalidi, *Qawâid Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, hlm. 97). Dengan kekuasaan yang berada di tangannya ini, rakyat bisa memilih dan membaiat siapa saja yang mereka kehendaki.

Lalu siapa saja dari umat (rakyat) dalam negara Islam yang memiliki hak untuk memilih khalifah dan membaiatnya?

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (*Masyrû' Dustûr*) Negara Islam Pasal 26, yang berbunyi: "*Setiap Muslim*

yang balig dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih dan membaiat khalifah. Sebaliknya, orang-orang non-Muslim tidak memiliki hak pilih." (An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, hlm. 126).

Rakyat Dalam Negara Islam

Rakyat dalam Negara Islam adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat *at-tâbi'iyah*, yaitu loyal terhadap negara dan sistem. Dengan demikian siapa saja yang berada dalam wilayah kekuasaan Negara Islam dan telah memenuhi ketentuan *at-tâbi'iyah* berhak mendapatkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dirinya, baik ia Muslim maupun non-Muslim (An-Nabhani, *Ad-Dawlah al-Islâmiyah*, hlm. 140).

Rakyat dalam Negara Islam dibagi menjadi dua, yaitu Muslim dan non-Muslim. Rakyat non-Muslim inilah yang kemudian dalam istilah ulama fikih dikenal dengan sebutan *ahludz-dzimmah*, yaitu orang-orang non-Muslim yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara Islam, dan mereka ini berjanji untuk loyal serta taat terhadap negara, baik mereka lahir di dalam wilayah kekuasaan Negara Islam atau mereka datang dari luar, kemudian ia meminta untuk dijadikan sebagai rakyat Negara Islam (Al-Maududi, *Nadzariyah al-Islâm wa Hadîhi fi as-Siyâsah wa al-Qânûn wa ad-Dustûr*, hlm. 302).

Penamaan rakyat non-Muslim dengan *ahludz-dzimmah* ini bermakna bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki jaminan keamanan, sebab mereka berada dalam perlindungan Rasulullah saw. dan jaminan keamanan dari kaum Muslim, yakni mereka mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan selamanya dari Rasulullah saw. dan kaum Muslim (al-Ayid, *Huqûq Ghayr al-Muslimîn fi Bilâd al-Islâm*, hlm. 10).

Dengan demikian, penamaan rakyat non-Muslim dengan sebutan *ahludz-dzimmah* ini adalah bentuk penghormatan, bukan penghinaan atau pelecehan seperti yang selama ini tertanam dalam pikiran sebagian orang (Ath-Thayyar, *Huqûq Ghayr al-Muslimîn fi ad-Dawlah al-Islâmiyah*, hlm. 48).

Dalam kitab *Al-Amwâl* karya Abu Ubaid dikutip pernyataan Imam Auza'i—*rahimahullah*—yang berkata dalam suratnya kepada seorang wali Abbasiyin, Shalih bin Ali bin Abdullah bin Abbas tentang kedudukan *ahludz-dzimmah*: *"Mereka itu bukanlah budak, namun mereka adalah orang-orang merdeka dari ahludz-dzimmah."* (Al-Ayid, *Huqûq Ghair al-Muslimîn fi Bilâd al-Islâm*, hlm. 11). Artinya, mereka non-Muslim adalah rakyat Negara Islam juga sehingga mereka berhak mendapatkan hak-haknya dan wajib diperlakukan sama seperti halnya kaum Muslim.

Hak Memilih dan Membaiat Khalifah

Rakyat Negara Islam yang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih dan membaiat khalifah, seperti yang termaktub dalam Rancangan UUD (*Masyrû' Dustûr*) Negara Islam Pasal 26, bahwa *"Setiap Muslim yang balig dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih dan membaiat khalifah."*

Dalil dalam hal ini adalah: *Pertama*, hadis dari Ubadah Bin Shamit yang berkata:

«بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ»

Kami telah membaiat Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan menaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun tidak kami senangi; dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin; juga agar kami menegakkan atau

mengatakan yang haq di manapun kami berada dan kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela (HR al-Bukhari).

Kedua, hadis dari Ummu 'Athiyah yang berkata:

«بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا»

Kami membaiat Rasulullah saw., lalu beliau memerintahkan kepada kami, "Jangalah kalian menyekutukan Allah dengan apapun." Beliau pun melarang kami melakukan "niyahah" (histeris menangisi mayat). Karena itulah seorang wanita dari kami menarik tangannya (dari berjabat tangan) lalu wanita itu berkata, Seseorang (perempuan) telah membuat diriku bahagia dan aku ingin (terlebih dulu) membalas jasanya." Ternyata Rasulullah saw. tak berkata apa-apa. Lalu wanita itu pergi kemudian kembali lagi dan membaiat beliau." (HR al-Bukhari).

Ketiga, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah* bahwa Abdurrahman bin Auf mengambil pendapat kaum laki-laki dan perempuan ketika ia ditugasi untuk mengambil pendapat kaum Muslim tentang siapa yang akan menjadi khalifah—setelah Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Wafat. Dalam hal ini tidak ada seorang Sahabat pun yang mengingkari perbuatan Abdurrahman bin Auf tersebut (An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, hlm. 126).

Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil di atas, setiap Muslim yang balig dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih dan membaiat khalifah.

Non-Muslim dan Hak Baiat

Islam merupakan syarat utama keabsahan baiat. Sebab, baiat ini dilakukan untuk menegakkan Islam berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.. Hal ini jelas mengharuskan keimanan terhadap keduanya. Non-Muslim tentu tidak mengimani keduanya. Seandainya mereka beriman, tentu mereka Muslim. Oleh karena itu mereka tidak berhak membaiat khalifah (An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, hlm. 126).

Selain itu, kalau non-Muslim memiliki hak untuk membaiat khalifah maka—tidak menutup kemungkinan—mereka akan memberikan baiatnya kepada orang yang mau dengan persyaratannya. Dengan begitu mereka bisa memilih penguasa yang memberi mereka jalan untuk menguasai orang-orang yang beriman. Ini jelas haram menurut syariah karena Allah SWT berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin (QS Al-Nisa' [4] : 141).

Oleh karena itu, menjadikan pelaksanaan akad Khilafah ada di tangan non-Muslim merupakan jalan (peluang) terbesar bagi mereka untuk menguasai orang-orang beriman. Penggunaan huruf *lan* (sekali-kali tidak akan) yang memberi pengertian *ta'bîd* (selamanya) adalah indikasi larangan tegas untuk tidak memberikan kekuasaan atau jalan bagi orang kafir untuk mengontrol kaum Muslim, baik itu berupa pemberian hak pelaksanaan akad Khilafah atau lainnya. Dengan demikian, non-Muslim atau *ahludz-dzimmah*—sekalipun mereka bagian dari rakyat dalam Negara Islam—tidak memiliki hak

memilih dan membaiat khalifah (Khalidi, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, hlm. 97).

Tidak adanya hak memilih dan membaiat khalifah bagi non-Muslim tidak berarti bahwa mereka adalah warga negara kelas dua yang harus tunduk dan patuh pada institusi Khilafah semata. Justru ketika non-Muslim diberikan hak tersebut, sama artinya dengan memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka yakini. Ini sama sekali bukan karateristik Negara Islam yang menjamin semua wagra negaranya untuk menjalankan apa saja yang menjadi keyakinannya, dan bukan memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka yakini (Asy-Syarif, *Wadh' al-Aqalliyât fi ad-Dawlah al-Islâmiyah*, hlm. 19). Jadi, tuduhan bahwa non-Muslim hanya menjadi warga negara kelas dua dalam Negara Islam adalah tuduhan yang muncul dari dua kemungkinan saja, yaitu kebodohan dan kebencian terhadap Islam.

Sebaliknya, tidak sedikit penulis Barat yang memuji keadilan Negara Islam terhadap rakyat non-Muslim atau *ahludz-dzimmah*. Di antaranya, seorang sejarahwan berkebangsaan Inggris, Sir Thomas Arnold dalam bukunya, *The Preaching of Islam (Dakwah Islam)*, menulis, "*Sungguh ketika kaum Muslim berkuasa, mereka memperlakukan kaum Kristen Arab dengan toleransi yang tiada duanya sejak abad pertama Hijrah. Toleransi ini terus berlangsung selama berabad-abad lamanya. Karena itu, kami yakin bahwa orang-orang Kristen yang memeluk Islam benar-benar telah memeluk Islam atas pilihan dan kesadarannya sendiri. Orang-orang Kristen Arab yang hidup di antara komunitas kaum Muslim di zaman kita sekarang ini benar-benar merasakan toleransi yang luar biasa.*"

Will Durant juga mengatakan, "*Sungguh ahludz-dzimmah dari kaum Kristen, Zoroaster, Yahudi dan Shabiin pada masa Kekhalifahan Umayah benar-benar menikmati toleransi yang tiada bandingannya. Kami tidak menemukan bandingannya di dalam negara Kristen pada masa sekarang. Dalam Negara Islam, ahludz-dzimmah memiliki kebebasan untuk menjalankan simbol-simbol agama mereka serta menjaga gereja-gereja dan sinagog-sinagog mereka.*" (Bahir Shalih, "*Ahl adz-Dzimmah fi Zhilli Dawlah al-Islâm Ahkâmân wa Wâqi'ân*," *http://www.pal-tahrir.info*, 18/3/2012).

Dengan demikian, Pasal 26 Rancangan UUD (*Masyrû' Dustûr*) Negara Islam ini merupakan sebuah penegasan bahwa Negara Islam tidak akan memaksakan rakyat non-Muslim untuk melakukan apa yang tidak mereka yakini. Sebab, Negara Islam adalah negara yang memiliki akidah dan misi. Misinya tidak terbatas hanya pada menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi setiap rakyatnya, namun juga kewajiban beraktivitas sesuai dengan akidah dan menyampaikan risalah Islam kepada semua orang. Sungguh, tugas besar seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang beriman dengan misi Islam, yakni warga negara yang Muslim saja, bukan non-Muslim. *WalLâhu a'lam bish-shawâb.* []

Daftar Bacaan

Al-Ayid, Prof. Dr Shalih bin Husain, *Huqûq Ghayr al-Muslimîn fi Bilâd al-Islâm* (Riyadh: Departemen Urusan Islam, Waqaf dan Dakwah), Cetakan IV, 2008.

Bahir Shalih, "*Ahludz Dzimmah fi Zhilli Dawlah al-Islâm Ahkâm[ân] wa Wâqi['ân]*," *http://www.pal-tahrir.info*, 18/3/2012.

Al-Khalidi, Dr. Mahmud, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukm fil Islâm* (Beirut: Maktabah al-Muhtasib), Cetakan II, 1983.

An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan II, 2009.

An-Nabhanai, Asy-Syaikh Taqiyuddih, *Ad-Dawlah al-Islâmiyah* (Beirut: Darul Ummah), Cetakan VII, 2002.

Al-Maududi, Abu A'la, *Nazhariyah al-Islâm wa Hadihi fi as-Siyâsah wa al-Qânûn wa ad-Dustûr* (Damaskus: Dar al-Fikr), 1968.

Ath-Thayyar, Dr. Ali bin Abdurrahman, *Huqûq Ghayr al-Muslimîn fi ad-Dawlah al-Islâmiyah* (Riyadh: Departemen Urusan Islam, Waqaf dan Dakwah), Cetakan II, 2006.



MENIPU RAKYAT LEWAT WACANA SUBSIDI BBM

Dr. Arim Nasim, M.Si., Ak.

Sebuah drama bernama Sidang Paripurna DPR tanggal 31 Maret 2011 telah berakhir. DPR telah berhasil memainkan drama untuk meloloskan keinginan para kapitalis asing/lokal dan menyenangkan sementara waktu rakyat karena kenaikan harga BBM ditunda, tidak jadi tanggal 1 April 2012. DPR mengesahkan Pasal 7 ayat 6a APBN-P yang berbunyi: ...*memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.*

Pengesahaan Pasal 7 ayat 6a ini esensinya adalah pengokohan dan penyempurnaan liberalisasi migas. Padahal sengkarut pengelolan migas di Indonesia sumbernya adalah UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang *draft*-nya dibuat oleh para kapitalis asing melalui *USAID*. Ini sesuai dengan pengakuannya: *USAID telah membantu pembuatan draft UU Migas yang diajukan ke DPR pada Oktober 2000. UU tersebut akan meningkatkan kompetisi dan efisiensi dengan mengurangi peran BUMN dalam melakukan eksplorasi dan produksi).*

Sebagian pasalnya, yaitu Pasal 28 ayat 2 berbunyi, *"Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan."* telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, ia disahkan kembali oleh Pemerintah melalui Perpres No. 5 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional, yang dalam Pasal 3c disebutkan: *Penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian...*

Dengan demikian, keberadaan Pasal 7 ayat 6a yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu adalah untuk memperkuat kebijakan Pemerintah dalam menyempurnakan liberalisasi migas baik di sektor hulu yang sudah berhasil dikuasai asing dan swasta dengan hasil 87% maupun sektor hilir dengan menyerahkan harga ke mekanisme pasar. Keputusan ini semakin mengokohkan keberadaan DPR yang selalu membuat UU yang yang pro asing dan khianat terhadap rakyat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 6a Pemerintah mendapat kewenangan untuk menaikkan harga mendekati harga pasar. Agar kenaikan harga BBM tersebut seolah-olah pro rakyat dibuatlah

alasan-alasan untuk meyakinkan bahwa kenaikan BBM untuk kepentingan rakyat.

Alasan-alasan di bawah ini yang sering dikemukan oleh Pemerintah untuk menaikkan BBM.

1. Subsidi membuat APBN jebol.

Subsidi baik BBM maupun subsidi lainnya sering dirasakan memberatkan Pemerintah dan menjadi beban APBN karena menyedot alokasi APBN. Padahal istilah *subsidi* BBM itu masih dipertanyakan. Benarkah Pemerintah selama ini memberikan subsidi atau sebaliknya justru rakyat yang memberikan subsidi untuk Pemerintah dan kepentingan para kapitalis? Menurut Pemerintah, kenaikan harga minyak dunia saat ini mengakibatkan anggaran subsidi BBM naik sekitar Rp 47 triliun, yaitu dari Rp 123 T menjadi Rp.170 T. Namun, pemasukan Pemerintah juga naik sekitar Rp 39 T dari Rp 231 T menjadi Rp 270 T. Artinya, beban subsidi itu hanya meningkat sekitar Rp 8 T. Menurut versi lain, yang terjadi sebenarnya bukan subsidi yang meningkat bahkan sebenarnya susbsidi itu tidak ada. Yang terjadi adalah berkurangnya pemasukan Pemerintah karena kenaikan harga minyak dunia. Berdasarkan perhitungan versi ini Pemerintah masih menerima kelebihan uang tunai sebesar Rp 97,9 T, yaitu dari hasil Penjualan BBM yang dilakukan oleh Pemerintah sebesar Rp 224,5 T dikurangi alokasi "subsidi" sebesar Rp 126,6 T. Karena itu, alasan menaikkan harga BBM karena subsidi membengkak atau membuat APBN jebol adalah bohong. Sebab, dalam konsep ekonomi kapitalis masalahnya bukan besar-kecilnya subsidi, tetapi secara konsep sistem ekonomi kapitalis memang "mengharamkan keberadaan subsidi", berapapun besarnya. Kebijakan ini tertuang dalam *Blue Print* Pengembangan Energi Nasional 2006-2025 Kementerian ESDM, yang salah satu program utamanya adalah *rasionalisasi harga BBM* (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga internasional. Program kerja ini sesuai dengan *Konsesus Washington* yang disepakati oleh Pemerintah terkait dengan penghapusan subsidi, khususnya di sektor energi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Pemerintah melalui Wakil Presiden Boediono yang menargetkan dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, Indonesia akan terbebas dari dikotomi harga BBM bersubsidi dan harga keekonomian. Pernyataan ini berarti dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun ke depan harga BBM akan sama dengan harga pasar atau internasional.

Namun ingat, subsidi itu "haram" hanya untuk kepentingan rakyat seperti subsidi BBM, listrik dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebaliknya, untuk menyelamatkan para kapitalis dari kebangkrutan hukumnya menjadi "wajib". Kebijakan subsidi untuk para kapitalis ini bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai penganut neoliberal, tetapi juga dilakukan oleh Pemerintahan AS sebagai "Mbahnya" Kapitalisme. Misalnya, untuk menyelamatkan perbankan dari kebangkrutan, Pemerintahan AS di bawah Presiden Obama telah mengeluarkan bantuan atau *bailout* atau subsidi mencapai total 700 miliar dolar. Padahal bank-bank tersebut kebanyakan milik swasta. Pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang sama; memberikan subsidi untuk orang kaya atau perusahaan asing dari mulai subsidi pajak atau yang disebut dengan *Tax Holiday*, Subsidi BLBI yang besarnya Rp 144 triliun, Dana Rekapitulasi Perbankan yang hampir Rp 500 triliun, penyelamatan Bank Century yang menghabiskan dana Rp 6,7 triliun. Kasus yang paling akhir adalah Bantuan Dana dari APBN-P Tahun 2012 sebanyak 1,3 T untuk korban Lumpur Lapindo yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan tetapi diambil alih atau disubsidi oleh Pemerintah. Padahal Pemilik Grup Lapindo adalah salah satu dari 40 orang

terkaya di Indonesia. Namun, dia dengan enaknya mendapat bantuan atau subsidi dari negara melalui APBN yang digelontorkan untuk kasus Lapindo sejak tahun 2007 sampai saat ini sudah mencapai Rp 7, 2 T.

2. *Subsidi tidak tepat sasaran.*

Agar kebijakan pengurangan subsidi ini kelihatan pro rakyat miskin, Pemerintah menggunakan alas an: subsidi BBM tidak tepat sasaran karena sebagian besar subsidi dinikmati oleh orang-orang kaya. Alasan ini sebenarnya alasan yang disarankan oleh World Bank ketika memaksa Pemerintah untuk menghapus subsidi. Ini terungkap dalam dokumen World Bank: " *Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasi-kan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik...Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya*" (*Indonesia Country Assistance Strategy*/ World Bank, 2001).

Padahal faktanya, berdasarkan data Susenas 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, 65 persen BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kalangan menengah bawah dengan pengeluaran perkapita di bawah 4 dolar AS dan kalangan miskin dengan pengeluaran perkapita di bawah 2 dolar AS. Lalu 27 persen digunakan kalangan menengah, 6 persen kalangan menengah atas dan hanya 2 persen kalangan kaya. Data Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menyebutkan, kuota BBM bersubsidi tahun 2010 sekitar 36,51 juta kiloliter (KL), dengan rincian premium 21,46 juta KL, solar 11,25 juta KL dan minyak tanah 3,8 juta KL. Konsumsi Premium, 40% untuk sepeda motor, 53% untuk mobil pribadi plat hitam dan 7% untuk angkutan umum. Seandainya 50% dari mobil pribadi digunakan untuk kegiatan usaha UMKM maka sebesar 74% premium bersubsidi dinikmati oleh rakyat menengah bawah.

Kasus orang kaya seperti pemilik Toyota *Alphard* yang menggunakan premium mungkin dianggap mengusik rasa keadilan. Namun, perlu diingat mereka juga memiliki kontribusi dalam membayar pajak karena kita ketahui dengan sistem ekonomi kapitalis pendapatan negara terbesar adalah pajak. Dalam APBN-P 2012 total penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 1.101 T atau sekitar 82% dari total penerimaan APBN. Yang terbesar dari pajak tersebut adalah PPh (pajak penghasilan) non-migas sebesar Rp 445,7 T dan PPN sebesar Rp. 355,2 T. Orang kaya jelas memiliki kontribusi dalam membayar pajak tersebut. Karena itu, alasan subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya saja sebenarnya hanya untuk menarik simpati masyarakat seolah-olah Pemerintah itu pro rakyat. Padahal kalau benar Pemerintah pro rakyat, terutama rakyat miskin, mengapa dalam kasus Lumpur Lapindo yang seharusya menjadi tanggung jawab perusahaan, Pemerintah dengan "ikhlasnya" mensubsisdi Rp 1,3 T tahun ini atau total menjadi 7,2 T. Padahal penerima bantuan/ subsidi tersebut adalah pemilik perusahaan yang masuk dalam kategori 40 orang terkaya di Indonesia. Ironisnya, grup perusahaan tersebut sempat menunggak atau menggelapkan pajak.

3. *Pengurangan subsidi untuk kesehatan APBN dan fiskal.*

Sebenarnya alasan ini sama seperti alasan sebelumnya, bahwa subsidi membebani APBN sehingga akan mengganggu kesehatan fiskal dalam bentuk peningkatan defisit APBN. Cuma, yang harus juga dipahami, penyehatan fiskal bisa dilakukan bukan hanya dari aspek pengeluaran subsidi. Penyehatan fiskal bisa dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan pendapatan Negara, atau melakukan efesiensi dan efektivitas pengeluaran APBN baik untuk belanja rutin maupun belanja

modal. Dari sisi penerimaan banyak potensi negara yang hilang karena kebijakan Pemerintah yang tidak serius. Misal, menurut anggota BPH Migas, A. Qoyum Tjandranegara, potensi kerugian negara tahun 2006-2009 mencapai 410,4 T karena harga jual gas yang dijual ke Cina sangat murah sekali. Belum lagi ditambah kerugian tak langsung akibat PLN tidak bisa mendapat gas karena dijual ke luar negeri. PLN harus memakai BBM yang harganya mahal sehingga PLN harus melakukan pemborosan biaya sekitar Rp 37 triliun dalam jangka waktu 2 tahun yang lalu.

Padahal salah satu yang membuat APBN Indonesia tidak sehat adalah utang, baik SUN maupun utang luar negeri. Hampir 25% setiap tahun anggaran negara digunakan untuk membayar bunga uatng maupun pokoknya. Walaupun dari sisi total rasio utang Indonesia terhadap Gross Domestic Product (GDP) sekitar 30 persen relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, Indonesia sudah masuk perangkap *debt trap* (jeratan utang). Misalnya, dalam APBN-P sudah ditetapkan defisit sekitar Rp 190,1 triliun atau 2,23% dengan rencana akan ditutupi dari pembiayaan (utang) dalam negeri sebesar Rp 194,5 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar minus Rp 4,4 triliun (artinya total pinjaman LN berkurang Rp 4,4 triliun). Ternyata jumlah itu habis dan tidak cukup untuk membayar cicilan utang. Pada tahun 2012 besarnya cicilan utang mencapai Rp 261,1 triliun (cician pokok Rp 139 triliun dan cicilan bunga Rp 122,13 triliun). Jadi seluruh utang yang ditarik di tahun 2012 sebenarnya bukan untuk membiayai pembangunan tetapi untuk membayar cicilan utang. Itu pun belum cukup dan harus mengurangi alokasi APBN yang seharusnya bisa untuk membiayai pembangunan.

4. *Subsidi akan dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan.*

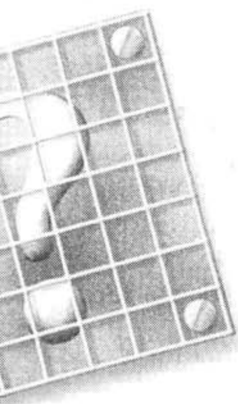
Salah satu alasan yang juga sering muncul ketika Pemerintah akan menaikkan BBM adalah pernyataan bahwa subsidi akan dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan. Padahal sejak masa Pemerintahan SBY saja sudah tiga kali terjadi kenaikan BBM, yakni dimulai waktu harga BBM bersubsidi Rp 2100 naik menjadi Rp 2500, lalu dari Rp 2500 menjadi Rp 4500 pada tahun 2005, kemudian puncaknya pada tahun 2007 harga BBM bersubsidi bersubsidi menjadi Rp 6000.

Ironisnya, biaya pendidikan dan kesehatan tetap mahal. Sedih dan miris sekali rasanya ketika ada seorang nenek tua renta yang sedang mengemis bersama kedua cucunya. Saat ditanya mengapa nenek tersebut mengemis, beliau menjawab karena terpaksa; terpaksa demi menyokong biaya sekolah bagi kedua cucunya yang masih SD itu. Beliau menuturkan walau sudah dibantu dana BOS, tetap saja ditarik biaya lain-lain oleh sekolah, semisal biaya LKS, uang perpisahan dan lain-lain.

Begitu juga biaya pendidikan tingkat SMA. Seperti di salah satu SMA Negeri di pinggiran Jakarta Timur, siswa baru harus membayar uang pangkal yang disebut IPDB (iuran peserta didik baru) hingga Rp 3,6 juta dan iuran bulanan yang dulu disebut SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) Rp 200 ribu. Apalagi untuk sekolah yang kategori SMA Negeri favorit; biaya yang harus dibayar lebih tinggi: IPDB Rp 12,5 juta dan iuran bulanan Rp 400 ribu.

Biaya kesehatan juga tetap mahal. Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengakui jika biaya kesehatan di Indonesia kian hari kian mahal. Pernyataan ini diungkapkan saat memberi sambutan dalam peringatan Hari Lanjut Usia (Lansia) Internasional. []

Penulis adalah Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam FPEB Universitas Pendidikan Indonesia.



MUDHARABAH

اَلْمُضَارَبَةُ

Al-Fairuz Abadi di dalam *al-Qâmûs al-Muhîth* mengatakan: *Mudhârabah* secara bahasa: *al-mudhârabah* dari *dharaba*: *dharabat ath-thayru tadhribu*: pergi mencari rezeki; *dharaba fi al-ardhi dharb[an] wa dharbân[an]*: keluar berdagang atau berperang, atau bergegas atau pergi.

Dharaba fi al-ardhi bermakna safar (bepergian) seperti dinyatakan dalam QS an-Nisa' [4]: 101. Adakalanya bepergian itu untuk mencari rezeki (QS al-Muzammil [73]: 20).

Menurut Ibn Manzhur di dalam *Lisan al-'Arab*, kata *mudharib* digunakan untuk menyebut *al-âmil*, sebab dialah yang bepergian, datang dan pergi mencari rezeki. *Mudhârabah* adalah istilah penduduk Irak dan lebih banyak digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali. Penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan *qirâdh* atau *muqâradhah*, yang lebih banyak digunakan oleh ulama mazhab Syafii dan Maliki.

Secara istilah, *mudhârabah* atau *qirâdh*, adalah persekutuan badan dengan harta. Maknanya, seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain agar orang lain itu membisniskan harta tersebut dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi kepada mereka sesuai dengan kesepakatan (Lihat, an-Nabhani, *Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*, hlm. 156; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 134-135). Badan tersebut adalah kiasan dari tenaga yang menjadi andil salah satu pihak dalam *mudharabah* tersebut.

Mudharabah itu bisa dalam tiga bentuk. *Pertama*: *mudharib* ikut andil modal ditambah modal dari *syarik* (mitra) lainnya. *Kedua*: *mudharib* hanya andil tenaga, sementara modal dari *syarik* lainnya, misal antara satu orang pengelola dengan dua orang pemodal. *Ketiga*: dua orang sama-sama mengelola dengan modal berasal dari salah satu diantara mereka. Bentuk ketiga ini oleh Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni wa Syarh al-Kabîr* dinilai sebagai bentuk *mudharabah*.

Mudharabah adalah *syirkah* (kemitraan) yang halal secara *syar'i*. Al-Kasani dalam *Badâi' ash-Shanâi'* menyatakan bahwa orang-orang biasa melakukan akad *mudharabah* dan Nabi saw. tidak mengingkari mereka sehingga hal itu merupakan persetujuan (*taqrîr*) dari Nabi atas kebolehan *mudharabah*.

Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam juga menyerahkan harta sebagai *mudharabah* dan mensyaratkan seperti syarat al-'Abbas. Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman memberikan harta secara *mudharabah*. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya bahwa Umar ra. pernah menyerahkan harta anak yatim secara *mudharabah*. Imam asy-Syaukani dalam *Nayl al-Awthar*, setelah memaparkan sejumlah atsar itu, menyatakan, "*Atsar-atsar*

ini menunjukkan bahwa *mudharabah* dilakukan oleh para Sahabat tanpa ada seorang pun yang mengingkari sehingga hal itu menjadi ijmak mrereka bahwa *mudharabah* adalah boleh."

Ibn al-Mundzir di dalam *Al-Ijmâ'* menyatakan, "Para ahli ilmu telah berijmak atas kebolehan *mudharabah* secara keseluruhan."

Beberapa Ketentuan

Rukun akad *mudharabah* ada tiga. *Pertama*: dua pihak yang berakad. *Kedua*: *ash-shighat*, yaitu ijab dan qabul. *Ketiga*: obyek akad (*al-ma'qûd 'alayh*), yaitu amal (aktivitas), modal dan keuntungan.

Akad *mudharabah* hanya sah dilakukan oleh mereka yang secara *syar'i* sah melakukan *tasharruf*, yaitu orang yang berakal, balig dan tidak sedang di-*hijr* (dilarang oleh hakim untuk melakukan *tasharruf*, termasuk melakukan transaksi finansial). Dua pihak yang berakad (*al-'âqidân*) yang dimaksud bukan jumlahnya harus dua orang, melainkan dua pihak itu adalah satu pihak yang menjadi *mûjib* (menyampaikan ijab/ajakan) dan pihak yang menyampaikan qabul.

Ash-Shighat atau ijab dan qabul harus dilakukan terpaut antara ijab dan qabulnya atau harus dalam satu majelis akad. Di dalam ijab-qabul ini harus jelas andil dari masing-masing *syarik* (mitra), artinya harus jelas siapa yang menjadi *mudharib* (pengelola) dan siapa yang menjadi pemodal.

Obyek akad (*al-ma'qûd 'alayh*) *mudharabah* yaitu *al-'amal*, *ra's al-mâl* (modal) dan *ar-ribhu* (laba). Terkait *al-'amal*, sebagai *syirkah* maka dalam *mudharabah* harus jelas aktivitas bisnis yang diakadkan. Harus dipahami dengan jelas batasan aktivitas yang termasuk dalam cakupan bisnis dalam *syirkah* itu, atau yang menjadi cakupan aktivitas *mudharib* (pengelola). Kejelasan ini penting sehingga semua pihak dapat menakar andil *al-'amal* itu dalam bisnis dan hasilnya. Hal itu bisa menjadi pertimbangan penting untuk membuat kesepakatan tentang pembagian laba. Kejelasan itu juga penting untuk menentukan batasan pekerjaan yang masih dalam cakupan aktivitas pengelolaan *syirkah* dan mana yang tidak.

Terkait *ra's al-mâl* atau modal maka ada beberapa ketentuan:

1. Modal haruslah *'aynan* (zat harta) dan ada pada waktu akad, tidak boleh berupa utang atau piutang yang ada di pihak lain.
2. Modal hendaknya dalam bentuk dinar (emas), dirham (perak) atau uang sehingga nilai nominalnya jelas. Ketentuan ini merupakan jumhur ulama.
3. Jika berupa barang, komidoti, jasa atau manfaat seperti manfaat ruko misalnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Jika berupa barang, komoditi atau manfaat maka harus disepakati nilainya atau dinominalkan pada saat akad.
4. Jumlah modal harus jelas pada saat akad *syirkah*. Hal ini penting untuk mengetahui besarnya laba nantinya.
5. *Mudharabah* tidak sah kecuali modal seluruhnya diserahkan atau menjadi berada dalam kekuasaan *mudharib* pada saat akad *syirkah*. Tidak boleh ada sebagian modal yang diutang atau diserahkan kemudian. Akad *mudharabah* mengharuskan hal itu. Aktivitas finansial (bisnis) yang diakadkan itu dilakukan terhadap modal dan hal itu langsung berlaku sejak akad dilangsungkan sehingga modal yang diakadkan seluruhnya harus diserahkan kepada *mudharib*.

Adapun terkait *ar-ribh* (laba) maka harus diperhatikan:

1. Besarnya *nisbah* keuntungan yang menjadi bagian masing-masing *syarik*, baik pengelola maupun pemodal, harus

disepakati. Besarnya *nisbah* laba itu bisa disepakati dengan memperhatikan porsi andil masing-masing baik tenaga maupun modal; bisa juga tanpa memperhatikan hal itu. Besarnya laba tidak boleh ditentukan nilai nominalnya, tetapi hanya berupa *nisbah* atau prosentase atas laba. Jika ditentukan nilai nominalnya, menurut Ibn Qudamah dalam *Syarh al-Kabîr*, membuat akad *mudharabah* itu batil.

2. Kerugian finansial hanya menjadi tanggungan modal. Ali bin Abi Thalib berkata:

«اَلْوَضِيْعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اِصْطَلَحُوْا عَلَيْهِ»

Kerugian itu berdasarkan harta (modal), sedangkan keuntungan berdasarkan kesepakatan mereka (para mitra) **(HR Abdurraqaq dan Ibn Abi Syaibah)**

Syirkah itu mencakup *wakalah* dan wakil tidak menjamin dan kerugian hanya ditanggung pihak yang mewakilkan, kecuali kerugian itu karena kesengajaan wakil. Selain itu, bagian laba dan tanggungan kerugian itu mengikuti andil. Badan tidak menanggung kerugian harta, melainkan merugi tenaga, waktu dan pikiran yang dicurahkan saja.

3. Pembagian laba dilakukan setelah dihitung rugi-labanya dan modal disisihkan (dikembalikan ke pemodal). Untuk itu harus ditentukan periode *syirkah*, bisa pertransaksi, harian, mingguan, bulanan, tahunan; sesuai dengan fakta bisnis dan mempertimbangkan kemaslahatan pengelola sebab ia bisa jadi bergantung pada pembagian laba itu sebagai penghasilannya.

Jika akad *mudharabah* sempurna, maka konsekuensinya hak mengelola *syirkah* itu hanya dimiliki oleh *mudharib*. Ia berhak menjalankan *syirkah* itu sesuai pandangan dan pendapatnya sendiri. Pemodal tidak memiliki hak atas pengelolaan *syirkah* itu. Sebab, akad *mudharabah* itu terjadi atas badan pengelola dan harta pemodal, bukan atas badan pemodal jadi pemodal menjadi seperti orang asing dari *syirkah* itu sehingga ia tidak berhak atas pengelolaan *syirkah* tersebut.

Namun pemodal boleh menetapkan syarat-syarat atas pengelolaan *syirkah* itu pada saat akad. *Mudharib* wajib terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan itu dan tidak boleh menyalahinya sebab ia mengelola *syirkah* itu sesuai dengan izin sehingga ia terikat dengan izin yang diberikan.

Mudharib tidak boleh bekerja kepada *syirkah* yang ia kelola. Sebab, akad *mudharabah* itu terjadi atas badannya dan aktivitas pengelolaan *syirkah* itu menjadi konsekuensi dari akad tersebut. Namun, jika pekerjaan itu di luar cakupan aktivitas, pengelolaan *syirkah* dan tidak mengganggu pengelolaan *syirkah* maka orang yang menjadi *mudharib* itu boleh mengerjakannya dan mendapat upah. Misal, mengecat toko, sementara bisnis *syirkah*-nya adalah perdagangan. Adapun pemodal, ia boleh bekerja kepada *syirkah* yang ia modali itu. Sebab, badan pemodal itu tidak menjadi obyek akad *syirkah* dan ia seperti orang asing dari *syirkah* itu.

Syirkah termasuk *'aqd[un] jâiz[un]* sehingga masing-masing boleh membatalkan akad *syirkah mudharabah* kapan saja. Jika salah seorang *syarik* meninggal maka akad *syirkah* itu batal. Namun, harus diingat, akad *syirkah* termasuk *'aqd[un] mustamirr[un]*, secara otomatis diperbaharui seiring waktu. Jika satu periode *syirkah* berakhir, atau ada yang menarik diri, maka secara otomatis akad *syirkah* itu diperbarui untuk semua *syarik* yang tidak menarik diri. *WalLâh a'lam bi ash-shawâb.* **[Yahya Abdurrahman]**

BERPEGANG DENGAN SUNNAH, MENJAUHI BID'AH

(*Al-Arba'un an-Nawawiyah*, Hadis ke-28)

عَنِ العِرْبَاض بنِ سَارِيَةَ رضي الله عَنْهُمَا قالَ: وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ موعِظَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوْبُ، وذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُوْنُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كأنَّهَا موعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فأوْصِنا، قال: «أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافاً كَثِيْراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

Irbadh bin Sariyah ra. berkata: *Rasulullah saw. pernah memberi peringatan kepada kami yang membuat hati bergetar dan mata berlinang. Kami lalu berkata, "Ya Rasulullah, seolah-olah itu peringatan perpisahan. Maka dari itu, berilah kami wasiat." Beliau bersabda, "Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun yang memerintah kalian seorang budak. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sesudahku, lalu melihat perselisihan yang banyak, maka kalian wajib berpegang dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk; gigitlah ia dengan gigi geraham; dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan sebab semua bid'ah (perkara baru yang diada-adakan) adalah kesesatan* (HR Ahmad, Abu Dawud Ibn Majah, at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: hadis *hasan shahih*).

Dalam hadis ini diceritakan bahwa Rasul saw. memberikan peringatan yang sangat menyentuh dan berpengaruh. Ini adalah contoh bagaimana hendaknya seseorang memberikan peringatan atau nasihat. Hendaknya ia berusaha memberikan nasihat dan peringatan yang menyentuh dan berpengaruh, yaitu yang mudah dipahami, merangsang untuk memikirkan dan merenungkan serta menyentuh hati; yakni membangkitkan perasaan takut terhadap kemurkaan Allah SWT dan mengharap keridhaan-Nya. Dengan begitu diharapkan orang yang diberi nasihat/peringatan terdorong untuk taat dan menjauhi maksiat.

Wasiat Rasul dalam hadis ini ada beberapa poin. *Pertama*, wasiat untuk takwa kepada Allah SWT. Takwa artinya mewujudkan *wiqayah* (perisai) diri dari kemurkaan dan azab Allah SWT dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Kedua: wasiat untuk mendengar dan menaati pemimpin. Rasul saw. menegaskan pesan ini: "meski yang memimpin (menjadi amir) kalian adalah seorang budak". Padahal seorang budak, secara *syar'i* tidak boleh dijadikan pemimpin. Sabda Rasul itu menegaskan tentang betapa pentingnya

mendengar dan menaati pemimpin (amir), tentu pemimpin (amir) yang *syar'i*. Sabda Rasul ini sekaligus mengindikasikan bahwa meski yang dijadikan pemimpin itu pemimpin *mafdhûl*, dimana ada orang lain yang lebih utama dan lebih *kafa'ah*, maka mendengar dan menaati pemimpin *mafdhûl* itu tetap wajib.

Hanya saja, mendengar dan taat itu dibatasi hanya dalam hal kemakrufan saja. Dalam hal yang merupakan kemaksiatan justru haram untuk mendengar dan taat. Sebab, Rasul saw. membatasi ketaatan itu hanya dalam kemakrufan. Rasul saw. bersabda:

«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ»

Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf (HR Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa'i).

Lalu Rasul saw. bersabda, "*Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sesudahku, lalu melihat perselisihan yang banyak.*" Perintah untuk mendengar dan taat kepada amir itu penting karena akan ada perselisihan dalam banyak perkara. Ketika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, tentu penting untuk memutuskan mana yang harus diambil dan dijalani. Untuk itu diperintahkan agar mendengar dan taat kepada amir, selama bukan kemaksiatan. Ini mengindikasikan bahwa perintah amir itu erat hubungannya dengan persatuan dan bahwa perintah imam itu menghilangkan perbedaan (*amr al-imâm yarfa' al-khilâf*).

Ketiga: dalam kondisi itu Rasul saw. memerintahkan kita untuk berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan Sunnah Nabi saw dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin yang disepakati oleh para ulama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali *radhiyallâh 'anhum*. Sunnah Khulafaur Rasyidin itu adalah sunnah dalam makna bahasanya, yaitu jejak langkah dan contoh. Artinya, kita diperintahkan Rasul untuk berpegang kuat dengan contoh dan jejak langkah Khulafaur Rasyidin, terutama dalam masalah kepemimpinan sebab konteks pembicaraan hadis ini adalah masalah ketaatan kepada amir. Sistem kepemimpinan dan kenegaraan yang menjadi Sunnah Khulafaur Rasyidin itu adalah *al-Khilafah* dengan kepala negaranya adalah Khalifah/Amirul Mukminin. Inilah yang harus kita pegang teguh. Meninggalkan bahkan menolak sunnah ini jelas bertentangan dengan wasiat dan perintah Rasul saw. dalam hadis ini.

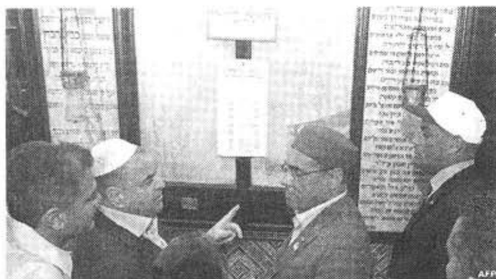
Keempat: wasiat Rasul saw. untuk menjauhi perkara baru yang diada-adakan (*muhdatsah*), yaitu bid'ah, sebab bid'ah itu adalah kesesatan (*dhalâlah*). Menurut Imam asy-Syafii, *al-muhdatsah* yang menyalahi al-Kitab atau as-Sunah atau ijmak merupakan *bid'ah dhalalah* (Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj* 4/436).

Jadi, bid'ah itu adalah perbuatan yang menyalahi ketentuan syariah. Ini hanya berlaku pada perbuatan yang syariah telah menentukan atau membatasi tatacara (*kaifiyah*) pelaksanaannya dan seorang Muslim dibebani untuk melaksanakannya sesuai dengan tatacara yang telah ditentukan oleh syariah itu. Jika diteliti, ternyata syariah membatasi tatacara (*kayfiyyah*) pelaksanaan perbuatan hanya dalam masalah ibadah kecuali jihad. Jadi bid'ah itu adalah melakukan ibadah dengan tatacara yang menyalahi tatacara yang telah dibatasi/ditentukan oleh syariah. Hal itu adalah haram dan merupakan kesesatan.

WalLâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]



Lintas Dunia



PM Tunisia dari An-Nahdhah Buka Kembali Sinagog Yahudi Tertua

HTI-Press. Pemerintah Tunisa yang sebelumnya menolak syariah Islam sebagai dasar negara Tunisia , tidak melarang minuman keras dan membolehkan bikini di pantai Tunisia, sekarang membuka kembali sinagog tertua yang menjadi pusat peribadatan Yahudi di Afrika.

Wartawan BBC (*BBC Online*, 17/4) melaporkan, Kementerian Pariwisata Tunisia akan membuka kembali Pulau Djerba bagi orang Yahudi setelah tahun lalu sempat dihentikan karena unjuk rasa menentang pemerintah di negara itu.

Menteri Pariwisata Elyes Fakhfakh mengatakan kepada para wartawan, Selasa 17 April, ingin mempertahankan tradisi kunjungan Yahudi yang sudah berlangsung selama berabad-abad itu. Hal tersebut disampaikan pada hari penutupan konferensi Organisasi Pariwisata Internasional PBB, UNWTO, yang berlangsung di Pulau Djerba.

Di pulau itu terdapat sebuah sinagog yang diperkirakan merupakan salah satu sinagog tertua di Afrika . Setiap tahunnya sekitar 6.000 umat Yahudi—yang sebagian berasal dari Eropa dan Israel—berkunjung ke sinagog Ghriba di Djerba.

Sebelumnya sempat terdengar kabar bahwa Tunisia tidak ingin meneruskan tradisi itu untuk menerapkan apa yang disebut sebagai pariwisata halal. Namun, menjelang pembukaan konferensi, Senin (16/04), Perdana Menteri Tunisia, Hammadi Jebali, juga sudah menegaskan bahwa rakyat Tunisia yang toleran akan menyambut baik umat Yahudi di Pulau Djerba, seperti pada masa-masa yang lalu.

"Kami akan menjamin kondisi yang baik bagi kegiatan pariwisata di negara ini dengan memerangi sejumlah perilaku," tuturnya kepada para wartawan, seperti dikutip kantor berita AFP. [AF dari berbagai sumber]

Omong Kosong Demokrasi Mesir, Capres dari Tokoh Islam dicoret



Upaya Barat untuk tetap mengontrol Mesir agar tetap sekular semakin tampak jelas. Lewat Dewan Militer Mesir yang berkuasa, Amerika Serikat dan sekutunya berupaya menghalang-halangi kemunculan tokoh dari umat Islam untuk menjadi presiden Mesir mendatang.

Demokrasi Mesir yang baru, yang sering dipuja-puja oleh Barat, hanyalah isapan jempol belaka. *BBC Online* (18/04) melaporkan, sejumlah kandikat presiden Mesir tetap didiskualifikasi. Wartawan BBC di Kairo melaporkan, keputusan pengadilan tersebut mengubah peta pemilihan presiden.

Abu Ismail, calon kuat dari Salafi yang juga berada di lokasi, kepada para pendukungnya mengatakan, "Kita menjadi korban konspirasi oleh pihak yang tidak bisa Anda bayangkan. Apa yang terjadi di dalam adalah penghianatan untuk menciptakan perpecahan."

Sebelumnya, secara mengejutkan dua calon presiden yang merupakan tokoh Islam Sabtu kemarin dicoret oleh Komisi Pemilihan Presiden, HPEC. Khairat al-Shatir, seorang pebisnis dan wakil ketua Ikhwanul Muslimin, didiskualifikasi karena sengketa dakwaan masa lalu. Padahal semuanya tahu, pengadilan pada masa Mubarak adalah pengadilan keji, palsu dan penuh rekayasa. Adapun Abu Ismail calon presiden dari Salafi didiskualifikasi karena ibunya memegang kewarganegaraan AS, yang sudah ia bantah dengan keras.

Untuk menunjukkan bahwa calon dari Islam bukanlah menjadi target, Komisi Pemilihan Presiden sengaja mencoret Omar Sulaiman, mantan wakil presiden yang juga menjabat kepala Departemen Intelejen di bawah kepemimpinan Mubarak. Pencalonan Omar Sulaiman hanyalah rekayasa karena siapapun di Mesir paham bahwa Omar merupakan antek Mubarak yang dibenci rakyat.

Wartawan BBC melaporkan, ada ketidaknyamanan mendalam terkait ketidakberpihakan HPEC tersebut. Ketua Komisi, Farouk Sultan, adalah mantan petinggi militer dan hakim di pengadilan militer. Dengan adanya keputusan terbaru ini maka kandidat tersisa adalah mantan ketua Liga Arab Amr Moussa, Abdel Moneim Aboul Fotouh dan mantan perdana menteri Ahmed Shafiq. Ketiga capres ini dikenal sekular dan lebih bisa diterima oleh Amerika dan Israel. Fotouh yang memisahkan diri dari Ikhwanul Muslimin dalam pernyatannya siap untuk tetap mempertahankan perjanjian damai dengan Israel.

Meskipun mengklaim lebih demokratis, Dewan Militer Mesir—yang baru saja mendapat bantuan dana dari Amerika Serikat—menggunakan berbagai cara untuk menghalangi kemunculan kekuatan Islam meskipun hanya sedikit dan tidak utuh. Dalam Pemilu anggota parlemen kemarin, para kandidat dilarang mengusung isu-isu Islam, bahkan slogan "Islam adalah Solusi" pun dilarang.

Pengadilan Administratif di Kairo pada tanggal 10/4/2012 memutuskan untuk menghentikan keputusan Parlemen terkait pembentukan sebuah Majelis Konstituante yang bertanggung jawab menyusun konstitusi. Mereka khawatir karena kebanyakan anggota Parlemen itu berasal dari gerakan Islam. Sekitar 75% anggota Parlemen berasal dari gerakan-gerakan Islam setelah gerakan-gerakan Islam memenangkan pemilihan pasca revolusi.

Berkaitan dengan ini, Kantor Berita HT (17/4) menyatakan semua ini menunjukkan bahwa prinsip (kehendak) mayoritas yang diakui dan diserukan oleh demokrasi dapat ditolak dan dibatalkan oleh pengadilan dengan cara apapun. Ini juga menunjukkan bahwa demokrasi adalah kendaraan para rezim sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka menyerukan demokrasi kalau ada kepentingannya di sana, di lain waktu justru menginjak-injak demokrasi kalau mengancam kepentingannya.

Kekejian Pasukan Penjajah Amerika Terulang Lagi, Karzai Hanya Mengecam



Foto tentara Amerika Serikat dengan potongan kaki jenazah pengembom bunuh diri di LA Times.

Tidak berbeda dengan sebelumnya, Presiden 'Boneka Barat' Hamid Karzai hanya mengecam

foto-foto yang memperlihatkan tentera Amerika berpose dengan jenazah mujahidin Taliban. Foto itu memperlihatkan bagaimana tentara penjajah memegang potongan kaki dari jenazah pejuang Afganistan. Karzai sebatas mengatakan hal itu sebagai tindakan yang tidak manusiawi.

Dalam salah satu foto terlihat tentara Amerika Serikat memegang potongan kaki dari jenazah seorang pengebom bunuh diri. "Sangat memuakkan untuk mengambil foto dengan bagian tubuh dan memperlihatkan foto itu kepada orang lain," katanya dalam sebuah pernyataan, Kamis 19 April.

Insiden seperti ini bukan pertama kali terjadi. Pada Januari 2012 muncul video yang memperlihatkan empat tentara Amerika Serikat mengencingi jenazah tiga pendukung Taliban. Tentara Amerika Serikat kembali berulah pada 22 Februari ketika di Pangkalan Militer Bagram di pinggiran kota Kabul mereka membakar al-Quran. Unjuk rasa dengan kekerasan marak selama beberapa hari dan sembilan orang tewas, termasuk dua tentara AS. Lalu pada 11 Maret 2012 Sersan Robert Bales menyerang penduduk desa di rumah mereka di Provinsi Kandahar dengan korban jiwa 16 orang. Sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak. Kemudian pada 18 April 2012, Harian *Los Angeles Times* menerbitkan foto tentara AS berpose dengan jenazah pengebom bunuh diri. Foto diambil pada tahun 2010.

Foto-foto yang mengundang kecaman tersebut diambil pada tahun 2010 dan diterbitkan oleh Harian *Los Angelese Times*, Rabu 18 April 2012. Harian ini memilih untuk tetap menerbitkan foto-foto keji ini meskipun mendapat tekanan sebelumnya agar tidak mengangkat masalah ini. Insiden terbaru ini makin memperburuk citra tentara Amerika Serikat di mata warga Afganistan setelah pada bulan Januari muncul video yang memperlihatkan marinir Amerika Serikat mengencingi jenazah pendukung Taliban.

Foto-fota keji ini sekali lagi mencerminkan peradaban menjijikkan Kapitalisme Amerika. Pangkal dari semua ini adalah penjajahan Amerika di negeri Islam itu yang dibantu bonekanya, Hamid Karzai. Kalau Karzai memang pemimpin sejati, tentu yang dia lakukan bukan hanya mengecam, tetapi mengusir Amerika dan sekutunya dari bumi Afganistan. Jelas ini mustahil dia lakukan sebagai boneka Amerika.

HT: Bantuan Amerika untuk Mesir Adalah Alat Penjajahan

Bantuan Amerika Adalah Alat Penjajahan dan Penerimaan Terhadapnya Adalah Bunuh Diri Politis dan Penelantaran Negeri! Demikian ditegaskan oleh Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir dalam pernyataan persnya (1/1/2012).

Sebagaimana diberitakan *The New York Times* (23/3/2012), Hillary Clinton akhirnya tetap memutuskan memberikan bantuan militer kepada Mesir. Selama ini Mesir mendapat bantuan Amerika dalam bentuk bantuan militer sebesar $ 1.3 miliar setiap tahunnya. Selama ini sebagian besar bantuan ini digunakan untuk mempertebal kantong-kantong perwira militer Mesir. Uang menjadi suap yang efektif untuk mengendalikan militer Mesir.

Berkaitan dengan hal ini, Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir menyerukan umat Islam tidak perlu meminta bantuan dari siapapun! Kaum Muslim menolak (bantuan) musuh umat ini! Bantuan-bantuan yang diberikan ke negeri kaum Muslim itu bersyarat berupa jaminan penjagaan atas perjanjian-perjanjian damai dengan entitas pendudukan Yahudi.

Allah SWT telah menganugerahi umat Islam dengan potensi dan kekayaan yang tak terhitung, mulai kekayaan minyak di Libya dan Teluk sampai berbagai kekayaan yang banyak lainnya di negeri Maroko Arab. Negeri yang di dalamnya ada semua kekayaan itu tidak membutuhkan bantuan-bantuan Amerika atau Barat. Bantuan-bantuan Amerika dan Barat diberikan ke negeri-negeri kaum Muslim untuk mengontrol mereka serta sumber-sumber dan keputusan-keputusan politisnya. [FW/Dari berbagai sumber].




Daily Mail

FABULOUS FAM

HOLIDAYS £20

DONORS' SECR

No.10 DINNER

Tory treasurer charg

£250,000 to meet PM

D'oh! Taxman in a mix over definition of bread

Minister wants to wrap Britain in 8in of cladding

DEMOKRASI: SISTEM POLITIK YANG BISA DIBELI

Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam pidatonya di Universitas Al-Azhar Jakarta Kamis (12/4), kembali menyerukan Dunia Islam untuk merangkul demokrasi dan mengingatkan bahaya apa yang dia sebut sebagai esktremisme Islam yang menolak demokrasi. PM Inggris ini juga mengkritik 'kelompok elit yang korup' dengan mengakui kebenaran bahwa 'korupsi berbahaya bagi ekonomi dan politik rakyat'. Namun, Cameron berdusta saat dia tidak mengatakan bahwa pemerintah demokratis—dari mulai Westminster hingga Islamabad dan Dhaka—adalah pemerintahan yang memelihara korupsi. Dia tampak telah lupa bahwa bulan lalu seorang anggota senior partainya sendiri tertangkap kamera sedang 'menjual' undangan makan malam pribadi bersama dirinya kepada sekelompok elit dari perusahaan Inggris, di mana mereka bisa mempengaruhi kebijakan, jika mereka memberikan sumbangan untuk partainya. " [Redaksi]

Dalam bahasa sehari-hari, kata yang digunakan untuk upaya mempengaruhi tindakan seseorang melalui insentif uang disebut dengan istilah 'suap'. Namun, dalam dunia politik demokrasi, kita bersikeras menggunakan istilah-istilah seperti *'pendanaan'*, *'lobi'* atau *'pinjaman lunak'*.

Namun, upaya yang terus-menerus mencoba membedakan antara penggunaan uang yang 'etis' untuk mempengaruhi politik, dan penggunaan uang yang tidak etis atau ilegal, telah kehilangan alasannya. Demokrasi pasti memproduksi racun yang berasal dari campuran uang dan kekuasaan. Apa yang terjadi saat ini bisa membuktikan hal itu.

Bagi mereka yang tidak bisa menjawab hal ini, skandal politik Inggris yang terbaru merupakan bukti nyata. Saat itu, bendahara partai konservatif Inggris yang berkuasa tertangkap kamera sedang menawarkan akses kepada Perdana Menteri dan Kanselir hingga lebih dari £ 250.000 atas nama sumbangan. Dia menceritakan beberapa contoh bagaimana para pendonor telah diundang makan malam secara pribadi dengan David Cameron dan

keluarganya. Cameron pun dipaksa untuk menyebutkan secara rinci nama para pendonor jutawan yang ia ajak makan malam bersama itu.

Begitu banyak skandal dalam politik Inggris, yang membuat masyarakat seolah-seolah kehilangan rasa sakit mendengar praktik-praktik kotor seperti itu. Bahkan masyarakat sudah menganggap politisi identik dengan prilaku korupsi.

Siapa pun yang berpikir bahwa hal ini adalah skandal yang terjadi hanya sekali, harus berpikir ulang. Banyak orang yang ingat, pengunduran diri mantan Menteri Pertahanan Liam Fox di tengah-tengah pertanyaan tentang terjadinya lobi dan skandal *"Cash for Honours"* yang mencoreng Partai Buruh di saat-saat terakhir pemerintahan mereka.

Namun, fakta bahwa tuduhan-tuduhan tentang kemungkinan adanya 'penjualan' bintang tanda jasa *peerage* (yakni orang-orang yang mendapat gelar bangsawan dari Keluarga Kerajaan, *penerj.*) dianggap ilegal hanya mengingatkan pada masa lampau saat praktik hal itu dilakukan. Saat Lloyd George menjual *peerage* itu dan itu pada awalnya dianggap legal. Namun kemudian dianggap ilegal di bawah Undang-undang Kehormatan (Pencegahan Pelanggaran) Tahun 1925!

Siapa pun yang mengira bahwa skandal-skandal besar itu adalah satu-satunya contoh, maka mereka salah. Semuanya itu adalah puncak gunung es dari budaya politik dalam demokrasi yang telah matang. Ada banyak hal yang sebenarnya masuk dalam skandal dari praktik-praktik politik yang dianggap sah. Kebanyakan orang tidak menyadari hal itu.

Hal itu tidak hanya terjadi di Inggris. Demokrasi Inggris (seperti juga demokrasi di Amerika Serikat dan di Prancis yang sudah matang) adalah seperti orang yang menggunakan seragam sama untuk menutup banyak noda.

Namun, negara-negara penganut demokrasi yang lebih muda seperti di India, Rusia, Pakistan, Irak, Afganistan dan di tempat-tempat lain jauh lebih sulit untuk menyembunyikan fakta bahwa korupsi dan demokrasi telah menjadi hal yang identik. Demikian juga bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebenarnya adalah pemerintah untuk orang-orang paling kaya dan paling kuat di masyarakat.

Skandal Demokrasi Inggris

Skandal *"the Cash for Questions"* pecah pada tahun 1994. Seorang pelobi parlemen, Ian Greer, terbukti menyuap para anggota Parlemen sebagai ganti untuk menukar pertanyaan-pertanyaan Parlemen yang diajukan dan tugas-tugas lainnya atas nama pengusaha Mohamed Al-Fayed. Skandal yang sama terjadi pada tahun 2009. Empat anggota Parlemen dari Partai Buruh dipecat karena menawarkan bantuan untuk membuat amandemen undang-undang dengan bayaran mencapai lebih dari 120.000 poundsterling.

Namun, ada yang lebih mengejutkan dari contoh praktik-praktik yang melanggar hukum itu adalah praktik yang sepenuhnya legal dan dapat diterima dalam sistem demokrasi. Istilah *'revolving door'* (yakni beralihnya peran seorang personil antara peran sebagai legislator dan regulator dan industri yang terkena dampak undang-undang dan peraturan, *penerj.*) telah dipraktikkan secara umum di Inggris, Amerika Serikat dan tempat-tempat lain.

Pada tahun 2010, program berita Channel 4 mengungkap kasus *'cash for influence'* (uang untuk mempengaruhi) dari para anggota Parlemen yang menawarkan untuk bekerja di perusahaan lobi dengan mendapat imbalan sebesar £ 3.000 hingga £ 5.000 perhari. Mantan Menteri Pertahanan Inggris Geoff Hoon, yang terlibat dalam skandal ini, sangat jujur ketika dia mengatakan, "Salah satu tantangan yang saya pikirkan adalah bahwa saya benar-benar berharap bisa menerjemahkan pengetahuan dan kontak-kontak saya dengan peristiwa internasional menjadi sesuatu yang menghasilkan uang."

Hoon mungkin telah dipermalukan oleh kisah itu, tetapi ia masih bisa mendapatkan pekerjaan pada sebuah perusahaan pertahanan Westland, yang mendapatkan kontrak sebesar £ 1.7 miliar

ketika dia menjadi menteri pertahanan. Namun, kepentingan bisnisnya tidak ada artinya dibandingkan dengan mantan bosnya, Tony Blair, yang mendapat jutaan pondsterling dari usaha seperti itu, termasuk saat dia mengunjungi Libya di era pemerintahan diktator Khaddafi sebagai pelobi untuk JP Morgan.

Kebenaran Tersembunyi

Sebenarnya hal ini merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan dalam politik Inggris maupun di negara-negara lain. Banyak mantan menteri yang kemudian menjadi konsultan, direktur atau pelobi bisnis besar. Perdana Menteri John Major adalah mantan anggota Dewan Penasihat Eropa Carlyle Group sejak tahun 1998 dan ditunjuk sebagai ketua pada Mei 2001 sebelum mengundurkan diri pada Agustus 2004. Mantan Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan Patricia Hewitt tercatat sebagai keanggotaan Eurotunnel dalam posisinya sebagai dewan direktur independen di BT—konsultan perusahaan Boots Inggris dan penasihat perusahaan ekuitas swasta Cinven, yang mengkhususkan diri dalam perawatan kesehatan.

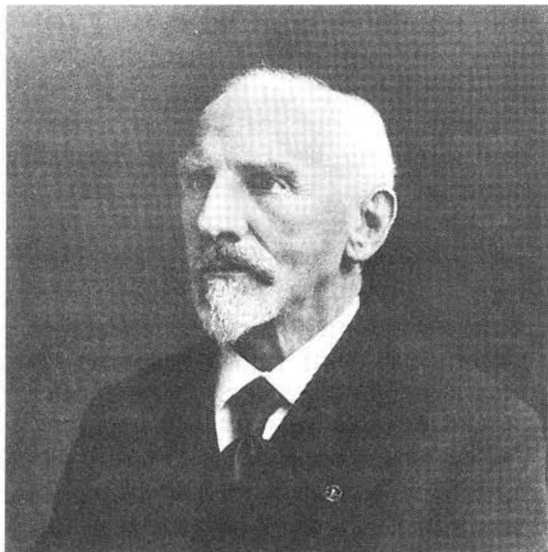
Namun, hanya sedikit yang memiliki kekhawatiran bahwa mantan Menteri Energi pada masa Margaret Thatcher Lord Wakeham pernah menjadi direktur perusahaan energi raksasa Amerika yang penuh skandal, Enron. Dia juga bersama mantan Menteri Keuangan Inggris Lord Lawson ditunjuk sebagai direktur non eksekutif dari perusahaan NM Rothschild & Sons.

Namun, cerita yang kurang diketahui tentang legalitas lobi politik menggambarkan betapa sistem ini benar-benar menghancurkan. Pada bulan Oktober 2011, muncul pertanyaan-pertanyaan tentang kelayakan pengangkatan Adrian Beechcroft oleh Cameron. Dia diminta Cameron untuk mempersiapkan sebuah laporan dari pihak swasta untuk Downing Street tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan dapat dirombak untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Beechcroft adalah seorang multijutawan kapitalis yang diperkirakan telah memberikan lebih dari setengah juta pound untuk Partai Konservatif. Dia merekomendasikan bahwa perusahaan-perusahaan harus lebih mudah diizinkan untuk memecat para staf dengan prestasi kerja yang buruk tanpa perlu diberikan penjelasan.

Ini bukanlah contoh satu-satunya. Dalam buku *Who Runs Britain* (Siapa Mengendalikan Inggris)?, Robert Peston menggambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar secara efektif menodongkan pistol kepada kepala pemerintahan Partai Buruh. Mereka mengancam menarik aktivitas mereka di luar negeri jika konsesi-konsesi kebijakan tidak dibuat untuk mereka. Hal ini akan berpengaruh pada pajak pendapatan, PDB dan kredibilitas pemilihan mereka. Anggaran terakhir yang dibuat Osborne harus dilihat dari kaca mata ini: memotong pajak penghasilan bagi orang-orang kaya sambil menyatakan bahwa Inggris harus 'terbuka' bagi bisnis.

Ketika rakyat di negara-negara di Timur Tengah menjerit untuk 'demokrasi', mereka harus berhati-hati atas apa yang mereka inginkan. Sebab, jika mereka menyuarakan suara rakyat, kesempatan untuk memilih para pemimpin mereka, meminta pertanggung-jawaban mereka dan mengikuti aturan-aturan hukum, maka itu adalah hal yang baik. Memang, Islam mendefinisikan elemen-elemen pemerintahan itu jauh sebelum demokrasi modern ada.

Namun, jika mereka menginginkan demokrasi seperti yang ada saat ini, mereka seharusnya tidak hanya melihat politik yang jelas-jelas korup seperti di Rusia, India, Afganistan, Pakistan dan Irak. Mereka juga harus melihat praktik-praktik tersembunyi dan yang terwujud dari negara-negara kampiun demokrasi saat ini, seperti Inggris dan Amerika. Pasalnya, sebagaimana yang dikatakan Mark Twain, "Hanya pemerintah yang kaya dan aman yang mampu menjadi negara demokrasi karena demokrasi adalah jenis pemerintahan yang paling mahal dan paling jahat yang pernah terdengar di permukaan bumi." [*Translated by* Riza Aulia—*www.hizb.org.uk*]



OPERASI INTELIJEN

Snouck Hurgronje (Bagian 4)

Idries De Vries

Rencana awal Snouck berangkat ke Indonesia sebenarnya adalah untuk melakukan penyamaran ke Tanah Aceh. Tujuannya agar bisa lebih dekat berinteraksi dengan Sultan Aceh di Keumala dan mengumpulkan informasi intelijen yang akan bermanfaat bagi tentara Belanda. Sebab, Belanda sangat kesulitan untuk 'menaklukkan' Aceh. Namun, tentara Belanda menyamarkan 'niat' sebenarnya dari Snouck. Gubernur Belanda untuk Indonesia sengaja 'mengirim' Snouck ke Batavia. Dia tiba di Batavia pada 11 Mei 1889. Inilah yang menyebabkan sebagian besar Muslim Indonesia tidak menyadari niat sebenarnya.

Teman-teman Snouck yang berasal dari Indonesia yang tinggal di Makkah menginformasikan bahwa Snouck akan datang ke Indonesia. Teman-teman Snouck mempropagandakan bahwa dia sebagai cendekiawan Muslim yang sedang belajar. Akibat propaganda itu, Snouck diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia bahkan banyak menerima undangan dari masyarakat Indonesia setempat. Ia secara sengaja diberi gelar "Al-Haji Abdul Ghafar", "Mufti" dan bahkan sebagai "Syekh al-Islam Batavia". Ini semua untuk semakin menyempurnakan penyamarannya.

Selama tinggal di Indonesia dan tatkala melakukan perjalanan ke daerah-daerah di Indonesia, Snouck tidak hanya mencatat semua jenis informasi tentang orang-orang setempat. Ia juga mencatat semua informasi tentang budaya, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, dan sebagainya. Semua tercatat dengan rapi. Dia berusaha keras untuk meningkatkan statusnya tatkala berada di lingkungan masyarakat setempat. Tujuannya satu, agar lebih mudah masuk-merasuk sampai ke dalam kehidupan masyarakat. Jika sudah dekat dengan masyarakat maka akan mudah bagi dia untuk mengunjungi semua tokoh terkemuka di area yang dia kunjungi. Tatkala Snouck sampai ke Ciamis, dia diberi kesempatan untuk menikah dengan putri dari salah satu tokoh terkemuka di sana, yang dengan senang hati ia terima. Ia menikahi putri berusia 17 tahun bernama Sangkana, anak dari kepala-panghulu[1] dari Ciamis, Raden Haji Muhammad Ta'ib. Sebenarnya, Sangkana sendiri tidak ingin menikah dengan Snouck, yang jauh lebih tua dari dia dan tidak terlalu tampan. Namun, orang tuanya mendorong dia untuk menikahi "sarjana besar" untuk meningkatkan status keluarga. Snouck menikahi Sangkana sesuai dengan syariah Islam. Namun, menurut hukum Belanda tidak boleh bagi orang Eropa untuk menikahi perempuan pribumi. Karena itu, setelah koran Belanda mulai memberitakan pernikahan Snouck dengan seorang perempuan pribumi, Snouck sendiri mengirimkan surat ke koran tersebut untuk secara resmi menyangkal bahwa ia telah menikah.

Selama Snouck di Aceh, dari Juli 1891 sampai Februari 1892, perannya adalah murni politik. Dia diangkat sebagai "Advisor Bahasa Timur dan Hukum Islam". Buku *The Acehnese* yang diterbitkan setelah Snouck di Aceh sebenarnya

terdiri dari laporan yang dia tulis untuk administrasi kolonial untuk menasihati mereka. Nama resmi dari proyek penelitian ini untuk pemerintah Belanda adalah "Laporan Tentang Situasi Keagamaan dan Politik di Aceh (*Verslag Omtrent de Religieus Politieke Toestand di Aceh*)".

Laporan tersebut terdiri dari 1.000 halaman lebih. Buku "Aceh" ini terdiri dari dua bab dari laporan tersebut. Pemerintah Belanda menyatakan bahwa bagian ketiga dari laporan tersebut merupakan sebuah "rahasia negara". Oleh karena itu, bab akhir tersebut disembunyikan dari publik hingga tahun 1957.

Pesan utama yang ingin disampaikan oleh Snouck kepada pemerintah Belanda dalam laporan tersebut adalah bahwa sebenarnya perlawanan di Aceh tidak dipimpin oleh Sultan, seperti yang selalu dipikirkan oleh Belanda, tetapi sebenarnya dilakukan oleh para ulama Islam. Karena itu Snouck menyarankan kepada pemerintah Belanda untuk terus mencoba menyuap Sultan dan menganiaya ulama dengan berbagai bentuk. Dia mengatakan: "*Hal ini tidak mungkin untuk bernegosiasi dengan ulama. Ajaran-ajaran mereka dan kepentingan diri sendiri menyiratkan bahwa mereka hanya akan mendengarkan kekerasan. Untuk memukul mereka di tempat yang menyakitkan, sehingga masyarakat Aceh menjadi takut untuk bergabung dengan para pemimpinnya adalah prasyarat mutlak untuk memulihkan ketertiban di Aceh.*"

Snouck menambahkan: "*Para ulama pada akhirnya harus mengakui. Ia harus menjauhkan diri dari ajaran Jihad. Para ulama juga harus berpaling ke ajaran yang berbahaya mengenai Hari Akhir. Jika ini berhasil maka Islam tidak akan berbeda dengan agama-agama besar lainnya, yakni hanya mengajarkan ajaran-ajaran tentang ibadah ritual semata yang harus dilakukan untuk mencapai kebahagiaan kekal.*"

Dengan kata lain, Snouck sebenarnya ingin agar kekerasan terhadap ulama menjadikan mereka berhenti untuk berbicara tentang Jihad, Negara Islam, dan konsep-konsep lainnya dari "Islam politik". Ujungnya hanya akan berbicara tentang Hari Kiamat dan ritual ibadah.

Awalnya, pemerintah Belanda mengabaikan saran Snouck. Mereka terus perang dan berfokus pada Sultan. Inilah yang menyebabkan Perang Aceh tidak pernah menang. Pada tahun 1896 mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lain. Pemerintah Belanda menunjuk Joannes Benedictus Jendral Van Heutsz sebagai gubernur untuk Aceh, dan memberi dia tugas untuk mengatur penaklukan. Pada tahun 1898 Van Heutsz mengangkat Snouck sebagai penasihat untuk masalah Aceh. Snouck menjadi penasihat Van Heutsz hingga tahun 1901. Van Heutsz memastikan kepada seluruh tentaranya agar mengikuti nasihat Snouck yang telah dia sampaikan mulai dari tahun 1892. Akhirnya, secara teratur ia mengirimkan Snouck ikut bersama dengan tentara pada ekspedisi-ekspedisi militer. Akibatnya, Van Heutsz mendapat julukan sebagai "Pedang Snouck". Tentara Belanda kemudian memulai kampanye yang berfokus pada menemukan dan membunuh ulama Aceh. Mereka sangat sukses dalam hal ini.

Pada 1903, setelah 30 tahun perang, mereka akhirnya menyatakan kemenangan di Aceh. Perang yang sebenarnya dilakukan oleh Van Heutsz dan Snouck adalah perang yang menyisir habis desa-desa di Aceh. Tujuannya untuk menemukan dan membunuh para ulama. Tidak hanya itu, tentara Belanda yang secara teratur pergi ke desa-desa, bukan hanya membunuh setiap laki-laki, namun juga perempuan dan anak. Setelah kemenangan Aceh, Snouck selanjutnya diminta menjadi penasihat pemerintah Belanda. Dia diminta saran dan nasihatnya untuk menyelesaikan pemberontakan di Jambi, Kerinci, Banjarmasin, Riau-Lingga dan Kalimantan [Bersambung]

Idries de Vries adalah aktifis dakwah Islam asal Belanda dan kontributor tamu pada situs newcivilization.com

Catatan kaki:

[1] Seorang hakim Islam dengan tanggung jawab administratif untuk masjid dan personilnya.

Pulau Jawa & Madura

Arjasa-Kangean: Zain *Agency* (0327)312201; **BANDUNG**: Toko ISTEK SALMAN ITB; *Budi Agency*, Jl. Budi No. 26. Rt01/04 Kel.pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Cimahi; **Bangil**: *Bustan computer & advertising* Jl. jaksa agung suprapto no 6 (depan masjid manarul) bangil (0343)7714386; **Bangkalan**: *Muhajir* Agency (031)72738055; **Bantul**: *El Fauzi Agency*, Salakan 277 B Rt.9/Rw.7 Sewon (0274)418844; **Bawean**: *Zainullah* Agency (0325)421276; **Bekasi**: *Sayyis Agency* Perumnas Rawa Lumbu (021)82420853, *Terry agency*. Jl. Tanjung IX no 24-25 Kranggan Permai.Tlp 02191052706.; **Bondowoso**: HP. 08113605257; Desa Karanganyar 87 RT.04 RW.02; **Banjar**: *Ibnu Aziz Fathoni*, Jln Kantor Pos 228 Kota Banjar Jabar. 08122191630; **Banyuwangi**: *Mumtaz Agency*, Jl. Prambanan V/08 Telp. (0333)427668; **Bojonegoro**: *Eko Agency* (081330637833); **Boyolali**: Risdi Griya Pulisen IIJl. Palem Raja no.34; **Blora**: *TB an Nur* jl. Blora 3/3 Randublatung (08882554473); **Blitar**: *Mukhlish Agency* Jl. Pemuda Supomo Rt.3/03 Ngegong Sanawetan, Telp: 0342-809515; **Cianjur**: *Hana Agency*, Jl. Otista2 Gg. Leci No.80 telp: (0263)5302005 Hp 081320771513; **Cilacap**: *Azmi Agency* Jl.Gatot Subroto 245 Rt 01/06 Cilacap 085643730173; **Cilegon**: Jl. Kenanga 23 Telp (0254)392165; **Cirebon**: *Salim Agency*, Jl. Jl. Sonokeling 8 Blok T/12 D Griya Sunyaragi Permai HP. 08121483406; **Delanggu**: Hamzah, 081393159130; **Depok**: Jl. Lafran Pane No.9 Tugu, Depok (021)8703442; **Garut**: *Agus Agency* 085223 994 229; **Gresik**: *Al-Husna Outlet*-Jl. Dr Wahidin SH 14b/No.26 Randu Agung-HP.085648875731, *Salam Agency* Telp:(031)7913042; **Indramayu**: *Faris Agency*, Jl. Jend. Sudirman No. 86 (wismarini), HP: 08122472529; **JAKARTA**: TOKO WALI SONGO Gedung Idayu, Jln. Kwitang 13, Jakarta 10420, TLP.(021)3154890, Fax (021)3154889; *Haris Agency* Telp. 081310606345; **Jatinangor**: *Zakky Agency* (jiddan.comp) Jl. Ciseke I no.11 08156015367; **Jember**: *Abdurrohim Agency* (085236548494) (0331-3600261); **Jepara**: *Ghuraba Agc.* (08882424155); **Jombang**: *Jundi muda Agc.* Perum Griya Tambakrejo Asri Blok G No.13; **Kediri**: *Muzamil*, Perum Bumi Asri Blok V/8 (0354-671120); **Kerawang**: *Abu Hamzah* Perumnas Bumi Teluk Jambe No. 54 Blok X telp: 0267 9154424/0816842819; **Klaten**: Dicky, 0818 268623; **Kudus**: Agung, (0291)3334503; **Lamongan**: *Harakah Agency* Jl. Pang. Sudirman 3; **Lumajang**: Jl. Pisang Mas 28; **Madiun**: *Al Fath Agency*, Jl. Setyabudi No.24, 0351 7786806; **Magelang**: *Mitra Agency*, HP: 0817265517; **Magetan**: Perum ASABRI 081335309411; **Majalengka**: LPPI Izzatul Ummah Pontren Mansyaul-Huda Heuleut (0233)661484; **Majenang Jateng**: *GRIYA MUSLIM AL FIRDAUS*. Jl. Haji Mansyur Sindangsari Majenang; **Malang**: *Global Agency* Jl. Pisang Candi Barat No.92 Telp. (0341)580036, *Sugi Agency*, Jl. Sumbersari VI/511 (0341)7016445; **Mojokerto**: *Ivan Agency* (0321)593144; **Nganjuk**: *Harun Agency* 0358-7601707; **Ngawi**: PUSLIM, Jl. Basuki Rachmad Masjid Al-Istiqomah (0351)746123; **Pacitan Jatim**: *Muh. Irfan Budi Atmaja* Jl.Cut Mutea Gang Manggis No 44 Kel. Ploso Kab. Pacitan; **Paiton**: *Muhsin Agency* Jl. Madura No.20 Telp. (0335)772188; **Pamekasan**: Jl. KH. Agussalim gg 5 No.16a Pamekasan telp.(0324)330310, Hp: 081615407362; **Pasuruan**: *Pustaka Ar-Risalah* Desa BUKIR RT 2 RW 2 No. 23 Kec. Gadingrejo. 0343-7831801; HP 081553137664.; **Pati**: Parenggan Rt.1/1 No.16, HP 08562658834; **Pekalongan**: Ridho, no. HP (081325075511); **Pemalang**: *Hasyim*. (081911511484); **Probolinggo**: Perum Leces Permai Blok I No. 10 Leces-Probolinggo, (0335)680516; **Purbalingga**: *Amin Agency* Jl. Arsantaka no.21 Rt.03/Rw.4; **Purwakarta**: *Amin Corner*, Perum Griya Mukti No. 42 Blok F Rt.21/6 BabakanCikao (0264-208463); *Fauziyah Agency*, perum Dian Anyar blok p-2 no.15 (0817 4872 742); **Purwokerto**: *Rouf Collection* Jl. Kober Gg. Sukun No.661 Telp.(0281)624164, HP:08122722447; **Purworejo**: *Al-Mustaqbal Agency*, Toko Soleh, Pasar Baledono Blok A.15 54111 08156890595; **Rembang**: *Arif* (085235026104); **Sampang**: *Taghyiir Agency* (0323)326117; **Sapudi**: *al-Ulum* Agency Jl. Dahlia Gg. Pujangga 4 Telp. (0327)811254; **SEMARANG**: Hadi, Telp. (024)70214261; **SERANG**: *Fauzi Rahman Agency*, Griya Lopang Indah Blok FG 45 No.12 Uyur; **Serpong**: *Toko Buku Pustaka Afkar*, Komplek Batan Indah Blok G-55 Telp. 021-7560631; 021-33870360.; **Sidoarjo**: *BSCAgency* 031-70825003; **Situbondo**: *Irfan* Jl. Curah Jeru Tengah RT/RW 07/01 Panji Situbondo telp (0338) 673015 Hp.08113602243; **Solo**: *Sarwidi*. Perum Gumpang Baru I, Jl Dahlia F14 Gumpang Kartasura skh 57169.; **Sragen**: Raihan Agency, (mas Teguh) ds. Margorejo Rt.12/04 karangmalang, 08156733198; **Sukabumi**: TB AL-IMAN, Jl. Alun-Alun Utara Depan Wisma PGRI, Sukabumi, (0266)215737 ; **Sukoharjo**: *Ridwan Ageency*, perum Korpri Blok M7, gayam 02/13, jateng; **Sumenep**: *Rusliy Agency* Jl. Pesona Satelit Blok P-8 Kolor Sumenep (0328) 7710028/0817 0303 0119; **SURABAYA**: PUSTAKA SAHABAT Jl. Gubeng Kertajaya VII H/12 (031)5030289, ISLAMIC BOOK CENTER Jl. Peneleh 18 (031)5344120, TB MANYAR JAYA Jl. Manyar 4 (031)5026542, MEDIA IDAMAN PRESS Jl. Menur Pumpungan 44A (031)5926860; **Tangerang**: *Khambali*, Perumahan Alam Indah E 1 No 8 Cipondoh Tangerang; **Tasikmalaya**: *Hanif Agency*, Jl. Winaya V No. 115 perumahan P&K Cikunten Indah, HP: 081323293493; **Tegal**: Guntur Agc. Kedungbanteng 8/VI (081542160113); **Tuban**: *Firdaus Agency* Telp:081330660745; **Tulungagung**: TB Arinal Haq Jl. KH. Wahid Hasyim 86 ; **Wonogiri**: Amin Suyatno, Rt.04/01 Giriharjo, puhpalem, 081548563586. Abdul Fatah, Rt.02/18 Baturetno Lot, 081548559239; **YOGYAKARTA**: *Zukhrif Agency* Sagan Timur CT V No. 40 A Telp. 0274-547569, Stan buku masjid kampus UGM (081321762802).

Sumatera, Kep. Riau, Batam

ACEH: Banda Aceh: *BBK Tazkia Insan Mulia*, Jl. Tgk Lamgugob no.1 Kec. Syiah Kuala Banda Aceh (08a560278449); Meulaboh: Jl. Swadaya no.43 (Depan Kantor PLN Meulaboh) (081534043538); Lhokseumawe: Jl. Eskape no.2 Lancang Garam (081513141998); Langsa: *al-Mu'tashim Agency*. Jl. Malikul Adil no.4 Komp. Pemda Gampong Meutia Langsa Kota (085261771486); **Bengkulu**: Regen Rais jl.Mahoni No 55 Kota Bengkulu, (0736)7013473; **BATAM**: *Sutoto*, Taman Valencia Blok B No 2 Belian - Batam; **JAMBI**: *Yunedi Agc*, Jl. Serma Ishak Akhmad no.15, Kota Baru, 085266605704; **Kijang**: T Bacaan Fikri, jl. S. Datuk, No.5, Kab. Bintan, KEPRI; **LAMPUNG**: Syamsu, Bandar Lampung (085267454582 / 085758753334); **MEDAN**: Jl. Utama No. 109-A 081376261198; **PADANG**: *Ardion*, Jl. Sunda No.11-A Komp. PJKA; *Husni Agency*, Jl. Mesjid Jami' PD Luar No. 301, Bukit Tinggi, Padang, Telp (0752)32392, *Fadhilah*. Jl.Jhoni Anwar No.123 Padang; **PALEMBANG**: *al-Manar Agency*, (Mas Tarno 0815 355 6644); **PEKANBARU**: *Inqilabi Agency* Jl. Hangtuah No. 125 A (081365609191); TB. Sakinah, Jl. Tuanku Tambusai No. 123 (0761) 26895, Pustaka Jodai, Jl. Tuanku Tambusai (simp. taskurun).

Sulawesi

BAU-BAU: *Putra Kreatif Collection*, Jl. Betoambari No. 46 Sultra 081341559228; **MAKASAR**: *Khilafah Center*, Pondok U 1, Jl. Perintis Kemerdekaan VII (dpn Asrama HPMM), (0411)5207043; **KENDARI**: *Rachmat Agc*, 0852 4154 8316, *Hijaz Collection*, Jl. Bunga Asoka No. 1 Kemaraya 0401-329887, *Mutiara Islam*. Jl. Beringin (samping RS. Bersalin Dewi Sartika). Kel. Bende Kec. Kadia. Kendari; **Luwuk, Sulteng**: *KIOS BUKU AL-FATIH*, Jl. P. Sumatera, Depan Masjid Nurul Iman, Kel.Simpong-Luwuk Banggai-Sulteng 085217683066; **Maluku Utara**: *Mustafa Agc* Samping Kanan Ex Puskesmas Kalumpang No 270 TERNATE MALUKU UTARA.Tlp 09213125290 HP : 085240106623; **PARE-PARE**: Yantel Isbona, Jl. Laasiming (depan SMU 4) 0421-27753. **PALU**: *al-Ishlah Agency*, Jl. Basuki Rahmat No. 12 (Depan Masjid Daarunnaim) Palu Selatan

Kalimantan

BALIKPAPAN: FORKIB *Agency*, Jl. Soekarno Hatta Km.3,5 BAtu Ampar, Rt23/07 No. 25 (0542)420738; **Banjarbaru**: Perum Listrik II No 89 Rt.5/2 Banjarbaru kal-sel; **BANJARMASIN**: *Sigma Agency*, Jl. Cemara raya 2 Rt23 No.26 Telp: (0511)3300411; M. Hariadi, *Muslim Agency*, JL. Pandu Gg I RT 29 No.59, Tlp. 0511 251466; **Berau, Kaltim**: Toko Buku Kias, Jl. AKB Sanipah No. 45, Tanjung Redeb, HP: 085246080726; **PALANGKARAYA**: *Fatih Agc*, Jl. G. Obos no. 154, Palangkaraya; **SAMARINDA**: *Kantor HTI Samarinda*, Jl. Anggur No. 20 Rt.57, Tlp. (0541)202631, Ansory 085250989099, *HABIBI AGENSI* JL. Ir. H. Juanda 7 RT 03 NO. 43 Kel.Air Hitam Samarinda; **PANGKALANBUN** : *Mursyid Alfandy*, Jl. P. Antasari No.01 Kel Baru 0852 5288 1980/0857 5267 9700, kal-teng. **PONTIANAK**: *Ivan* (085252585193); **Tanah Grogot**: *Elman Habibi*, Jl. Slt. Ibrahim Khaliluddin gg. Bhinneka No. 286 Rt.11 KAL-TIM

Papua

JAYAPURA: *Giri*, Jl. Honey No.3 Rt.06/X Bulend 2 Entrop, HP: 08134463556, **Papua Barat**: *Yasin*, Masjid al-Muhajirin Km 12 Klasaman Sorong Timur, HP: 08134394324

Australia

PO Box H-71 Hurlstone Park. NSW 2193.A (2-97500406)

Daftar Agen



1.300 Ulama Jabodetabek Tolak Kenaikan Harga BBM dalam forum Majelis Buhuts Al-Islamiyah, Sabtu (24/3) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

1.300 ulama hadir memenuhi Aula Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta







Antusiasme peserta.



Penandatanganan Pernyataan Sikap Ulama Menolak Kenaikan BBM.



Foto bersama para ulama dengan Pernyataan Sikap Penolakan Kenaikan BBM.

RAGAM KEGIATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA MENOLAK KEBIJAKAN MENAIKKAN HARGA BBM



Masirah Hizbut Tahrir Indonesia Menolak Kenaikan Harga BBM, Kamis (22/3) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.



Sekitar 250 orang hadir dalam Halqah Islam dan Peradaban [HIP] pada hari Rabu (21/3) di Wisma Antara, Jakarta dengan tema Tolak Kenaikan Harga BBM! Tolak Liberalisasi Migas! Pemerintah Bohong, Khianat dan Zalim. Turut hadir pula beberapa tokoh nasional di antaranya: Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan), Ahmad Djauhari Syamsudin (Ketum Syarikat Islam), Helmi M Burin (Ekonom Muhammadiyah) dan Ahmad Daryoko (Ketum SP BUMN Strategis)



1800 ulama se-Jawa Timur hadir dalam Majelis Buhuts Al-Islamiyah (MBI), Ahad (18/3) di Aula Zaitun Asrama Haji Sukolilo, Surabaya untuk menolak Kebijakan zalim menaikkan harga BBM.





Aksi MHTI Tolak Kenaikan Harga BBM, Rabu [20/3] di DPR RI.



10.000 Ulama dan Asatidz se-Provinsi Banten, memadati Alun-alun Masjid Agung Kota lama Banten, Sabtu (24/3) di Banten menolak kenaikan harga BBM.



1000 ulama se-Jawa Barat hadir dalam Majelis Buhuts Al-Islamiyah (MBI), Ahad (18/3) di Graha Emerald Jalan Cimuncang, Bandung.